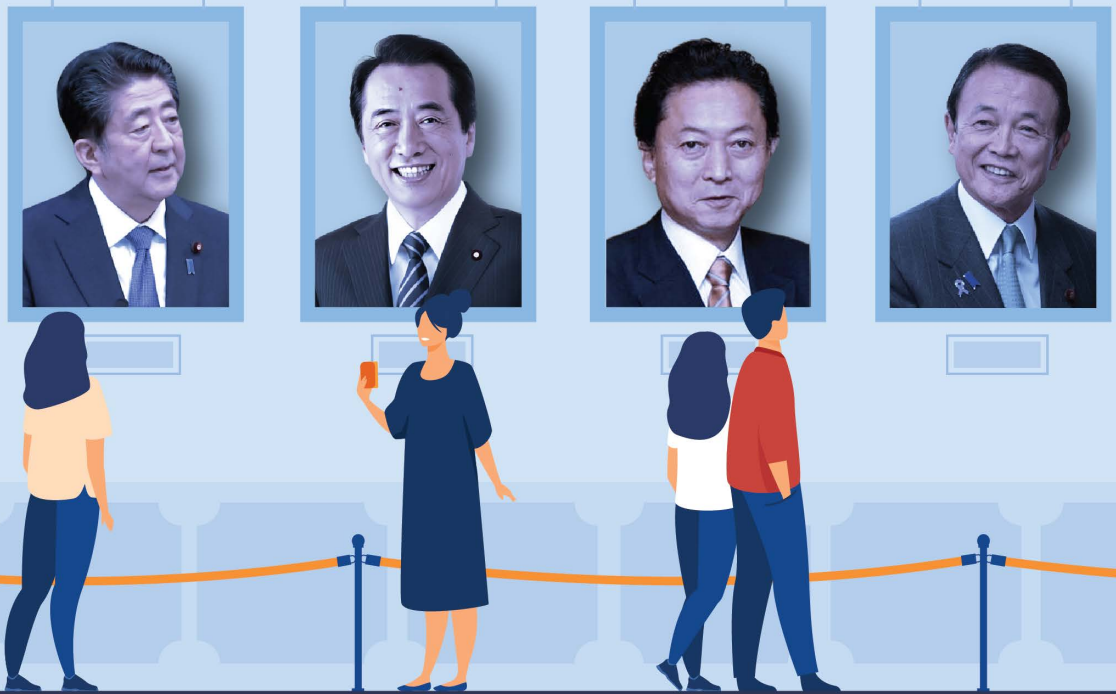


POLITIK DOMESTIK DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG:

*Era Perdana Menteri Itō Hirobumi
Sampai Shinzo Abe*



Seniwati



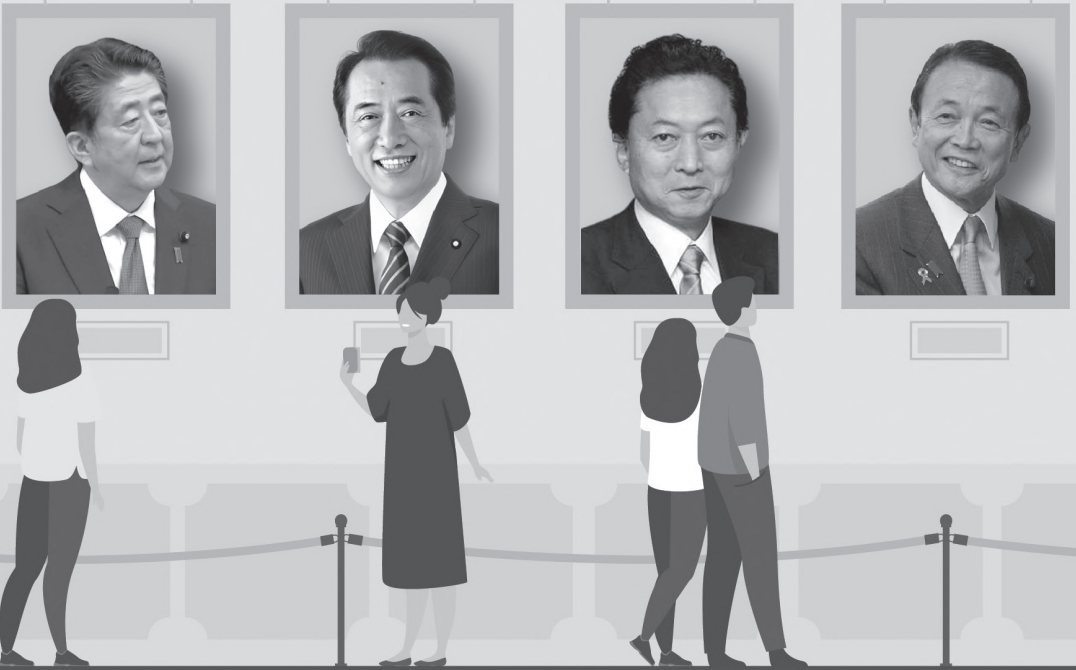
**POLITIK DOMESTIK DAN
KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG:**

*Era Perdana Menteri Itō Hirobumi
Sampai Shinzo Abe*

POLITIK DOMESTIK DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG:

*Era Perdana Menteri Itō Hirobumi
Sampai Shinzo Abe*

Seniwati



POLITIK DOMESTIK DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG:

*Era Perdana Menteri Itō Hirobumi
Sampai Shinzo Abe*

Penulis

Seniwati

Tata Letak dan Desain Sampul

Muhammad Ihlasul Amal

Ilustrasi Sampul

Freepik

Penerbit

UPT Unhas Press

Alamat Penerbit

Gedung UPT Unhas Press, Kampus Unhas Tamalanrea
Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar, Sulawesi Selatan
Telepon: 0411-8997706 | HP/WA: +62 8229 9555 591
unhaspress@gmail.com | unhaspress.com

Hak Cipta ©Seniwati. *All rights reserved.* Hak cipta dilindungi undang-undang.

Cetakan I 2020

ISBN 978-979-530-279-7

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia Daerah Sulawesi Selatan)
dan Anggota APPTI (Ikatan Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis/penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku ini menceritakan kebijakan dalam dan luar negeri perdana menteri Jepang sebanyak 40 perdana menteri. Menjadi sebuah kebanggaan bagi penulis dapat berbagi mengenai perpolitikan di Jepang di era masing-masing perdana Menteri tersebut. Buku ini mulai membahas peran Perdana Menteri Itō Hirobumi, sebagai perdana menteri pertama Jepang. Ia menjadi perdana menteri pada tahun 1885 sampai 1888. Kemudian pada tahun 1892 sampai 1896, lalu pada tahun 1898, dan terakhir pada tahun 1900 sampai 1901. Ia menjadi perdana menteri Jepang pada masa transisi dari bentuk pemerintahan kekaisaran menuju pemerintahan yang modern. Kemudian, penulis membahas kebijakan Kuroda Kiyotaka yang memiliki peran dalam

Restorasi Meiji dan penggulingan Keshogunan Tokugawa pada tahun 1868 dan pembentukan kembali kekaisaran memerintah di Jepang. Ia menjabat sebagai perdana menteri dari April 1888 hingga Oktober 1889. Penulis juga membahas masa pemerintahan Yamagata Aritomo yang menjadi perdana menteri Jepang selama dua periode yaitu tahun 1889-1891 dan diangkat lagi kemudian di tahun 1898-1900.

Selanjutnya, perdana menteri Matsukata Masayoshi yang menjabat sebanyak dua kali yaitu dari tahun 1891 sampai 1892 dan tahun 1896 sampai 1898. Ia adalah negarawan dengan program reformasi keuangannya dapat menstabilkan dan memulihkan keuangan pemerintahan Jepang pada tahun 1880-an dan memberi Jepang modal untuk dimodernisasi. Kemudian, Shigenobu Ōkuma yang menjabat sebagai perdana menteri Jepang yaitu pada tahun 1898 dan tahun 1914 sampai 1916. Dia mengorganisir *Rikken Kaishintō* (Partai Progresif) dan mendirikan Universitas Waseda. Berikut Katsura taro yang merupakan jenderal besar tentara kekaisaran Jepang dan menjabat sebagai perdana menteri ke-11, 13, dan 15 Jepang dalam periode 1901-1913. Ia adalah perdana menteri dengan masa jabatan terlama kedua dibawah Shinzo Abe. Selanjutnya Saionji Kimmochi yang menjabat Perdana Menteri Jepang dari tahun 1906 hingga 1908 dan pada tahun 1911 hingga 1912. Motivasi pertamanya adalah untuk mengimplementasikan perubahan berdasarkan dari penilaian Barat ke dalam sistem edukasi Jepang dengan tujuan untuk membuat sistem ini lebih modern dan progresif.

Kemudian Yamamoto Gonnohyoe yang menjadi perdana menteri Jepang yang ke-16 pada Februari 1913 sampai April 1914. Yamamoto lihai secara politik dan juga memahami pentingnya opini massa dan peran pers dalam dunia politik. Hara Takashi yang menjadi perdana menteri Jepang dari 1918 hingga 1921 dan yang mendirikan partai politik sebagai institusi fundamental politik di Jepang. Wakatsuki Reijiro yang mengambil alih perdana menteri Jepang pada tanggal 30

Januari 1926 setelah kematian tak terduga Kato di kantornya. Masa jabatan pertamanya berlangsung hingga 20 April 1927 ketika ia dipaksa mengundurkan diri selama krisis keuangan *Shōwa*. Wakatsuki sekali lagi menjadi perdana menteri dari 14 April 1931 sampai 13 Desember 1931. Saitō Makoto menjadi perdana menteri Jepang pada tahun 1932 sampai 1934. Ia mengambil langkah kontroversial untuk mengakui negara Manchukuo yang dikuasai Jepang (di Manchuria) dan menarik diri dari Liga Bangsa-Bangsa.

Koki Hirota menjadi perdana menteri pada Maret 1936 dan mengundurkan diri di bawah tekanan militer pada Februari 1937. Di antara kebijakan yang dia tetapkan adalah bahwa hanya perwira aktif Angkatan Darat atau Angkatan Laut yang dapat menjabat sebagai Menteri Perang atau Menteri Angkatan Laut. Konoe Fumimaro menjadi perdana menteri Jepang pada tahun 1937-1939 dan 1940-1941. Konoe berpendapat bahwa cara terbaik untuk mengatasi sistem “*two houses*” adalah melalui pembatasan *House of Peers*. Hideki Tōjō menjadi perdana menteri Jepang ke 27 tepatnya pada periode 1941–1944. Perannya yang cukup terkenal ialah saat dia memimpin upaya perang negaranya setelah serangan di pangkalan militer AS di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, dan di bawah arahnya, kemenangan besar awalnya dicetak di seluruh Asia Tenggara dan wilayah Pasifik Barat.

Kuniaki Koiso menjadi Perdana Menteri Jepang pada tahun 1944 dan berakhir di tahun 1945. Koiso diangkat menjadi Perdana Menteri Jepang dan diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan peperangan yang sedang berlangsung. Kijūrō Shidehara menjadi perdana menteri Jepang yang menjabat tidak sampai satu tahun, yaitu dari tanggal 9 Oktober 1945 sampai 22 Mei 1946. Kaisar Hirohito menunjuk langsung Shidehara karena kaisar menganggap bahwa Shidehara merupakan orang yang pro terhadap Amerika Serikat. Shigeru Yoshida adalah pemimpin politik Jepang yang menjabat beberapa kali sebagai perdana

menteri Jepang yang mana sebagian besar masa transisi kritis setelah Perang Dunia II yaitu dari tahun 1946-1947 lalu 1948 sampai 1954. Hitoshi Ashida menjadi Perdana Menteri Jepang pada 10 Maret 1948 sampai 15 Oktober 1948. Ia dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya akibat peristiwa penjara senju yaitu suatu skandal korupsi dimana sebuah perusahaan pupuk kimia Showa Denko yang melakukan suap besar ke dunia politik Jepang dengan tujuan untuk menerima pinjaman dari keuangan rekonstruksi yang aman.

Ichiro Hatoyama menjadi perdana menteri Jepang pasca Perang Dunia II yang menjabat pada tanggal 12 Desember 1954 – 23 Desember 1956. Berkat usaha dan kerja keras Ichiro Hatoyama dalam melakukan negosiasi dengan Uni Soviet, akhirnya kedua negara ini berhasil menandatangani deklarasi bersama untuk membangun kembali hubungan diplomatik. Ishibashi Tanzan menjadi perdana menteri Jepang dari Desember 1956 hingga Februari 1957. Dia menganjurkan perjanjian perdamaian multilateral antara Jepang, Amerika Serikat, Cina, dan Uni Soviet, tetapi kebijakannya yang semakin progresif membuatnya tidak populer dengan Partai Liberal-Demokrat, Nobusuke Kishi menjadi perdana menteri Jepang yang menjabat selama tiga tahun 128 hari dari tanggal 31 Januari 1957 sampai 19 Juli 1960. Saat Nabosuke menjabat sebagai perdana menteri, ia sangat menekankan hubungan Jepang dan Amerika Serikat harus terjalin dengan baik sehingga salah satu kebijakan yang dikeluarkan di masa jabatannya ialah membangun ulang kerjasama keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat.

Hayato Ikeda memulai empat tahun sebagai perdana menteri sejak 14 Juli 1960 sampai 1964. Kebijakan Ikeda dengan program “income doubling plan” berhasil membuat perekonomian Jepang menjadi dua kali lipat untuk produk nasional brutonya. Standar kehidupan masyarakat Jepang terus meningkat. Pengangguran berkurang dan disparitas pendapatan semakin kecil di masyarakat Jepang. Eisaku Sato menjadi

perdana menteri ketiga terlama yaitu menjabat selama tiga kali periode dimulai pada tahun 1964 hingga ia memutuskan untuk mengundurkan diri pada tahun 1972. Kakuei Tanaka menjadi perdana menteri Jepang dari 1972 hingga 1974 dan yang kemudian menjadi tokoh sentral dalam skandal politik besar. Takeo Fukuda menjadi perdana menteri pada tahun 1976 sampai 1978. Doktrin Fukuda yang diucapkan pada tahun 1977 di Manila pada saat itu, menyatakan tekad Jepang untuk tidak pernah lagi menggunakan kekuatan militer dan berusaha untuk memperkuat hubungannya dengan negara-negara Asia Tenggara.

Masayoshi Ōhira menjadi perdana menteri Jepang pada tahun 1978 sampai 1980. Ōhira merupakan pemain kunci dalam permainan politik Jepang dan selalu memperhatikan konsekuensi pemilihan domestik dari kebijakan luar negeri. Zenko Suzuki menjadi perdana menteri Jepang pada tahun 1980 menggantikan Ōhira yang meninggal secara tiba-tiba dan tahun 1982, ia mengundurkan diri dari jabatannya. Suzuki menjunjung slogan politiknya “politik harmoni” dan menekankan internasionalisme moderat. Nakasone Yasuhiro menjadi perdana menteri Jepang pada tahun 1982 sampai 1987. Nakasone berusaha untuk memperkuat hubungan Jepang dengan Amerika Serikat dengan meningkatkan kontribusi Jepang pada pertahanannya sendiri dan dengan menurunkan hambatan perdagangan Jepang untuk barang-barang Amerika. Toshiki Kaifu menggantikan Uno sebagai perdana menteri pada 8 Agustus 1989 dan berakhir pada tahun 1991. Toshiki Kaifu menjadi pemimpin pertama yang melakukan kunjungan resmi ke Tiongkok dan memutuskan isolasi diplomatik Tiongkok setelah insiden Tianmen Square.

Miyazawa Kiichi merupakan perdana menteri Jepang ke-78 dan menjabat dari 5 September 1991 sampai dengan 9 Agustus 1993. Ia mengeluarkan kebijakan yang kemudian mengharuskan Jepang untuk berpartisipasi dalam pengiriman pasukan ke luar negeri bersama PBB

untuk misi perdamaian. Morihiro Hosokawa mulai menjabat pada 9 Agustus 1993 sampai 28 April 1994. Ia merupakan perdana menteri non-LDP pertama dalam empat dekade dan mengangkat panji reformasi elektoral untuk merubah pola sistem pemilu Jepang. Tomiichi Murayama menjabat sebagai perdana menteri pada tanggal 30 Juni 1994 hingga 1996. Ia secara resmi mengumumkan pernyataan permintaan maaf atas tindakan agresi, penjajahan dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh tentara Jepang saat itu. Ryutaro Hashimoto menjadi Perdana Menteri Jepang yang menjabat selama dua tahun, dimulai pada tahun 1996 hingga tahun 1998. Ia menerapkan kenaikan pajak nasional untuk mengurangi defisit anggaran negara, namun perekonomian Jepang terus mengalami penurunan hingga mengalami resesi ekonomi terparah yang pernah terjadi di negara tersebut.

Keizo Obuchi menjabat sebagai perdana menteri selama kurang lebih dua tahun yakni pada pertengahan tahun 1998 hingga awal tahun 2000. Keizo Obuchi berhasil memperbaiki kondisi perekonomian negaranya sehingga ia mendapat dukungan dari masyarakat. Junichiro Koizumi adalah perdana menteri Jepang yang terpilih melalui Pemilihan Umum Ketua LDP pada tanggal 24 April 2001. Ia membawa konsep yang disebut “Reformasi struktural” untuk mengubah ekonomi Jepang agar lebih baik. Yasuo Fukuda menggantikan perdana menteri Shinzo Abe yang mengundurkan diri pada September 2007 dengan alasan sakit dan pada tanggal 1 September 2008 Yasuo Fukuda mengumumkan pengunduran dirinya. Ia mengusulkan skema jaminan kesehatan yang bakal menaikkan biaya bagi banyak orang tua. Taro Aso merupakan salah satu perdana menteri Jepang yang menjabat pada September 2008 hingga September 2009. Pilar utama dari kebijakan Taro Aso adalah vitalitas, ketenangan pikiran, dan kontribusi bagi dunia. Hatoyama Yukio menggantikan Asō sebagai perdana menteri pada 16 September 2009. Ia ingin agar kebijakan

luar negeri Jepang kurang bergantung pada Amerika Serikat dengan menciptakan jarak yang sama antar negara Asia dan AS. Naoto Kan menjabat dari tanggal 8 Juni 2010 hingga 2 September 2011 menggantikan pendahulunya yang tiba-tiba mengundurkan diri. Kan harus menghadapi persoalan-persoalan Jepang waktu itu salah satunya adalah Krisis Nuklir. Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada tanggal 26 September 2006. Ia mengeluarkan kebijakan luar negeri berupa dukungan kepada PBB terkait sanksi untuk Korea Utara yang melakukan uji coba nuklir.

Makassar, 3 November 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR — v

DAFTAR ISI — xiii

BAB 1 ITŌ HIROBUMI — 1

Peran Itō Hirobumi dalam Masa Transisi — 1

BAB 2 KURODA KIYOTAKA — 5

Restorasi Meiji — 5

Peran Kuroda Kiyotaka Dalam Mengembangkan Pulau
Hokkaido — 8

	Kebijakan Dalam Negeri	—	11
BAB 3	YAMAGATA ARITOMO (YAMAGATA KYOSUKE)	—	15
	Ekspansi Militer ke Asia	—	15
	<i>The Imperial Rescript on Education</i>	—	17
BAB 4	MATSUKATA MASAYOSHI	—	21
	Proses Transformasi	—	21
BAB 5	SHIGENOBU ŌKUMA	—	29
	Pemilihan Anggota Parlemen	—	29
	Kebijakan Luar Negeri	—	31
BAB 6	KATSURA TARO	—	35
	Kebijakan Periode Pertama 1901-1906	—	35
	Kebijakan Periode Kedua 1908-1911	—	37
	Kebijakan Periode Ketiga 1912-1913	—	37
BAB 7	SAIONJI KINMOCHI	—	39
	Kebijakan Dalam Negeri	—	39
BAB 8	YAMAMOTO GONNOHYOE	—	43
	Kebijakan Periode Pertama 1913-1914	—	43
	Kebijakan Periode Pertama September 1923-1924	—	45
BAB 9	HARA TAKASHI	—	47
	Kebijakan Pengurangan Kekuatan Militer di Luar Negeri	—	47
	Perdana Menteri “ <i>The Commoner</i> ”	—	49

BAB 10 WAKATSUKI REIJIRO	—	51
Kebijakan Periode Pertama 1926-1927	—	51
Kebijakan Periode Kedua 14 April 1931-13 Desember 1931	—	52
BAB 11 SAITŌ MAKOTO	—	55
Kebijakan Dalam dan Luar Negeri	—	55
BAB 12 KOKI HIROTA	—	59
Kebijakan Dalam dan Luar Negeri	—	59
BAB 13 KONOE FUMIMARO	—	63
Riwayat Hidup	—	63
Reformasi <i>House of Peers</i>	—	64
Kebijakan Luar Negeri	—	67
BAB 14 HIDEKI TŌJŌ	—	71
Rezim Diktatorian	—	71
Kebijakan Luar Negeri	—	72
Hideki Tōjō: <i>The Man Behind Japan During World War II</i>	—	74
BAB 15 KUNIAKI KOISO	—	77
Kebijakan Koiso Selama PD II	—	77
Strategi Militer	—	80
<i>Spoils-System</i>	—	80
BAB 16 KIJŪRŌ SHIDEHARA	—	83
Diplomasi Shidehara	—	83
Revisi Konstitusi Jepang	—	86

BAB 17 SHIGERU YOSHIDA	— 89
Kebijakan Doktrin Yoshida	— 89
Diplomasi Ekonomi Yoshida	— 92
<i>Japanese Communist Party</i> (JCP)	— 93
Perbaikan Hubungan dengan Negara-Negara di Asia Tenggara	— 94
BAB 18 HITOSHI ASHIDA	— 97
Penjara Senju	— 97
BAB 19 ICHIRO HATOYAMA	— 101
Penggabungan Dua Partai Konservatif	— 101
Permasalahan Kepulauan Kuril	— 103
Deklarasi Bersama Jepang-Uni Soviet	— 105
BAB 20 ISHIBASHI TANZAN	— 109
Kebijakan Dalam dan Luar Negeri	— 109
BAB 21 NOBUSUKE KISHI	— 113
Perjalanan Karir Politik	— 113
Kerja Sama Keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat	— 114
Kerja Sama Ekonomi antara Jepang dan Amerika Serikat	— 115
Kebijakan Memodernisasi LDP	— 116
Kerja Sama dengan Indonesia	— 118
BAB 22 HAYATO IKEDA	— 121
Kebijakan Deflasi	— 121

Perjanjian Keamanan Jepang-AS	—	123
<i>Golden Sixties</i>	—	123
BAB 23 EISAKU SATO	—	127
Penghargaan Nobel Perdamaian	—	127
Peningkatan Kerja Sama dengan Amerika Serikat	—	128
Hubungan Bilateral Jepang-Amerika Serikat dalam perang Vietnam	—	132
BAB 24 KAKUEI TANAKA	—	137
Malari	—	137
<i>Civil Engineer Politician</i>	—	139
BAB 25 TAKEO FUKUDA	—	141
Skandal <i>Showa Denko</i>	—	141
<i>Fukuda Doctrine</i>	—	143
BAB 26 MASAYOSHI ŌHIRA	—	147
Perjalanan Karier	—	147
Kebijakan Luar Negeri	—	149
BAB 27 ZENKŌ SUZUKI	—	151
Perjalanan Karier Politik	—	151
Slogan “Politik Harmoni”	—	153
<i>Northern Territories</i>	—	155
BAB 28 YASUHIRO NAKASONE	—	157
Perjalanan Karier Politik	—	157
Negara Kreditor Terbesar Di Dunia	—	159

Sistem “ <i>Balance Diplomacy</i> ”	—	159
Neo Liberalisme	—	161
Slogan “Jepang sebagai Bangsa Internasional”	—	164
BAB 29 TOSHIKI KAIFU	—	165
Perjalanan Karir Politik	—	165
Kebijakan Luar Negeri	—	166
BAB 30 KIICHI MIYAZAWA	—	169
Perjalanan Karir Politik	—	169
Kebijakan Luar Negeri	—	170
Slogan “ <i>Seikatsu Taikoku</i> ”	—	172
Reformasi Politik	—	174
BAB 31 MORIHIRO HOSOKAWA	—	177
Perjalanan Karir Politik	—	177
Kebijakan Luar Negeri	—	178
<i>Japan New Party</i>	—	179
BAB 32 TOMIICHI MURAYAMA	—	183
Perjalanan Karier Politik	—	183
Permintaan Maaf Internasional	—	184
BAB 33 RYŪTARŌ HASHIMOTO	—	187
Perjalanan Karier Politik	—	187
<i>Japanese Silk Road Diplomacy</i>	—	189
Diplomasi Eurasia	—	190

BAB 34 KEIZO OBUCHI	—	193
Perjalanan Karier Politik	—	193
CJK FTA	—	194
Sengketa Teritorial atas Kepulauan Kuril	—	196
Perbaikan Siklus Resesi	—	197
BAB 35 JUNICHIRO KOIZUMI	—	199
Perjalanan Karier Politik	—	199
Reformasi Struktural	—	200
Peningkatan Kerja Sama Keamanan Jepang-AS	—	202
BAB 36 YASUO FUKUDA	—	205
Perjalanan Karir Politik	—	205
Undang-Undang Tindakan Khusus Anti-Terrorisme	—	207
BAB 37 TARO ASO	—	211
Perjalanan Karier Politik	—	211
Runtuhnya Dominasi Partai LDP	—	213
Kebijakan Diplomatik Jepang	—	214
BAB 38 YUKIO HATOYAMA	—	217
Perjalanan Karier Politik	—	217
Kebijakan Luar Negeri	—	219
BAB 39 NAOTO KAN	—	223
Perjalanan Karier Politik	—	223
Krisis Nuklir	—	224
Pedoman Program Pertahanan Nasional	—	226

BAB 40 SHINZO ABE	—	229
Perjalanan Karier Politik	—	229
Kerja Sama Keamanan Jepang-Amerika Serikat	—	230
<i>Abenomics Program</i>	—	231
DAFTAR PUSTAKA	—	235

BAB 1

ITŌ HIROBUMI

1885-1888; 1892-1896; 1898, 1900-1901

Peran Itō Hirobumi dalam Masa Transisi

Perdana menteri pertama Jepang adalah Itō Hirobumi. Sewaktu ia menjabat sebagai perdana menteri, Jepang sedang mengalami transisi dari bentuk pemerintahan kekaisaran menuju pemerintahan yang modern. Itō Hirobumi merupakan orang yang punya peran besar dalam transisi tersebut. Jika ada istilah terkait Jepang yang sering disebut dengan restorasi Meiji, maka Itō Hirobumi punya peranan besar dalam membantu menyusun konstitusi Meiji pada tahun 1889 dan membentuk *Diet* nasional *bicameral* pada tahun 1890 (Yukio, 2010: 7). Itō Hirobumi yang memiliki nama asli Toshisuke lahir tang-



Gambar 1.1. Itō Hirobumi
Sumber: Akita, 2020a

gal 14 Oktober 1841 di provinsi Suō (sekarang di kenal dengan nama prefektur Yamaguchi) Jepang, yang pada waktu itu telah mulai dimasuki oleh pengaruh Barat dan mulai luntarnya pemerintahan Shogun Tokugawa. Ketika restorasi Meiji belum terjadi, karena bakat yang dimilikinya, para pemimpin Chōshū mengirimnya belajar ke Inggris bersama dengan temannya Inoue Kaoru untuk mempelajari ilmu kelautan Barat pada tahun 1863 (Akita, 2020:1). Saat restorasi Meiji terjadi dan beberapa konflik politik terjadi, Itō berhasil merintis karir dan menjadi perdana menteri yang pertama. Ia diangkat menjadi seorang marquess pada tahun 1884 dan seorang

adipati (pangeran) pada tahun 1907. Ia menjadi perdana menteri pada tahun 1885 sampai 1888. Kemudian pada tahun 1892 sampai 1896, lalu pada tahun 1898, dan terakhir pada tahun 1900 sampai 1901.

Selama masa jabatannya, Itō telah melakukan beberapa hal yang penting untuk dasar negara Jepang modern. Ia berhasil mencapai dua perjanjian internasional yang penting. Pertama, perjanjian dengan Inggris di mana setiap orang Inggris akan mematuhi hukum Jepang ketika masuk ke negara Jepang. Bahkan, perjanjian ini kemudian diikuti oleh negara Eropa lainnya. Kedua, kemenangan Jepang terhadap Cina di tahun 1895 dalam segi modernisasi dan kemajuan. Jepang saat itu menjadi negara yang paling maju dalam konteks Asia Timur (Akita, 2020a). Hubungannya dengan Kido dan Ōkubo Toshimichi, tokoh penting lain di awal Meiji Jepang, memungkinkan dia untuk melakukan tugas pemerintah ke Amerika Serikat dan Misi Iwakura ke Eropa pada tahun 1870 dan tahun 1871 sampai 1873 untuk mempelajari dan mengerjakan berbagai hal yang

beragam seperti perpajakan dan sistem anggaran dan revisi perjanjian (Akita, 2020b).

Ayah Itō adalah anak angkat dari keluarga *samurai* (pejuang) sederhana di domain Chōshū di Jepang barat, dan Itō tumbuh di tengah kondisi politik yang goncang seputar kemunduran Keshogunan Tokugawa yang telah memerintah Jepang sejak 1603 dan pengaruh kebangkitan Barat di negara tersebut. Dia memainkan peran kecil dalam peristiwa yang mengarah pada Restorasi Meiji tahun 1868, gerakan yang menggulingkan keshogunan dan membangun kembali otoritas resmi kaisar. Peristiwa ini membawanya ke dalam kontak dengan orang-orang seperti Kido Takayoshi, yang akan menjadi salah satu pemimpin besar Meiji Jepang dan yang merupakan mentor terpenting Itō di tahun-tahun itu (Akita, 2020b).

Karir politiknya berubah drastis ketika Ōkubo, orang paling berkuasa di pemerintahan, dibunuh pada tahun 1878, dan Itō menggantikannya sebagai menteri dalam negeri. Kemajuannya membawanya ke dalam konflik dengan negarawan yang sama berbakat dan ambisius Ōkuma Shigenobu. Dalam serangkaian pukulan politik yang hebat, Itō memaksa Ōkuma dan pendukungnya keluar dari pemerintahan pada tahun 1881 dan membujuk pemerintah untuk mengadopsi sebuah konstitusi. Pada tahun 1889 kaisar memproklamasikan konstitusi tersebut dan pada tahun 1890, *Diet* nasional didirikan (Akita, 2020b).

Akan tetapi, meski demikian banyak literatur yang melihat Itō dengan nada yang negatif. Itō dianggap sebagai perdana menteri yang pro-otoritarianisme karena membiarkan Kaisar Jepang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Meski demikian, ada literatur yang berusaha menampik itu. Literatur tersebut ditulis oleh Takii Kazuhiro. Takii Kazuhiro berargumen bahwa Itō Hirobumi mempunyai suatu desain besar terkait negara konstitusional yang ideal, peradaban, dan pemerintahan rakyat. Dalam visi Itō, rakyat dipandang sebagai orang

yang terdidik dan telah menjadi madani (*civilized*) dan berpengetahuan. Dalam bentuk yang paling mutakhir, Itō menginginkan negara yang berbasis pengetahuan (*knowledge based state*). Ia menggambarkan Jepang akan memiliki hukum yang berbasis pengetahuan dan pengalaman dari pemimpin yang memiliki pengetahuan. Dengan visi seperti ini, Kazuhiro bahkan mendeskripsikan Itō sebagai negarawan yang memiliki pengetahuan dalam memimpin negara (*statesman of knowledge*) (Kazuhiro, 2014: 5).

Terlepas dari hal tersebut, tulisan tentang Itō Hirobumi tidak begitu banyak. Jikapun ada, tulisan tersebut selalu punya tendensi merendahkan Itō. Pada masa-masa akhir hidupnya ia dibunuh dan sering disebut sebagai konsekuensi dari tindakannya yang ingin menekan nasionalisme Korea. Akan tetapi, sebelum ia menghela nafas terakhir, ia masih sempat mengatakan bahwa orang Korea yang membunuhnya itu bodoh. Beberapa tahun setelah Itō terbunuh, Jepang melaksanakan aneksasi terhadap Korea. Salah satu akibatnya adalah ketiadaan Itō untuk mencegah hal tersebut.

Perannya yang begitu besar dalam restorasi Meiji dan pendirian negara modern Jepang, Itō dikenang sebagai negarawan yang hebat di mata orang-orang Jepang dan dunia internasional. Jasa-jasanya telah membuat Jepang melalui suatu revolusi pemerintahan yang cepat tetapi tetap damai. Ia juga yang memberikan dasar pijakan untuk pemerintahan rakyat dari Jepang itu sendiri. Terlepas dari segala kontroversi tentang dirinya, Itō Hirobumi tetap merupakan seorang perdana menteri yang memiliki kharismatik dan telah berjasa membawa perubahan yang luar biasa terhadap Jepang. Tanpanya, semuanya tampak mustahil.

BAB 2

KURODA KIYOTAKA

1888-1889

Restorasi Meiji

Sejarah Jepang modern dapat dibagi menjadi empat periode, yaitu:

1. 1600-1868: Periode shōguns Tokugawa; tatanan politik feodal dengan perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahap. Periode ini menyaksikan tumbuhnya urbanisasi, penyebaran pendidikan kerakyatan dan kebangkitan kelas pedagang.
2. 1868-1890: Periode Meiji awal; modernisasi yang cepat dan perubahan dramatis dari institusi politik, sosial, dan ekonomi; memenuhi tantangan Barat dengan mengikuti modelnya.

3. 1890-1945: Kekaisaran Jepang; kebijakan konstitusional dengan kaisar sebagai raja yang memerintah; industrialisasi, urbanisasi, dan masyarakat yang semakin modern; dorongan untuk status internasional dan kekuatan dunia, termasuk imperialisme di Asia dan akhirnya perang dengan Amerika Serikat.
4. 1945-2020: Jepang Kontemporer; reformasi demokrasi di bawah pendudukan Sekutu; demokrasi politik yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun enam puluhan dan tujuh puluhan diikuti oleh ketidakstabilan politik dan resesi di awal tahun sembilan puluhan (Asia for Educators, 2020a).

Awalnya, Jepang merupakan negara yang dipimpin oleh kaisar, dan hanya kaisarlah yang berhak untuk mengatur Jepang tanpa bantuan siapapun. Pada pertengahan abad kesembilan belas, Keshogunan yang berkuasa di Jepang adalah tatanan feodal yang lemah, tidak mampu mengendalikan semua wilayahnya sendiri, apalagi mempertahankan negara dari ancaman kekuatan Barat. Ancaman ini terwujud pada tahun 1853 dengan kedatangan Komodor Matthew Perry dan satu skuadron Angkatan Laut AS menuntut Jepang membuka perdagangan dengan Barat. Hasilnya adalah serangkaian perjanjian “tidak setara” di mana Jepang dipaksa untuk memberikan hak ekonomi dan hukum khusus kepada kekuatan Barat (Asia for Educators, 2020a).

Namun sejak Jepang dipimpin oleh Kaisar Meiji pada tahun 1868 Jepang mulai mengalami keterpurukan. Jepang memiliki militer yang lemah, pertanian yang tidak dapat menghidupi masyarakat, dan juga tidak berkembang pesatnya teknologi di Jepang. Keadaan keterpurukan Jepang ini membuat Jepang tersudutkan oleh negara-negara maju Eropa dan Amerika Serikat yang menuntut Jepang untuk membatasi perdagangan luar negeri Jepang dengan menandatangani perjanjian yang membatasi kontrolnya atas perdagangan luar negerinya sendiri dan meminta agar kejahatan yang menyangkut orang asing di Jepang

diadili bukan di Jepang tetapi di pengadilan Barat. Akhirnya terbentuklah suatu kelompok pemuda yang disebut dengan Genro, Genro inilah yang berhasil menggulingkan Kaisar Meiji atau yang disebut dengan peristiwa Restorasi Meiji. Peristiwa ini dikenal juga dengan the Political Revolution “*restored*” kaisar ke kekuasaan (Asia for Educators, 2020b).

Kemudian, kaisar di Jepang tidak akan memerintah secara langsung. Kaisar akan menerima nasihat dari kelompok-kelompok yang telah menggulingkannya. Pada awalnya, satu-satunya kekuatan kelompok-kelompok tersebut adalah kaisar akan menerima nasihat mereka dan beberapa domain feodal yang kuat memberikan dukungan militer. Namun, mereka bergerak cepat untuk membangun kendali militer dan ekonomi mereka sendiri. Pada Juli 1869 para penguasa feodal telah diminta untuk menyerahkan domain mereka, dan pada tahun 1871 domain ini dihapuskan dan diubah menjadi prefektur dari negara bagian pusat yang bersatu (Asia for Educators, 2020b).

Restorasi dan modernisasi Meiji berlangsung dari tahun 1868 sampai 1890. Para pemimpin baru mempelajari institusi politik, ekonomi, dan sosial dari kekuatan Barat dan secara selektif mengadopsi yang sesuai dengan tujuan mereka. Pada tahun 1889, sebuah konstitusi diundangkan yang membentuk pemerintahan parlementer tetapi membiarkannya bertanggung jawab kepada kaisar daripada kepada rakyat. Kekuasaan administratif dipusatkan dalam birokrasi nasional yang juga memerintah atas nama kaisar. Kelas-kelas tersebut dinyatakan setara, sehingga *samurai* dan tuannya kehilangan hak feodal mereka, sementara peran pedagang yang sebelumnya dibenci karena haus keuntungan, mulai dihormati (Asia for Educators, 2020a). Industri-industri di Jepang mulai mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang sehingga industri-industri menghasilkan berbagai macam inovasi.

Selain itu, dalam sektor pendidikan, pemerintah Jepang mewajibkan adanya wajib militer dan pendidikan umum dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat Jepang sehingga memberi mereka kemudahan dalam menggunakan teknologi-teknologi baru tersebut.

Peran Kuroda Kiyotaka Dalam Mengembangkan Pulau Hokkaido



Gambar 2.1. Kuroda Kiyotaka
Sumber: Encyclopedia Britannica, 2020a

Salah seorang negarawan Jepang, Kuroda Kiyotaka yang lahir pada 21 November 1840 memiliki peran dalam Restorasi Meiji dan penggulingan Keshogunan Tokugawa pada tahun 1868 dan pembentukan kembali kekaisaran memerintah di Jepang. Ia menjabat sebagai perdana menteri dari April 1888 hingga Oktober 1889. Kuroda adalah salah satu dari genro asli, segelintir negarawan dari Satsuma dan Chōshū, yang secara resmi mendominasi pemerintahan Jepang dari tahun 1868 hingga akhir Perang Dunia I. Setelah memimpin pasukan kekaisaran yang merebut pulau Hokkaido di Jepang utara untuk pemerintahan Meiji, Kuroda Kiyotaka

dipercayai untuk mengembangkan wilayah Jepang yang tergolong primitive tersebut pada tahun 1870. Dia mempekerjakan ahli pertanian Amerika, menyubsidi imigran, dan mendorong industri baru. Kiyotaka pun berhasil mengembangkan wilayah tersebut. Sepuluh tahun kemudian, wilayah tersebut memiliki populasi empat kali lipat lebih banyak dan produktivitas warga disana pun meningkat. Alhasil, Hokkaido menjadi bagian aman dari kepulauan Jepang, aman dari ancaman penetrasi Rusia (Encyclopedia Britannica, 2020a).

Kuroda Kiyotaka menjabat sebagai wakil direktur jenderal Badan Pengembangan Hokkaido. Kuroda Kiyotaka sangatlah serius mengembangkan Hokkaido. Saat itu Kiyotaka pun mendirikan Sekolah Tinggi Pertanian Sapporo dan memperkenalkan sistem penempatan tentara di darat. Tak hanya itu saja, pada tahun 1876 Kiyotaka menyelesaikan hubungan bilateral Perjanjian Persahabatan Jepang-Korea sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, namun ia tidak menyelesaikan masa jabatannya dan mengundurkan diri dari jabatannya di bawah Krisis Politik tahun 1881 (*National Diet Library*, 2013). Ia menjabat sebagai menteri pertanian dan perdagangan dalam kabinet Ito Hirobumi (*Prime Minister* pertama). Karena kegigihan dan hasil kerja yang baik, Kuroda Kiyotaka diangkat menjadi prime minister untuk melanjutkan Ito Hirobumi. Kuroda Kiyotaka menjadi prime minister kedua Jepang dan diangkat menjadi prime minister pada April 1888 hingga Oktober 1889 selama 18 bulan (*Britannica*, 2018).

Industrialisasi dan ekspansi mulai berlangsung pada tahun 1890 sampai 1930. Ketika periode Meiji berakhir, dengan kematian kaisar pada tahun 1912, Jepang melakukan beberapa strategi dan tindakan dalam membangun Jepang yang lebih modern, yaitu:

1. Pemerintahan birokrasi yang sangat tersentralisasi;
2. Konstitusi yang membentuk parlemen terpilih;
3. Sistem transportasi dan komunikasi yang berkembang dengan baik;
4. Populasi berpendidikan tinggi yang bebas dari batasan kelas feodal;
5. Sektor industri yang mapan dan berkembang pesat berdasarkan teknologi terkini; dan
6. Tentara dan angkatan laut yang kuat (*Asia for Educators*, 2020b).

Sejak adanya peristiwa Restorasi Meiji pada tahun 1868, Jepang mempercayai *prime minister* untuk ikut serta memimpin Jepang dan bertanggung jawab kepada Kaisar. Jepang telah mendapatkan kembali kendali penuh atas perdagangan luar negeri dan sistem hukumnya. Setelah Jepang memenangkan perang (salah satunya melawan kekuatan Eropa dan Rusia), Jepang membangun kekuatan penuh dalam urusan internasional. Beberapa tahun kemudian, Jepang telah mencapai tujuannya dan telah memengaruhi seluruh masyarakatnya (Asia for Educators, 2020b). Keberhasilan Jepang dalam proses modernisasi pada akhirnya dapat menyaingi negara-negara Barat dalam berbagai sektor khususnya sektor ekonomi.

Periode industrialisasi adalah masa perubahan sosial dan ekonomi dalam monarki konstitusional yang didirikan pada tahun 1890. Ketika arsitek asli pemulihan meninggal, berbagai cabang pemerintahan mulai bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Sebuah oligarki yang terikat erat oleh konsepsi bersama anggotanya tentang tujuan nasional digantikan oleh kelompok kepentingan seperti parlemen, birokrasi sipil, militer, dan rumah tangga kekaisaran. Kelompok kepentingan ini bersaing untuk mendapatkan *the ear of the Emperor* yang namanya mereka kelola dalam pemerintahan (Asia for Educators, 2020a).

Industri Jepang terus berkembang termasuk di industri ringan seperti ekspor tekstil dan di industri berat seperti baja dan pembuatan kapal. Kota-kota di Jepang juga terus tumbuh. Oleh karena itu, banyak masyarakat Jepang beralih dari bertani menjadi buruh di pabrik dan perkantoran. Sementara itu, banyak pemilik tanah di pedesaan ingin memiliki tanah yang lebih luas sehingga jumlah penyewa miskin semakin meningkat. Jepang sangat terpukul oleh krisis ekonomi dunia yang dimulai pada tahun 1929 karena selalu bergantung pada perdagangan luar negeri (Asia for Educators, 2020a). Para petani yang menanam

sutra untuk diekspor ke Amerika Serikat tidak menemukan pasar untuk produk mereka, yang berdampak pada menurunnya permintaan akan sutra. Kemudian, pasar saham jatuh dan pertumbuhan ekonomi Jepang melambat. Akibatnya, masalah sosial meningkat, terutama di pedesaan.

Kuroda Kiyotaka menjadi prime minister kedua Jepang dan diangkat menjadi prime minister pada April 1888 hingga Oktober 1889. Masa jabatan Kiyotaka tergolong singkat karena hanya berlangsung selama 18 bulan. Kiyotaka sendiri mengundurkan diri sebagai prime minister dikarenakan adanya perselisihan pada “*Unequal Treaties*” atau “perjanjian tidak setara”. Kiyotaka tidak setuju akan paksaan negara-negara Eropa karena negara-negara Eropalah yang mendapat untung. Oleh karena itu, perjanjian ini disebut “perjanjian tidak setara”. Saat terjadi perselisihan dalam penyelesaian masalah *Unequal Treaties*, Kuroda Kiyotaka pun mengundurkan diri dari jabatan Prime Minister di tahun 1889 (Encyclopedia Britannica, 2020a). Usai mengundurkan diri, Kuroda diminta untuk tetap aktif dalam sistem pemerintahan Jepang. Salah satu jabatan penting yang pernah ia pegang adalah menjadi anggota dewan rahasia Jepang dan ketua dewan penasihat pemerintah Jepang. Ia tetap aktif dalam sistem pemerintahan Jepang hingga ia meninggal.

Kebijakan Dalam Negeri

Terlahir dari keluarga pahlawan, membuat Kiyotaka dipercaya oleh pemerintahan untuk menjadi orang kepercayaan mengelola wilayah-wilayah yang pada saat itu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah berharap dengan adanya pengelolaan wilayah yang cukup luas ini akan membuat pendistribusian warga Jepang dapat terbagi rata dan dapat memanfaatkan setiap wilayah Jepang dengan baik, hingga pemerintah pun membuat sebuah badan yang khusus mengelo-

la wilayah primitif yang nanti akan dikelola, yakni “*Kaitakushi*” (Badan Pengembangan Wilayah Hokkaido) di tahun 1869 untuk mengelola wilayah Hokkaido yang dianggap mampu untuk menjadi wilayah yang lebih makmur. Meskipun saat itu Kuroda Kiyotaka masih tergolong *samurai* berpangkat rendah, namun pada tahun 1870 Kuroda dipercaya untuk mengelola Hokkaido dan dipercaya untuk menjadi pemimpin “*Kaitakushi*” (*the Development Agency*) (Lu, 2019:40). Kuroda memang sangat terlihat memiliki hasrat terhadap kebijakan modernisasi Barat, sehingga ia lebih memfokuskan mengelola Hokkaido mengikuti cara kebijakan barat. Kuroda meyakini ia dapat mengelola wilayah Hokkaido yang luas ini semata-mata ingin memberikan kontribusi yang baik untuk pemerintah dan kekaisaran Jepang. Kontribusi yang dimaksud ialah pendistribusian warga agar bisa bermukim dan tinggal di Hokkaido juga dapat mengelola wilayah Hokkaido dengan hasil tanam yang baik.

Kiyotaka memiliki dua strategi atau program untuk mewujudkan Hokkaido menjadi wilayah yang sukses terutama dalam sektor perekonomian. Program pertama yakni “*tonhendei*” atau petani-prajurit, jadi setiap ada pelatihan militer maka setiap prajurit militer diwajibkan untuk tinggal di Hokkaido secara gratis, bahkan saat itu ada juga bagi-bagi tanah gratis di Hokkaido. Program kedua yakni “*tochi kaitaku*” yang ditujukan untuk pembangunan lahan wilayah Hokkaido, dengan menyediakan sewa tanah gratis yang bertujuan untuk bercocok tanam agar perekonomian di Hokkaido juga berkembang (Lu, 2019:40). Kedua program tersebut berhasil meningkatkan sistem perekonomian di wilayah Hokkaido dan populasi di Hokkaido juga terus mengalami peningkatan.

Setelah sukses dalam mengelola Hokkaido menjadi wilayah yang memberikan kontribusi perekonomian yang besar kepada negara, Kuroda dipercaya untuk menyelesaikan hubungan bilateral perjanjian

persahabatan Jepang-Korea pada tahun 1876 sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Namun ia tidak menyelesaikan masa jabatannya dan mengundurkan diri dari jabatannya di bawah krisis politik tahun 1881 (Modern Japanese Historical Figures, 2019b). Kemudian, Kuroda ditunjuk untuk menjabat sebagai menteri pertanian dan perdagangan dalam kabinet Ito Hirobumi (*prime minister* pertama). Kuroda Kiyotaka diangkat menjadi Prime Minister untuk melanjutkan Ito Hirobumi karena kegigihan dan hasil kerjanya yang baik. Ia memiliki visi lebih spesifik untuk tidak menggabungkan masalah pemerintahan dengan perpolitikan karena ia begitu resah saat tahu perdana menteri sebelumnya selalu memiliki rencana untuk bisa menguasai penuh Jepang dan mencampurkan masalah pemerintah dan perpolitikan Jepang. Namun setelah upaya yang dilakukan Kuroda tidak berhasil karena memang apapun yang dilakukan tidak diperhatikan sepenuhnya, ia pun mengajukan diri untuk mundur dari jabatannya pada tahun 1889 dikarenakan adanya perselisihan pada *Unequal Treaties* (Encyclopedia Britannica, 2020a). Ito Hirobumi tetap memegang jabatan penting dalam sistem pemerintahan Jepang ketika Kuroda menjadi perdana Menteri. Kondisi ini membuat Kuroda tidak leluasa dalam mengatur pemerintahan karena Ito tetap ikut campur tangan.

BAB 3

YAMAGATA ARITOMO (YAMAGATA KYOSUKE)

1889-1891; 1898-1900

Ekspansi Militer ke Asia

Yamagata Aritomo lahir pada 14 Juni 1838 dan meninggal pada 1 Februari 1922 (berusia 84 tahun). Ia menjadi perdana menteri Jepang selama dua periode yaitu tahun 1889-1891 dan diangkat lagi kemudian di tahun 1898-1900. Ia memiliki latar belakang militer. Sebelum menjadi perdana menteri, ia menjabat sebagai *vice minister of military affairs* (wakil menteri militer) pada awal tahun 1870an (Encyclopedia Britannica, 2020ae).

Yamagata berasal dari keluarga *samurai* dengan pangkat atau kedudukan terendah di Choshu (sebuah wilayah di Jepang Barat yang sa-



Gambar 3.1. Yamagata Aritomo
Sumber: Encyclopedia Britannica,
2020ae

ngat menentang kediktatoran militer Tokugawa yang memerintah Jepang dari awal abad ke-17 hingga restorasi Meiji tahun 1868). Yamagata memainkan peran penting pada saat disusunnya naskah kekaisaran 1890 tentang pendidikan bersama Motoda Eifu dan Inoue Kowashi. Pada tahun yang sama, ia mampu untuk memecahkan kebuntuan dalam *Diet* yang memungkinkan pemerintah untuk mengeluarkan anggaran untuk pertama kalinya meskipun dengan cara suap dan paksaan (Hackett, 1971). Peran penting Yamagata terutama dalam bidang militer membuat dirinya disegani di negaranya sehingga para pesaing politiknya tidak berani menggoyahkan posisinya.

Pada periode awal menjabat, sebelumnya ia pergi ke Eropa dalam rangka penelitian sistem pemerintahan lokal selama setahun. Kemudian ia kembali ke Jepang dan menjadi perdana menteri pertama di bawah sistem parlementer negara yang baru dibentuk. Yamagata kemudian mengusulkan Jepang untuk memperluas dominasinya atas sebagian benua Asia. Ia merupakan seorang independen atau tidak memiliki partai. Pada tahun 1891, ia mengundurkan diri karena lelah dengan perselisihan partai-partai yang ada disekitarnya. Saat ia mundur, ia tidak meninggalkan pemerintahan Jepang pada saat itu, ia menjadi menteri kehakiman (1892-1893) dan presiden dewan penasihat (1893-1894) dan menjadi anggota *genro* (badan informal penasihat rahasia kaisar) (Encyclopedia Britannica, 2020ae). Ini membuktikan sekalipun ia mundur, tetapi perannya dikancah perpolitikan negara tetap ada bahkan menempati posisi-posisi yang penting.

Sebelum ia menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya, ia mengukuhkan posisinya dibidang militer dengan beberapa kali menjadi komando perang seperti perang Sino-Japanese di Korea pada 1894.

Pada saat menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya, separuh anggotanya adalah jenderal dan laksamana sehingga Yamagata berhasil mempercepat kebijakan ekspansinya ke Asia. Pada saat pemberontakan atau perang *boxer* di China terjadi, pada saat itu ia mengirim kontingen Jepang terbesar ke negara China atas permintaan Inggris untuk menghentikan pemberontakan. Kebijakan Yamagata pada saat menjabat ini lebih kearah militer (Hackett, 1971: 156-158).

Yamagata mengundurkan diri pada Oktober 1900 pada kabinet keduanya karena ia tidak dapat menangani krisis keuangan negara yang disebabkan oleh ekspansi militer atau dengan masalah pembagian Tiongkok setelah Pemberontakan Boxer. Pada tahun 1903 hingga 1909, ia dan Ito secara bergantian menjabat sebagai presiden Dewan Penasihat. Selama Perang Rusia-Jepang (1904–1905), ia menjadi kepala staf umum, dan pada tahun 1907 ia dianugerahi gelar pangeran atas jasanya yang terhormat. Dia mengantisipasi terulangnya perang antara Jepang dan Rusia dan menyiapkan rencana darurat untuk perang dengan Amerika Serikat dan Rusia. Ia juga memainkan peran penting ketika Jepang terlibat dalam Perang Dunia II (Encyclopedia Britannica, 2020ae).

The Imperial Rescript on Education

Diet nasional Jepang adalah sebuah badan tertinggi kedaulatan dan badan legislatif bikameral yang terdiri dari dewan perwakilan dan dewan penasihat. Kedua majelis ini dipilih langsung dibawah sistem pemungutan suara paralel. *Diet* ini pun juga secara resmi bertanggung jawab untuk memilih perdana menteri. *Diet* ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1889 saat kekuasaan Meiji dan perdana menteri Yamagata Aritomo. Yamagata mengusulkan pada *Diet* tersebut bahwa Jepang haruslah meluaskan dominasinya atas sebagian benua Asia (Encyclopedia Britannica, 2020ae).

The Imperial Rescript on Education (Kyōiku ni Kansuru Chokugo) merupakan sebuah naskah kekaisaran tentang pendidikan yang ditan-datangani oleh kaisar Meiji pada tanggal 30 Oktober 1890 yang meng-artikulasikan kebijakan pemerintah tentang prinsip-prinsip panduan pendidikan di kekaisaran Jepang. Dokumen ini terdiri dari 315 Karakter dan dibacakan dengan lantang di semua acara sekolah, dan siswa diminta untuk mempelajari dan menghafal teks tersebut. Naskah ini merupakan sebuah indoktrinasi yang dapat memperkuat pemerintah nasional Jepang dan memperkuat ikatan antara kaisar dan rakyat setia Jepang. Bagian utama dari naskah ini adalah daftar kebajikan yang harus ditanamkan oleh para kaisar seperti Chu (Kesetiaan), Ko (Bakti) dan kesiapan rakyat untuk mengabdikan diri mendukung keluarga kekaisaran. Meskipun transkrip ini tidak digunakan lagi setelah Jepang menyerah pada perang dunia II, namun naskah ini berhasil memainkan peran penting dalam menciptakan semangat dalam masyarakat Jepang khususnya dalam bidang pendidikan. Yamagata Aritomo merupakan seorang tokoh yang membujuk kaisar untuk mengumumkan naskah tersebut (JapanTimes, 2019a).

Antara tahun 1899-1901, terjadi sebuah pemberontakan di China yang disebut pemberontakan Boxer atau gerakan Yihetuan di mana pemberontakan ini diprakarsai oleh *Militia United in Righteousness (Yihequan)* atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Boxers dikarenakan sebagian besar daripada anggotanya merupakan seorang ahli seni bela diri Tiongkok. Pada Mei 1900, Boxers ini menyerang Tientsin dimana mereka membakar rel kereta api dan membunuh banyak pekerja saat mereka bergerak di Peking. Posisi orang Eropa di ibukota pada saat itu sangat berbahaya sehingga dikirimlah seorang laksamana Inggris untuk membela orang-orang Eropa tersebut. Namun tidak berhasil dan laksamana Inggris tersebut terpaksa mundur bersama pasukannya. Menteri Jerman dan seorang pejabat Jepang dikepung dan

terbunuh pada saat itu sehingga perdana menteri Jepang pada saat itu Yamagata Aritomo mengusulkan untuk menyediakan pasukan jika diminta oleh Barat dikarenakan Jepang tidak ingin membangkitkan kecurigaan kekuatan Barat atas ambisinya pada saat itu meskipun Jepang sangat ingin balas dendam atas kematian pejabatnya sewaktu terjadinya Boxer Rebellion tersebut. Kemudian atas permintaan dari Inggris Raya, pemerintah Jepang dalam hal ini Yamagata mengirimkan kontingen Jepang terbesar pada saat itu untuk menghentikan pemberontakan yang membuat Jepang dapat memainkan peran utama dalam menekan gerakan nasionalis Tiongkok dan meningkatkan posisi Jepang di level internasional (Hilldrup, 2006).

Di dalam negeri, Yamagata berusaha untuk menekan gerakan buruh sosial di tahap awal bersamaan dengan memperkuat otonomi angkatan bersenjata dan juga birokrasi pemerintahan. Ia pun juga mengeluarkan peraturan pemerintah di mana pengangkatan menteri angkatan darat dan angkatan laut hanya diperbolehkan dari kalangan perwira aktif dengan kata lain membebaskan militer dari kendali sipil (Encyclopedia Britannica, 2020ae).

BAB 4

MATSUKATA MASAYOSHI

1891-1892, 1896-1898

Proses Transformasi

Matsukata Masayoshi atau *Kōshaku* (Pangeran) Matsukata Masayoshi lahir 3 April 1834 di Kagoshima, Jepang dan meninggal pada 2 Juli 1924 di Tokyo. Ia adalah negarawan dengan program reformasi keuangannya dapat menstabilkan dan memulihkan keuangan pemerintah Jepang pada tahun 1880-an dan memberi Jepang modal untuk dimodernisasi. Matsukata adalah pejabat tinggi di domain Satsuma ketika keluarga Tokugawa digulingkan dan otoritas yang berkuasa secara resmi dikembalikan ke kaisar (1867–1868). Dia kemudian memegang berbagai posisi penting dalam



Gambar 4.1. Matsukata Masayoshi
Sumber: Encyclopedia Britannica,
2020r

pemerintahan baru dan pada tahun 1881 menjadi menteri keuangan. Karena itu, ia menjadi pendukung utama dan pelaksana reformasi keuangan (Encyclopedia Britannica, 2020r).

Pemerintah telah mengatasi kesulitan keuangan yang parah dalam memodernisasi Jepang dengan mencetak uang kertas. Pada tahun 1880-an, mata uang terdepresiasi dengan buruk dan pendapatan menurun nilainya karena pajak tetap atas tanah. Di bawah rezim Matsukata pengeluaran pemerintah dipotong, pabrik yang baru dibangun dan dijual kepada pembeli swasta, uang kertas ditebus, dan

Bank of Japan didirikan dengan hak untuk menerbitkan uang kertas yang dapat dikonversi. Pada pertengahan dekade, mata uang menjadi stabil dan keuangan pemerintah pulih (Encyclopedia Britannica, 2020r).

Pada tahun 1891, dan sekali lagi pada tahun 1896, Matsukata diangkat sebagai perdana menteri, tetapi setiap kali ia pensiun tak lama setelah pengangkatannya karena pertentangan luas yang disebabkan oleh tindakannya yang keras dengan *Diet* (parlemen). Ia menjadi menteri keuangan lagi pada tahun 1897 ketika Jepang mengadopsi standar emas. Setelah 1902, ia adalah salah satu negarawan (*genro*) yang lebih tua yang menasihati pemerintah dalam pembuatan kebijakan dalam dan luar negeri (Encyclopedia Britannica, 2020r).

Matsukata Masayoshi terkenal sebagai orang yang mengusahakan transformasi di Jepang di tengah ekspansi asing yang makin gencar masuk ke negara tersebut. Transformasi ini dalam bentuk modernisasi melalui pembangunan industri dengan slogan *Fukoku Kyohe* yaitu “Bangsa Kaya dan Tentara Kuat”. Pada tahun 1870-an, proses indus-

trialisasi ini menghadapi tantangan berupa krisis ekonomi. Masayoshi berusaha untuk menyelesaikan krisis ini. Keberhasilannya mengatasi krisis ekonomi membuatnya lebih dikenal di sektor perekonomian daripada di bidang perpolitikan sekalipun dia berhasil menjabat sebanyak dua kali.

Matsukata Masayoshi lahir pada tahun 1835 di Kagoshima, Satsuma. Dia berasal dari klan *samurai* tingkat rendah. Seperti anak *samurai* lainnya, dia mempelajari seni bela diri, kaligrafi, dan Konfusianisme. Meskipun berasal dari keluarga miskin, ia tetap mengenyam pendidikan formal di usia muda. Setelah itu, pada tahun 1850 ia menjabat sebagai juru tulis untuk kepala Domain Shimazu. Saat bekerja di perbendaharaan Domain Shimazu, dia bertemu dengan beberapa pejabat yang kemudian menjadi terkenal di bawah Meiji. Dia bertemu Okubo Toshimichi yang kemudian merekrutnya untuk tujuan Kaisar. Sementara itu, selama bekerja, ia memperoleh ilmu bisnis, keuangan, dan perdagangan, yang menjadi tumpuannya untuk pekerjaan selanjutnya (Searching in History, 2019).

Selama Perang Boshin, Matsukata berpihak pada Kaisar. Ketika Tokugawa jatuh, Kaisar Meiji dipulihkan, pada tahun 1868 pejabat tinggi Jepang yang baru menghadiahkan Matsukata dengan posisi Gubernur Hita di Kyushu Utara. Dia membangun wilayah ini dengan pengetahuan yang dimilikinya khususnya tentang ekonomi dan dengan pengetahuan ekonomi yang dimilikinya ia berusaha mengefisienkan penggunaan keuangan. Provinsi yang dipimpinnya pulih dari kekacauan pada tahun-tahun berikutnya di bawah pengawasan Matsukata. Pada tahun 1870, Tokyo memindahkan Matsukata kembali ke ibu kota. Ia kemudian mulai bekerja di instansi terkait program ekonomi. Dia bekerja di biro pajak dan berencana dengan Menteri Keuangan Okuma Shigenobu dalam melembagakan sistem pajak tanah yang baru (Searching in History, 2019).

Matsukata dan Shigenobu memberlakukan sistem pajak tanah baru untuk sektor pertanian dan petani. Selama Era Tokugawa, pajak tanah didasarkan pada tanaman yang dipanen. Matsukata dan Shigenobu memiliki program yang mana pemerintah harus memiliki aliran pendapatan yang stabil untuk mendanai pemulihan, industrialisasi, dan modernisasi negara. Kemudian, mereka mereformasi pajak tanah dan membuat jumlahnya berdasarkan persentase dari nilai tanah yang dinilai dari suatu wilayah. Program ini mendorong survei tanah negara yang berakhir sebelum pergantian ke tahun 1880-an. Pada tahun 1878, Matsukata menjalankan misi ke luar negeri yang membawa pengaruh besar dalam hidupnya. Pada tahun 1878, Matsukata bersama pejabat Jepang lainnya pergi ke Paris untuk merencanakan partisipasi Jepang dalam Paris World's Fair. Saat tinggal di Paris, dia memiliki kesempatan untuk melakukan percakapan yang bermakna dengan menteri keuangan Prancis, Leon Say. Say membuat nama untuk kebijakan kapitalisnya. Keduanya melakukan percakapan yang memiliki pengaruh luar biasa dalam karier Matsukata (Searching in History, 2019).

Pada tahun 1880, Matsukata kembali ke Jepang yang menghadapi kesulitan ekonomi. Jepang selama satu dekade telah mengalami proses modernisasi, industrialisasi, dan westernisasi. Ia menyadari, salah satu cara agar Jepang dapat bertahan di era imperialisasi Barat, Jepang harus memperkuat kekuatan militernya. Oleh karena itu, Jepang harus memiliki fondasi ekonomi yang kuat yang dibangun dengan slogan *Fukoku Kyohei* atau "Bangsa Kaya, Tentara Kuat." Pemerintah kemudian menghabiskan banyak uang untuk membangun industri Jepang. Meskipun demikian, banyak industri menjadi macet oleh sistem birokrasi yang rumit. Selain itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah besar anggaran untuk membayar pensiun mantan daimyo dan *samurai* selama proses perubahan struktur sosial negara. Sebagian besar anggaran pemerintah digunakan untuk membayar pensiun ini

yang kemudian memberikan dampak berupa terjadinya defisit sehingga banyak proyek yang terhenti di tengah jalan. Kondisi ini diperparah ketika sistem keuangan Jepang sedang kacau. Pemerintah mengizinkan bank untuk menerbitkan mata uang kertas. Kondisi ini menjadi tidak terkendali dan jumlah uang kertas yang beredar meningkat pesat sehingga mendorong tingkat inflasi yang melonjak. Dengan kehilangan nilai uang kertas, orang luar tidak mempercayai nilai yen. Ketika Matsukata kembali ke Jepang, dia melihat Jepang dengan pemerintahan yang hampir bangkrut dengan inflasi melonjak dan merugikan rakyat Jepang serta mengancam tujuan eksistensi negara Jepang dalam gambaran yang lebih besar (Searching in History, 2019).

Departemen keuangan mengalami perombakan pada tahun 1880. Matsukata berselisih dengan Menteri Keuangan Okuma Shigenobu, sementara Shigenobu memiliki masalah politik dengan Ito Hirobumi dan Okubo Toshimichi. Matsukata dan Okuma memiliki sudut pandang yang berbeda dalam cara menyelesaikan krisis ekonomi. Matsukata, dipengaruhi oleh cita-cita monetaris dan kapitalis baik secara sadar maupun tidak dengan mengemukakan jalan penghematan. Okuma, di sisi lain, mengusulkan agar Jepang mendapatkan pinjaman luar negeri. Program Okuma memiliki implikasi politik yang signifikan. Banyak pihak di pemerintahan Meiji memandang proposal tersebut sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Mereka percaya bahwa pinjaman luar negeri sama artinya dengan membiarkan pengaruh dari intervensi asing. Mereka melihat apa yang terjadi pada China ketika mereka meminjam dari negara luar dan sebagai akibatnya menjadi korban. Ito dan pejabat lainnya memandang negatif usulan Okuma sebagai kontradiksi mengingat tujuan akhir mereka untuk mempertahankan kemerdekaan nasional. Ito dan Okubo berpihak pada Matsukata. Mereka mencopot Okuma sebagai menteri keuangan dan menggantinya dengan Matsukata (Searching in History, 2019).

Pada tahun 1881, Matsukata sebagai menteri keuangan yang baru memulai kebijakan menurunkan deflasi sehingga tercapai ekonomi yang stabil. Kebijakannya menerapkan prinsip efisiensi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah. Dia membatasi campur tangan pemerintah dalam sistem perekonomian. Dia menjual banyak perusahaan ke pihak swasta yang awalnya milik negara. Perusahaan-perusahaan tersebut dijual sesuai harga pasar atau di bawah harga pasar. Matsukata menaikkan pajak dosa (*sin taxes*), khususnya tembakau dan sake untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Dia kemudian mengontrol jumlah uang kertas yang beredar dengan membatasi jumlah bank yang menerbitkan uang kertas dalam jumlah sedikit dan di bawah kendali Bank of Japan pada tahun 1882. Bank of Japan berfungsi sebagai bank sentral Jepang dan mengatur serta memantau sistem perbankan negara. Pengurangan jumlah uang yang beredar dalam sistem perekonomian berdampak pada inflasi turun dan menstabilkan deflasi. Deflasi dapat membawa perlambatan ekonomi karena harga barang akan turun sementara nilai mata uang tetap. Meskipun kondisi deflasi akan memberi keuntungan pada masyarakat karena mereka dapat memiliki barang-barang dalam jumlah yang lebih banyak karena harganya yang terus menurun. Pada tahun 1886, pemerintah mencapai anggaran yang seimbang dan dapat menstabilkan sistem perekonomian (Searching in History, 2019).

Namun, kebijakan deflasi Matsukata menimbulkan masalah sosial, terutama bagi kaum tani. Pajak tanah didasarkan pada nilai suatu tanah selama survei pada tahun 70-an ketika periode inflasi tinggi. Pada tahun 80-an harga turun, termasuk nilai tanah dan barang. Akibatnya, harga produk pertanian yang rendah berarti pendapatan petani yang lebih rendah, sedangkan nilai tanah yang rendah berarti tanah yang mereka garap kurang dihargai. Petani berpenghasilan lebih sedikit, dan tanah mereka dihargai lebih rendah, tetapi pajak mereka

tetap tinggi. Akibatnya, banyak petani yang hidup dalam kemiskinan. Banyak yang memilih berhenti bertani. Banyak yang tenggelam dalam hutang. Karena pengaruh sosial ini, kebijakan Matsukata menuai kontroversi dan kritikan (Searching in History, 2019).

Meskipun demikian, kondisi ini tidak memengaruhi Matsukata, ia tetap menjalankan kebijakan yang telah dibuatnya. Ia percaya bahwa pengorbanan kecil dibutuhkan untuk dapat menstabilkan perekonomian negara. Ia tahu bahwa keputusan yang diambilkan dapat menyulitkan masyarakat khususnya petani. Nasib para petani merupakan pengorbanan bagi penguatan modernisasi Jepang. Kaum Marxis melihat tindakan Matsukata untuk menjual perusahaan pemerintah kepada individu swasta berarti mempromosikan kapitalisme. Namun, pandangan ini tetap diperdebatkan karena tidak ada bukti bahwa Matsukata melakukannya sebagai bagian dari rencana menuju kapitalisme. Matsuka yakin bahwa kebijakannya akan membuat Jepang lebih kuat dari sebelumnya (Searching in History, 2019).

Pada dekade berikutnya, ledakan ekonomi terjadi. Di bawah pemerintahan Matsukata, Jepang mengobarkan perang melawan China di awal tahun 1890-an. Pertumbuhan dan perkembangan industri berkembang pesat. Industri yang pernah menjadi milik pemerintah mulai bekerja secara efisien karena pengelolaannya terlepas dari politik dan ikatan birokrasi. Keadaan ini memperkuat posisi konglomerat, yang dikenal sebagai *Zaibatsu* dalam sistem perekonomian. Modernisasi dan industrialisasi berlanjut dalam situasi keuangan yang jauh lebih kuat (Searching in History, 2019).

Namun, seiring kemajuan Jepang, kondisi yang sebaliknya terjadi dalam karier politik Matsukata. Pada tahun 1890-an ia menjadi Perdana Menteri dua kali, pertama pada tahun 1892 hingga 1896 dan 1896 hingga 1898. Masa jabatan perdana menteri dirusak oleh gaya kepemimpinan otoriternya. Dia mencoba menggunakan efisiensi

ekonomi dan absolutisme ke arena politik yang berdampak pada karir politiknya. Matsukata tidak menyukai politik karena menghambat implementasi kebijakan ekonomi dengan hak veto dan konsesi yang mengarah pada melemahnya suatu kebijakan. Dia percaya bahwa ekonomi harus mendikte politik negara dan bukan sebaliknya. Jadi, ketika dia menjadi perdana Menteri, dia menginginkan politik yang sesuai dengan keinginannya. Dia menjadi terkenal karena cara-cara otoriternya, termasuk membubarkan *Diet* atau Parlemen Jepang. Anggota partai yang melawannya akan ditangkap. Namanya terus menjadi terkenal ketika dia mulai menggunakan suap dan intimidasi untuk membelokkan pejabat dan publik sesuai keinginannya. Oleh karena itu, dua masa jabatannya sebagai perdana menteri berumur pendek (Searching in History, 2019).

Pada tahun 1901, ia pensiun dari kabinet pemerintahan. Meskipun demikian, ia terus bertugas di Dewan Penasihat seremonial. Ia memberikan nasihat kepada pemerintah tentang masalah keuangan. Dia memiliki posisi di dewan sampai tahun 1922, ketika dia akhirnya pensiun seiring dengan bertambahnya usia. Dua tahun kemudian, pada 2 Juli 1924, Matsukata Masayoshi meninggal dunia (Searching in History, 2019). Matsuka lebih terkenal dengan upaya-upayanya dalam mengatasi krisis ekonomi di Jepang. Ia berhasil membangun Jepang dari negara agraris yang terbelakang menjadi negara industri yang tidak bertumpu pada pinjaman dari luar melainkan bertumpu pada pajak dalam negeri. Ia memiliki kekuatan dalam menerapkan kebijakan yang berpihak pada perbaikan perekonomian negara. Ia sukses dalam mentransformasi Jepang menjadi sebuah negara yang disegani di level internasional.

BAB 5

SHIGENOBU ŌKUMA

1898, 1914-1916

Pemilihan Anggota Parlemen

Shigenobu Ōkuma memiliki nama lengkap *Kōshaku (Marquess)* Ōkuma Shigenobu. Ia lahir pada 11 Maret 1838 di Saga, Jepang dan meninggal pada 10 Januari 1922 di Tokyo. Ia seorang politisi yang dua kali menjabat sebagai perdana menteri Jepang yaitu pada tahun 1898 dan tahun 1914 sampai 1916. Dia mengorganisir Rikken Kaishintō (Partai Progresif) dan mendirikan Universitas Waseda (Encyclopedia Britannica, 2020v).

Setelah menerima pendidikan konvensional, Ōkuma beralih ke studi Barat dan mengambil langkah belajar bahasa Inggris dengan se-



Gambar 5.1. Shigenobu Ōkuma
Sumber: Encyclopedia Britannica, 2020v

rius. Setelah Restorasi Meiji pada tahun 1868, ia menegakkan kembali otoritas resmi kaisar. Kemudian, para pemimpin pemerintahan Meiji memperluas basis dukungan mereka dengan menambahkan perwakilan dari domain Saga Ōkuma. Kemampuan dan keberaniannya segera memberinya peran penting dalam pemerintahan. Pada awalnya ia mengkhususkan diri di bidang keuangan, dari tahun 1869 hingga 1881 ia bertanggung jawab atas modernisasi dan reorganisasi sistem fiskal Jepang.

Ketika anggota pemerintah diminta untuk mengusulkan ketentuan konstitusi Jepang yang baru, Ōkuma mengejutkan rekan-rekannya dengan membuat saran radikal bahwa pemilihan akan diadakan tahun depan, sebuah parlemen dibentuk, dan sistem kabinet Inggris yang bertanggung jawab kepada parlemen yang dibentuk. Kemudian, dia mengungkap korupsi dalam usulan

penjualan properti pemerintah di Hokkaido, pulau yang terletak paling utara dari empat pulau utama Jepang (Encyclopedia Britannica, 2020v).

Pendapat dan tindakan Ōkuma memaksanya keluar dari pemerintahan, tetapi gerakan untuk konstitusi mendapatkan dorongan yang besar. Menanggapi tekanan rakyat, kaisar berjanji bahwa konstitusi akan disiapkan pada tahun 1890. Dokumen tersebut diselesaikan dan diundangkan setahun sebelumnya, pada tanggal 1 Februari 1889. Ōkuma membentuk sebuah partai politik yang bernama Kaishintō yang berorientasi pada konsep parlemen Inggris. Setelah



Gambar 5.2. Shigenobu Ōkuma
Sumber: Encyclopedia Britannica, 2020v

bergabung kembali dengan pemerintah pada tahun 1888, Ōkuma dua kali menjabat sebagai menteri luar negeri. Pada tahun 1898, ia dan Itagaki Taisuke, pendiri partai politik pertama Jepang, Jiyūtō (Partai Liberal), bergabung dan membentuk Kenseitō (Partai Konstitusional). Mereka membentuk pemerintahan pada tahun 1898 dengan Ōkuma sebagai perdana menteri, tetapi gagal beberapa bulan kemudian karena sengketa patronase (Encyclopedia Britannica, 2020v).

Sebelumnya, pada tahun 1882, Ōkuma telah mendirikan sebuah universitas di Tokyo yang kemudian dikenal sebagai Universitas Waseda, salah satu dari dua universitas swasta terkemuka di Jepang. Dia pensiun dari politik pada tahun 1907 untuk mengabdikan seluruh waktunya di Waseda, hanya untuk dipanggil kembali sebagai perdana menteri pada tahun 1914. Selama masa itu Jepang mengalami ledakan ekonomi yang hebat, sebagian sebagai akibat dari peningkatan perdagangan yang dibawa oleh Perang Dunia I. Selain itu, Jepang meningkatkan tekanannya pada Cina (termasuk mengeluarkan apa yang disebut Dua Puluh Satu Tuntutan), yang menyebabkan memburuknya hubungan antar negara. Pada tahun 1916, kondisi kesehatan dalam kondisi yang buruk, ia kemudian mengundurkan diri dan pensiun dari politik (Encyclopedia Britannica, 2020v).

Kebijakan Luar Negeri

Shigenobu kembali ke pemerintahan pada tahun 1888 dan menjabat sebagai menteri luar negeri sebanyak dua kali. Pada tahun 1898, Shigenobu dan Itagaki Taisuke yang merupakan *founder* dari partai politik pertama di Jepang bergabung dan membentuk partai baru yakni Kenseito sebagai hasil merger dari partai Shimpoto dan Jiyuto milik Taisuke, dan kemudian menjadi perdana menteri ke-8 Jepang dan dipilih oleh kaisar untuk membentuk kabinet bipartisan pertama dalam sejarah Jepang. Kabinet ini hanya bertahan selama beberapa

bulan dan runtuh diakibatkan oleh masalah sengketa internal, namun ia tetap menjabat sebagai ketua partai hingga tahun 1908 sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar dari dunia politik. Setelah break dari dunia politik Shigenobu menjadi *founder* sekaligus presiden dari Waseda University. Dia menerjemahkan teks-teks berbahasa Inggris ke bahasa Jepang dan ikut andil dalam mengumpulkan dukungan terhadap ekspedisi pertama Jepang ke Antartika. Shigenobu kembali ke politik pada tahun 1914 sebagai perdana menteri setelah perdana menteri sebelumnya yakni Yamamoto Gonnohyoe dipaksa mundur karena terlibat skandal dengan Jerman. Shigenobu memperoleh dukungan dari Rikken Doshikai dan Chuseikai Organization dan bersama-sama membentuk kabinet mereka (New World Encyclopedia, 2019).

Setahun berselang, Jepang mendeklarasikan perang melawan Jerman dan bergabung dengan pasukan aliansi di perang dunia pertama. Pada masa perang dunia pertama ini Jepang mengalami lonjakan ekonomi sebagai hasil dari meningkatnya perdagangan pada masa perang dunia I. Pada masa pemerintahan Okuma Shigenobu pulalah Jepang menguatkan tekanannya terhadap China dengan mengeluarkan serangkaian tuntutan yang dikenal dengan 21 Demands, dengan tujuan memperluas kekuasaan Jepang atas Ekonomi Tiongkok. 21 Demands ini dikeluarkan oleh Okuma Shigenobu untuk memberikan Privilage kepada Jepang di Cina pada masa perang dunia I, yang disusul ultimatum yang mana Presiden China pada saat itu yakni Yuan Shikai harus menandatangani Sino-Japanese Agreement yang berisi: Klaim tambang di Provinsi Shandong oleh Jepang; pemberian izin khusus di Manchuria; Kontrol Sino-Japanese terhadap pertambangan Han Ye Ping; akses ke pantai, pelabuhan, dan pulau-pulau di sepanjang teluk China; dan Jepang ikut campur dalam urusan dalam negeri China. Poin terakhir adalah alasan memburuknya hubungan antar negara dan munculnya gerakan anti Jepang di China hingga memboikot produk

Jepang. Periode kedua pemerintahan Okuma Shigenobu ini juga tidak berlangsung lama yakni hanya di periode 1914-1916, yang mana karena alasan kesehatan Shigenobu akhirnya mundur dari panggung politik Jepang. Okuma Shigenobu wafat di Tokyo pada tahun 1922 diusia 83 tahun (New World Encyclopedia, 2019).

BAB 6

KATSURA TARO

1901-1906, 1908-1911, 1912- 1913

Kebijakan Periode Pertama 1901-1906

Katsura taro, lahir pada 4 Januari 1848 di Hagi, Provinsi Nagato, Jepang dan meninggal pada 10 Oktober 1913 dengan umur 65 tahun. Ia merupakan jenderal besar tentara kekaisaran Jepang yang menjabat sebagai perdana menteri ke-11, 13, dan 15 Jepang dalam periode 1901-1913. Hal tersebut menjadikannya sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terlama kedua di bawah Shinzo Abe. Sepanjang menjabat menjadi perdana menteri, Katsura Taro menganut prinsip konservatif dan sangat menjauhi korelasi dengan partai politik. Taro menilai bahwa perdana menteri sepenuhnya



Gambar 6.1. Katsura Taro
Sumber: Encyclopedia Britannica, 2020q

bertanggung jawab pada kaisar semata, bukan kepada partai politik. Namun, menjelang akhir kepemimpinannya sebagai perdana menteri, Katsura Taro mendirikan partai *Rikken Doshikai* (*Constitutional Association of Allies*) sebagai upaya untuk mempertahankan posisinya sebagai perdana menteri. Namun pada akhirnya, Taro gagal mempertahankan posisinya akibat mosi tidak percaya yang sukses dijatuhkan padanya. Menjadikan mosi tidak percaya tersebut yang pertama sukses dalam sejarah Jepang menjatuhkan perdana menteri yang berkuasa (Encyclopedia Britannica, 2020q; Lone, 1989).

Katsura berjuang untuk tujuan kekaisaran dalam Restorasi Meiji, yang pada tahun 1868 merebut kekuasaan dari keluarga Tokugawa feodal dan mengembalikannya ke kaisar. Dia kemudian dikirim ke Jerman untuk mempelajari strategi dan taktik militer. Dia diangkat sebagai wakil menteri militer pada tahun 1886 dan bertugas dalam perang Tiongkok-Jepang pada tahun 1894 sampai 1895. Sebagai anak didik Yamagata Aritomo, pemimpin militer, perdana menteri, dan penasihat khusus kaisar, dia menjadi menteri militer pada tahun 1898 dan perdana menteri pada tahun 1901 untuk periode pertama dari tiga periode berturut-turut. Selama masa jabatan perdana menteri pertamanya pada 1901 sampai 1906 aliansi dengan Inggris Raya disepakati pada tahun 1902 dan Perang Rusia-Jepang pada 1904 sampai 1905 berhasil dilancarkan, menjadikan Jepang kekuatan dunia. Katsura menjadi antagonis dari Itō Hirobumi (pendiri partai politik *Rikken Seiyūkai*) dalam kebijakan terhadap Korea, yang saat itu merupakan protektorat Jepang (Encyclopedia Britannica, 2020q).

Kebijakan Periode Kedua 1908-1911

Sementara Itō berusaha untuk mengatur pemerintahan Jepang yang moderat di Korea, Katsura menyukai aneksasi langsung, sebuah tujuan yang dia capai pada tahun 1910, selama masa jabatan keduanya sebagai perdana menteri pada 1908 sampai tahun 1911. Dia berada di Eropa pada musim panas 1911 ketika dia menerima kabar tentang penyakit Kaisar Meiji. Dia bergegas pulang dan setelah kematian Kaisar Meiji pada tahun 1912 memasuki layanan kaisar baru, Taishō. Katsura dinobatkan sebagai penjaga penguasa segel rahasia dan pengurus rumah tangga agung dan diangkat ke pangkat pangeran (Encyclopedia Britannica, 2020q).



Gambar 6.2. Kaisar Meiji
Sumber: Encyclopedia Britannica, 2020s

Kebijakan Periode Ketiga 1912-1913

Meskipun ia sebelumnya menentang gagasan partai politik, selama masa jabatan ketiganya pada Desember 1912 hingga Februari 1913, ia mencoba untuk melawan kendali *Seiyūkai* atas *Diet* (parlemen) dengan membentuk partainya sendiri. Rikken Dōshikai miliknya pada awalnya tidak berhasil tetapi akhirnya menjadi salah satu dari dua kelompok politik utama di Jepang sebelum Perang Dunia II. Periode perdana menteri ketiga Katsura hanya berlangsung tujuh minggu pada Desember 1912 sampai Februari 1913 dan berakhir di tengah kerusuhan melawan metode oligarki dan programnya untuk persenjataan yang lebih besar. Dia meninggal beberapa bulan kemudian (Encyclopedia Britannica, 2020q).

Hidup Katsura adalah sebagai cermin hubungan antara pemerintahan, militer, kekaisaran, dan masyarakat. Ia berhasil mening-

katkan kesejahteraan masyarakat melalui program perdagangan luar negerinya. Ia juga bertanggung jawab dalam membawa Jepang untuk menang dalam melawan Rusia dan bertanggung jawab dalam melakukan aneksasi ke Korea. Selain itu, hubungannya dengan kekaisaran di era Meiji sangat baik (Lone, 1989).

BAB 7

SAIONJI KINMOCHI

1906-1908, 1911-1912

Kebijakan Dalam Negeri

Saionji Kimmochi atau dikenal dengan *Kōshaku* (Pangeran) Saionji Kimmochi, Kimmochi juga dieja Kinmochi. Ia lahir pada 7 Desember 1849 di Kyōto, Jepang dan meninggal pada 24 November 1940 di Okitsu. Ia anggota oligarki terlama yang memerintah Jepang setelah Restorasi Meiji pada tahun 1868. Ia mengakhiri periode Edo (Tokugawa) dan secara resmi menegakkan kembali otoritas kaisar. Sebagai perdana menteri dan negarawan yang lebih tua (*genro*), ia berusaha untuk memoderasi peningkatan militerisme negaranya di awal abad ke-20. Saionji lahir dari bangsawan istana

tua. Setelah belajar di Prancis, ia kembali ke Jepang pada tahun 1881 dan mendirikan Tōyō jiyū shimbun (Pers Bebas Oriental), sebuah surat kabar yang didedikasikan untuk mempopulerkan ide-ide demokrasi. Tetapi jurnalisme dianggap sebagai profesi yang memalukan

bagi bangsawan pengadilan. Oleh karena itu, rekan-rekannya membujuk kaisar untuk memaksa Saionji meninggalkan surat kabar dan bergabung dengan dinas pemerintah, di mana ia segera naik ke posisi tinggi (Encyclopedia Britannica, 2020w).

Masa pemerintahan Saionji dalam sejarahnya pernah dua kali menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang dari tahun 1906 hingga 1908 dan pada tahun 1911 hingga 1912. Ia tergabung dalam partai politik Rikken Seiyūkai di mana Saionji merupakan salah satu dari anggota pertama. Berdasarkan dari pengalamannya selama

di Eropa, Saionji memiliki perspektif liberal dalam berpolitik dan pandangannya didukung oleh pemerintahan parlementer. Saionji merupakan salah satu dari beberapa politikus pemula yang berpendapat bahwa mayoritas partai harus berpartisipasi dalam pembentukan sebuah kabinet (Ovsyannikov, 2007: 280).

Pangeran Saionji Kinmochi menjadi salah satu anggota kabinet Menteri Edukasi pada tahun 1894. Motivasi pertamanya adalah untuk mengimplementasikan perubahan berdasarkan dari penilaian Barat ke dalam sistem edukasi Jepang dengan tujuan untuk membuat sistem ini lebih modern dan progresif. Saionji juga dikenal akan sifat lainnya yang berkontradiktif dengan kepentingan politiknya. Pada umumnya dia dikenal sebagai aktor yang paling loyal terhadap raja, belum lagi dia telah mengorbankan kehidupannya untuk prinsip ini dalam restorasi



Gambar 7.1. Saionji Kinmochi
Sumber: Encyclopedia Britannica, 2020w

perang pada tahun 1868. Di sisi lain, Saionji juga dikenal memercayai liberalisme, dia bahkan mengakui bahwa dia merasa simpati terhadap kaum sayap kiri. Saionji berpendapat bahwa:

“Jika kita tidak bertindak untuk mengontrol akan kecenderungan kaum sayap kanan yang hadir di masyarakat, maka hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan yang dapat menimbulkan dampak buruk pada masyarakat, maka dari itu kita harus mencoba untuk mencari jalan yang lebih baik”.

Hal ini dia tegaskan pada masa jabatannya sebagai menteri pada tahun 1906 yang mana formasi dari kaum partai sosialis Jepang pertama telah diizinkan (Ovsyannikov, 2007: 278).

Walaupun Saionji dengan tegas percaya bahwa keluarga pemerintahan harus menjadi titik tengah dari seluruh sistem politik. Dia juga berpendapat bahwa pandangan liberal juga dibutuhkan dalam istana dan membuat raja dapat lebih mudah ditemui baik itu kepada menteri, birokrasi, dan juga rakyat. Saionji pernah mengingat percakapannya dengan Hirata Tousuke, yaitu rekan dekat dari Yamagata Aritomo di mana ia telah menjabat banyak posisi dalam pemerintahan dan dikenal akan sifat konservatismenya. Hirata Tousuke pernah berpendapat bahwa “kehidupan di istana harusnya tertutup dengan awan.” Saionji keberatan dan berkata:

“Kita seharusnya tidak melakukannya. Awan tersebut akan memberikan kegelapan, oleh karena itu kita harus mengu-sirnya dan membiarkan cahaya menyinari” (Ovsyannikov, 2007: 279).

Saionji dianggap sebagai sekutu oligarki negara yang dikenal sebagai hanbatsu, dan partai politik yang menentang mereka. Seperti yang telah dijelaskan di atas, Saionji termasuk aktor yang mendukung demokrasi dan pergerakan anti pemerintahan untuk kebebasan dan hak masyarakat. Pada tahun 1880, tepatnya setelah ia kembali dari

Paris, Saionji menjadi ketua dari Touyou Jiyou Shinbum, yang merupakan perusahaan surat kabar yang paling progresif pada masanya di Jepang. Tidak hanya itu, Saionji juga berperan aktif dalam pembentukan Seiyoukai, yaitu partai politik terbesar dan yang paling berpengaruh di Jepang. Tiga tahun kemudian, dia menjadi ketua partai dan tetap mempertahankan posisinya selama sepuluh tahun. Selama itu partai Seiyoukai menjadi partai politik terkemuka dengan politisi partai yang secara umum menentukan kemajuan akan pembangunan pemerintahan yang berpusat kepada parlemen (Ovsyannikov, 2007: 281).

Penjelasan di atas menggambarkan peran *Saionji di Rikken Seiyūkai (Friends of Constitutional Government)* sebagai salah satu penyelenggara sampai menjadi presiden partai tersebut pada tahun 1903. Selama menjabat sebagai presiden, ia berperan dalam membatasi pengeluaran militer dan melakukan kontrol yang ketat terhadap partai dan peran partai tersebut di kabinet. Sekalipun, ia telah berhenti sebagai perdana menteri pada tahun 1912, ia tetap aktif dalam pemerintahan. Salah satu contohnya, ia pernah menjadi pemimpin delegasi Jepang di Konferensi Perdamaian Paris pada tahun 1919. Konferensi ini kemudian mengakhiri Perang Dunia I (Encyclopedia Britannica, 2020w).

BAB 8

YAMAMOTO GONNOHYOE

1913-1914, 1923-1924

Kebijakan Periode Pertama 1913-1914

Yamamoto Gonnohyoe dikenal sebagai seorang politikus dan laksamana angkatan laut Jepang. Ia adalah perdana menteri Jepang yang ke-16 pada Februari 1913 sampai April 1914. Namun sebelumnya sekitar tahun 1878-1889 Yamamoto Gonnohyoe sebagai menteri angkatan laut. Pada saat itu dibentuk angkatan laut dan memanfaatkan kepemimpinan Yamamoto Gonnohyoe untuk membentuk komite reformasi angkatan laut. Selain itu kepemimpinannya pada saat itu juga digunakan untuk reformasi administrasi, organisasi, dan personalia. Yamamoto Gonnohyoe juga dikenal sebagai pria yang



Gambar 8.1. Yamamoto Gonnohyoe
Sumber: Encyclopedia Britannica,
2020b

penuh dengan kharismatik dan perawakannya yang baik. Sekitar tahun 1890an, menandakan fase tersebut penting untuk pertumbuhan angkatan laut tersebut (Nishiyama, 2008: 148).

Pada masa menjabat untuk periode pertama, ia di dukung oleh partai *Friends of Constitutional Government (Rikken Seiyukai)*. Sebelumnya, yang menjadi kandidat bukanlah Yamamoto melainkan Hara Takashi namun adanya oligarki yang masih mengontrol, pemerintah menolak untuk mengizinkan Hara menjadi perdana menteri, sehingga Yamamoto terpilih sebagai

kandidat. Dibawah pemerintahan Yamamoto, undang-undang untuk meningkatkan pengaruh partai politik disahkan dan reformasi sistem pengangkatan pegawai Jepang dilaksanakan (Dickinson, 2016: 3).

Yamamoto Gonnohyoe politikus yang ahli dalam masalah militer, ia pernah ikut serta dalam perang Anglo-Satsuma dan kemudian bergabung dengan pasukan Senapan kedelapan Satsuma dalam perang Boshin yang mengakhiri Keshogunan Tokugawa. Yamamoto terbukti bukan hanya lihai secara politik, disisi lain ia juga memahami pentingnya opini massa dan pentingnya peran pers dalam dunia politik. Yamamoto Gonnohyoe juga terlibat dalam konflik yang terjadi antara Jepang dan Rusia. Kemenangan di Tsushima secara efektif menutup perang tersebut satu dekade kemudian dimana pada saat itu merupakan aliansi sekutu Seiyu kai. Yamamoto kala itu dikenal dengan perwira muda yang menggantikan laksamana Satsuma dengan menunjukkan keberaniannya yang sangat menakjubkan dengan menjalin aliansi yang berlangsung jauh melampaui tahun 1890an (Barnhart, 2007: 200).

Yamamoto Gonnohyoe menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 1913 sampai dengan 1914, namun pada saat itu ia dipaksa untuk

pensiun setelah menjadi perwira angkatan laut Jepang setelah diketahui ia telah menerima suap untuk memastikan bahwa perusahaan Jerman yang bernama Siemens dan perusahaan Inggris Vickers menerima kontrak tentang persenjataan angkatan laut, meskipun ia belum terbukti terlibat secara langsung namun dia tetap dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri pada saat itu. Kemudian di bawah pemerintahan Okuma, Yamamoto dipindahkan ke cadangan angkatan laut (Encyclopedia Britannica, 2020b).

Kebijakan Periode Pertama September 1923-1924

Pada September 1923, Yamamoto dipanggil kembali untuk menjadi perdana menteri yang ke 22. Pemanggilan tersebut untuk menggantikan perdana menteri yang sebelumnya meninggal secara mendadak yaitu perdana menteri Kato Tomosaburo setelah gempa bumi Great Kanto di Tokyo yang menewaskan lebih dari 100.000 orang. Setelah anarki dan kerusakan yang terjadi secara meluas akibat gempa tersebut, Yamamoto berusaha memulihkan hukum dan ketertiban serta melanjutkan kembali layanan pemerintah Jepang. Namun, empat bulan kemudian, ia mengundurkan diri ketika kabinetnya mengambil tanggung jawab untuk upaya pembunuhan Kaisar Hirohito (Encyclopedia Britannica, 2020b).

Yamamoto Gonnohyoe pada masa jabatan yang kedua kalinya ini sebagai reorganisasi politik khususnya di Jepang itu sendiri. Ia dipilih oleh seorang Saionji di mana ia mengharapkan agar Yamamoto mampu untuk menegakkan pemilihan umum dan bisa mengembalikan kekuasaan partai. Selain itu, Yamamoto Gonnohyoe mencoba untuk membentuk pemerintah persatuan nasional yang memilih menteri dari semua sektor-sektor utama. Namun, hal tersebut gagal sehingga memberikan kekecewaan terhadap *Seuyukai*, di mana sebelumnya Ya-

mamoto dalam jabatannya ia sangat didukung oleh Asosiasi Partai Politik yaitu *Rikken Seiyukai*. Di saat yang bersamaan, kabinet non-partai mengguncang *Kenseikai* sehingga kerja sama kedua pihak antara *Seiyukai* dengan *Kenseikai* secara pribadi di mulai pada kabinet tersebut. Pada akhirnya, kabinet Yamamoto Gonnohyoe jatuh karena diakibatkan bukan hanya kasus penembakan terhadap kaisar tetapi hilangnya dukungan dan kepercayaan dari kekuatan partai tersebut (Ryouta, 2020: 30).

BAB 9

HARA TAKASHI

1918-1921

Kebijakan Pengurangan Kekuatan Militer di Luar Negeri

Hara Takashi, juga dipanggil Hara Kei lahir 15 Maret 1856 di Morioka, Jepang dan meninggal 4 November 1921 di Tokyo. Ia adalah politikus yang menjadi perdana menteri Jepang dari 1918 hingga 1921 dan yang mendirikan partai politik sebagai institusi fundamental politik di Jepang. Hara adalah putra dari keluarga *samurai* berpangkat tinggi di utara Jepang. Setelah lulus dari Universitas Tokyo ia menjadi seorang jurnalis. Pada tahun 1882 ia memasuki dinas luar negeri, di mana ia meningkat pesat dengan dukung-



Gambar 9.1. Hara Takashi
Sumber: Encyclopedia Britannica, 2020e

an dari Itō Hirobumi dan tokoh-tokoh penting lainnya dalam pemerintahan. Pada tahun 1900, Hara berpartisipasi dengan Itō dalam pendirian *Rikken Seiyūkai* (*Friends of Constitutional Government*). Hara menjadi sekretaris jenderal *Seiyūkai* tahun itu dan menjadi pemimpin utama partai sejak saat itu, menjabat sebagai presidennya setelah 1914. Terpilih dalam *Diet* (parlemen) pada tahun 1900 dan terpilih kembali delapan kali setelahnya, ia naik menjadi menteri dalam negeri pada tahun 1906-1908, 1911-1912, dan 1913-1914. Hara membangun *Seiyūkai* menjadi partai bergaya Amerika Serikat yang dukungan populernya berasal dari perlindungan yang diberikannya dan pengembangan ekonomi regional yang ingin dipromosikan. Pada 29 September 1918, Hara memperoleh jabatan perdana menteri, mengantarkan hampir dua dekade di mana *Seiyūkai* dan sekutu bisnisnya di sektor pertanian mendominasi politik sipil (Encyclopedia Britannica, 2020e).

Hara menurunkan kualifikasi properti untuk pemungutan suara, sehingga memperbesar pemilih untuk menyertakan pemilik tanah kecil yang menjadi salah satu kekuatan *Seiyūkai*. Dia menolak untuk menggunakan mayoritas mutlak yang diperintahkan *Seiyūkai* di majelis rendah *Diet* untuk melembagakan hak pilih universal pria di Jepang. Hara juga berusaha untuk mengurangi kekuatan militer, dan dia menentang penggunaan tentara Jepang di Siberia. Pada tahun 1921 dia dibunuh oleh seorang fanatik sayap kanan muda, Konichi Nakaoka di depan Stasiun Tokyo (Encyclopedia Britannica, 2020e).

Dari Meiji hingga Taisho, daerah Mita Shiba adalah milik kedi-aman pribadi Takashi Hara, Masayoshi Matsukata (kepala klan Satsuma dan politisi), dan Taro Katsura (kepala klan dan politisi Choshu),

sehingga wilayah ini tampak seperti kota menteri. Takashi memiliki kehidupan publik aktif yang berbasis di rumahnya di Shibakoen. Markas besar Partai *Rikken Seiyu* yang dibentuk di sekitar Hirofumi Ito (politisi dan perdana menteri pertama Jepang) dan dikembangkan oleh Takashi, juga berada di Shibakoen. Begitu Takashi menjadi perdana menteri, dia membentuk Kabinet *Seiyukai* dengan menghapus dominasi tradisional dan posisi kabinet penting oleh anggota klan yang sama dan menyangkal pengaruh pejabat pemerintah dan *House of Lords*. Takashi adalah anggota pertama Dewan Perwakilan Rakyat tanpa gelar menjadi perdana menteri dan populer di kalangan masyarakat sebagai “Perdana Menteri Biasa”. Namun, dia dibunuh tiga tahun setelah menduduki jabatannya. Istrinya, Asa, yang bergegas ke Stasiun Tokyo, dianggap menolak mengirim jenazahnya ke kediaman resmi perdana menteri dan meminta pejabat untuk memulangkannya, karena dia tidak lagi melakukan pekerjaan di kediaman resmi dan itu keinginannya (Lib City, 2019).

Perdana Menteri “*The Commoner*”

Hara Takashi lahir di Morioka di Northern Jepang pada tanggal 9 Februari 1856. Hara Takashi bergabung dengan kementerian luar negeri Jepang pada bulan November 1882. Ia berkenalan dengan Mutsu Muncmitsu yang ditunjuk sebagai menteri luar negeri di kabinet kedua Ito Hirobumi pada bulan Agustus 1892. Mutsu membantu Hara dan membuat Hara mendapatkan serangkaian jabatan penting dinas luar negeri Jepang. Hara meninggalkan kementerian luar negeri setelah kematian Mutsu pada bulan September tahun 1897 dan menjadi editor senior Osaka Mainichi Shinbun. Dia menjabat sebagai presiden koran harian tahun 1898.

Ketika partai *Reikken Seiyukai* diatur di bulan September tahun 1900, Hara direkrut oleh presiden pertama partai tersebut yaitu Ito dan

Inoue Kaoru. Pada bulan Desember di tahun yang sama, Hara menjadi sekretaris jenderal partai tersebut. Ia terpilih dalam jabatannya yang pertama di dewan perwakilan pada tahun 1902 dan menjadi presiden ketiga partai *Seiyukai* pada bulan Juni tahun 1914. Hara bertugas di serangkaian pos kabinet (Perez, 2013).

Ketika Tarauchi Masatake, seorang anggota dari pemerintahan Meiji Oligarchy membentuk kabinet pada Oktober 1916, Hara tetap netral dan diangkat ke Dewan Riset Urusan Darurat Luar Negeri (*Emergency Foreign Affairs Research Council*). Prihatin dengan reaksi AS, Hara enggan mengirim pasukan ke ekspedisi militer Sekutu ke Siberia menyusul Revolusi Bolshevik pada November 1917. Penunjukannya sebagai perdana menteri pada bulan September 1918 adalah yang pertama untuk anggota majelis rendah terpilih dalam sejarah Jepang. Hara bukan anggota kaum bangsawan sehingga ia dijuluki perdana menteri “*the commoner*” (Perez, 2013: 111).

Hara memainkan peran sentral dalam menggeser kebijakan luar negeri Jepang pasca perang dunia I ke arah kerja sama internasional dan dalam penarikan pasukan Jepang dari Siberia. Di dalam negeri, ia melaksanakan program reformasi substansial, termasuk perluasan pendidikan tinggi dan peningkatan infrastruktur seperti perluasan jalur kereta api dan fasilitas pelabuhan. Meskipun pemerintahnya benar-benar memperluas hak pilihnya, ia menolak hak pilih laki-laki. Pemerintahan Hara juga mengadopsi kebijakan penindasan terhadap kerusuhan internal (Kerusuhan Beras) dan gerakan kemerdekaan Korea. Tuduhan korupsi dan skandal menyebabkan pembunuhan Hara di Stasiun Kereta Api Tokyo pada 4 November 1921. Pembunuhnya, Nakaoka Konichi, menuduh bahwa kabinet Hara lebih mengutamakan kepentingan partisan daripada kepentingan nasional (Perez, 2013:112).

BAB 10

WAKATSUKI REIJIRO

1926-1927, 1931

Kebijakan Periode Pertama 1926-1927

Wakatsuki Reijiro lahir di Shimane sebagai anak seorang *samurai* dari Klan Matsue. Pada tahun 1892, ia lulus dari fakultas hukum Universitas Kekaisaran dan bertugas di kementerian keuangan. Ia menjabat sebagai direktur biro pajak dan wakil menteri keuangan dan menjadi anggota *House of Peers* pada tahun 1911. Selain itu, ia menjabat sebagai menteri keuangan pada kabinet Katsura ketiga dan kabinet Okuma kedua. Pada tahun 1924, ia menjabat sebagai menteri dalam negeri di kabinet Takaaki Kato dan bekerja untuk mengesahkan Undang-Undang Hak Pilih Universal. Pada



Gambar 10.1. Wakatsuki Reijiro
Sumber: Modern Japanese Historical Figures, 2019c

tahun 1926, ia menjadi perdana menteri. Setelah menjabat sebagai ketua delegasi yang berkuasa penuh untuk Konferensi Angkatan Laut London, ia melanjutkan jabatannya sebagai perdana menteri pada tahun 1931. Ia menentang perang melawan Amerika Serikat, dan setelah pecahnya perang, ia berpihak pada sebuah kelompok yang mencari perdamaian (Modern Japanese Historical Figures, 2019).

Wakatsuki mengambil alih sebagai perdana menteri Jepang pada tanggal 30 Januari 1926 setelah kematian tak terduga Kato di kantornya. Masa jabatan pertamanya berlangsung hingga

20 April 1927 ketika ia dipaksa mengundurkan diri selama krisis keuangan *Shōwa*. Wakatsuki dianugerahi *Order of the Paulownia Flowers* pada 10 November 1928. Setelah menjabat sebagai ketua delegasi yang berkuasa penuh untuk London Naval Conference 1930, Wakatsuki mendorong dengan kuat untuk segera meratifikasi perjanjian perlucutan senjata, sehingga menimbulkan kemarahan militer Jepang dan berbagai kelompok ultranasionalis (Encyclopedia Britannica, 2020ad).

Kebijakan Periode Kedua 14 April 1931-13 Desember 1931

Setelah Perdana Menteri Hamaguchi dipaksa mundur dari jabatannya karena luka parah yang terjadi dalam upaya pembunuhan, Wakatsuki mengambil alih kepemimpinan *Rikken Minseitō*, penerus Kenseikai. Dia diangkat ke pangkat baron (*danshaku*) dalam sistem gelar bangsawan *kazoku* pada bulan April 1931. Wakatsuki sekali lagi menjadi perdana menteri dari 14 April 1931 sampai 13 Desember 1931. Selama masa jabatan kedua Wakatsuki, dia gagal untuk mengon-

trol tentara Kekaisaran Jepang. Dia tidak dapat mencegah terjadinya insiden Manchuria atau mengendalikan angkatan darat dari eskalasi permusuhan lebih lanjut di China (Encyclopedia Britannica, 2020ad).

Akhirnya ia memutuskan memundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri. Wakatsuki menjadi presiden *Rikken Minseitō* pada Juli 1934. Meskipun militerisme tumbuh di masyarakat Jepang, ia terus menentang Perang Tiongkok-Jepang Kedua, dan dengan tegas menentang perpanjangan perang yang diusulkan oleh Amerika Serikat dan kekuatan barat lainnya. Bahkan setelah deklarasi permusuhan dalam Perang Dunia II, dia secara terang-terangan menyatakan perang harus diakhiri secepat mungkin. Pada Mei 1945, setelah mendengar jatuhnya Nazi Jerman, dia muncul kembali hanya untuk mendesak Perdana Menteri Kantarō Suzuki agar membuka negosiasi dengan Amerika Serikat secepat mungkin. Pada bulan Agustus 1945, dia berpartisipasi dalam panel pemerintah yang merekomendasikan penerimaan tanpa syarat dari Deklarasi Potsdam (Encyclopedia Britannica, 2020ad).

BAB 11

SAITŌ MAKOTO

1932-1934

Kebijakan Dalam dan Luar Negeri

Shishaku Saitō Makoto lahir pada 13 November 1858 di Mizusawa, Jepang dan meninggal pada 26 Februari 1936 di Tokyo. Ia perwira angkatan laut dan negarawan Jepang yang menjadi perdana menteri Jepang pada tahun 1932 sampai 1934 dan dua kali menjabat sebagai gubernur Jenderal Korea pada tahun 1919 sampai 1927 dan tahun 1929 sampai 1931. Saito lulus dari Akademi Angkatan Laut Jepang pada tahun 1879 dan pergi ke Amerika Serikat untuk belajar pada tahun 1884, menetap di sana selama beberapa tahun sebagai atase angkatan laut di kedutaan Jepang. Setelah menjabat sebagai wakil



Gambar 11.1. Saitō Makoto
Sumber: Encyclopedia Britannica, 2020z

menteri dan kepala administrasi angkatan laut, Saito menjadi menteri angkatan laut dari tahun 1906 hingga 1914. Pada tahun 1912 ia diangkat menjadi laksamana (Encyclopedia Britannica, 2020z).

Sebagai gubernur jenderal Korea (1919–27), Saito dianjurkan dengan mempromosikan sipil daripada administrasi militer. Ia menerima gelar *viscount* pada tahun 1925. Pada tahun 1927 Saito menghadiri konferensi perlucutan senjata di Jenewa sebagai anggota komite yang berkualifikasi penuh. Sekembalinya, dia mengundurkan diri dari jabatan gubernur dan menjadi anggota dewan rahasia kaisar. Kemudian, ia melanjutkan jabatan gubernur jenderal Korea antara tahun 1929 hingga 1931, tetapi pada tahun 1932, atas pembunuhan Perdana Menteri Inukai Tsuyoshi, Saito diangkat menjadi perdana menteri Jepang. Dalam kapasitas itu, ia mengambil langkah kontroversial untuk mengakui negara Manchukuo yang dikuasai Jepang (di Manchuria) dan menarik diri dari Liga Bangsa-Bangsa. Setelah skandal keuangan memaksa Saito dan kabinetnya untuk mengundurkan diri, ia menjadi penjaga segel rahasia. Saito dibunuh oleh sekelompok perwira muda militer selama pemberontakan militer yang gagal pada 26 Februari 1936 (Encyclopedia Britannica, 2020z).

Saito adalah seorang pria non-partai moderat yang memiliki pengalaman luas dalam negosiasi internasional dan administrasi sebagai gubernur jenderal Korea selama dua periode (1919-1927 dan 1929-1931). Dia merekrut anggota kedua partai untuk kabinetnya meskipun para politisi memperdebatkan apakah mereka akan bekerja sama dalam pemerintahan non-partai. Saito menunjuk Pangeran

Uchida sebagai menteri luar negeri karena jasanya sebagai presiden Perusahaan Kereta Api Manchuria Selatan. Penunjukan yang lebih kontroversial adalah Jenderal Araki sebagai Menteri Perang. Di bawah manajemen campuran ini, Jepang mengambil dua langkah signifikan menuju isolasi yaitu keluarnya Jepang dari Liga Bangsa-Bangsa dan keluarnya Jepang dari kesepakatan tentang pembatasan angkatan laut. Pada tahun 1932 Saito Makoto secara resmi menjadi perdana menteri kabinet persatuan nasional. Setelah kabinet sebelumnya mengundurkan diri secara massal karena adanya insiden Teijin (skandal penyusapan terkait dengan perusahaan Sutra Teijin) (Lee, Sorensen, & Ha, 2014).

Saito Makoto berusaha keras untuk menunjukkan bahwa kebijakan yang represif adalah sesuatu dari masa lalu. Warga Korea mulai menerapkan kebebasan baru. Saito Makoto menghapuskan pemuksulan dan penyiksaan. Pada saat menjabat sebagai gubernur federal ia menjadi sasaran percobaan pembunuhan langsung oleh Kang woogyu. Pemerintahan Saito adalah salah satu pemerintahan yang lebih lama dalam periode antar-perang, dan berlanjut hingga 8 juli 1934. Ia menjadi tokoh penting dalam politik sebagai penjaga segel pribadi sejak 26 Desember 1935 (Lee et al., 2014).

BAB 12

KOKI HIROTA

1936-1937

Kebijakan Dalam dan Luar Negeri

Koki Hirota (kō kē hē rōtä) lahir pada tahun 1878 dan meninggal pada tahun 1948 adalah seorang negarawan Jepang. Dia lulus dari sekolah hukum Universitas Tokyo. Ia seorang diplomat karir, dia menjabat sebagai duta besar untuk Rusia (1930–1932) dan sebagai menteri luar negeri (1933–1936). Ia menjadi perdana menteri pada Maret 1936, dan mengikuti perintah militer. Rezim-nya menyaksikan peningkatan pengeluaran militer, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, pertumbuhan agresi di Tiongkok, dan penandatanganan Pakta Anti-Komintern. Dia mengundurkan diri di



Gambar 12.1. Koki Hirota

Sumber: Chen, 2009

bawah tekanan militer pada Februari 1937. Kemudian dia (1937–38) menjadi menteri luar negeri dan presiden dewan perencanaan kabinet di bawah Fumimaro Konoye. Pada tahun 1945 ia bernegosiasi untuk mencegah Uni Soviet mengumumkan perang terhadap Jepang. Setelah perang dia ditangkap sebagai penjahat perang, dan pada tahun 1948 dia dihukum dan digantung (Encyclopedia.com, 2020).

Koki Hirota lahir di Kota Fukuoka, Prefektur Fukuoka, Jepang dari seorang tukang batu. Dia diadopsi ke dalam keluarga Hirota, yang memberinya pendidikan dan membawanya masuk ke Universitas Kekaisaran Tokyo sebagai mahasiswa hukum. Setelah menyelesaikan program hukum, ia masuk ke Kementerian Luar Negeri. Pada tahun 1923, ia menjadi direktur departemen Eropa dan Amerika di kementerian. Pada pertengahan 1920-an, dia bertugas di Belanda. Antara 1928 dan 1932, dia menjadi duta besar untuk Uni Soviet.

Pada tahun 1933, ia menjadi Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Perdana Menteri Saito Makoto. Dia mempertahankan posisi di pemerintahan Okada Keisuke. Pada 9 Maret 1936, ia menjadi Perdana Menteri Jepang. Di antara kebijakan utama yang dia tetapkan adalah bahwa hanya perwira aktif Angkatan Darat atau Angkatan Laut yang dapat menjabat sebagai Menteri Perang atau Menteri Angkatan Laut, yang memperluas pengaruh politik militer yang signifikan.

Secara eksternal, Pakta Anti-Komintern ditandatangani dengan Jerman saat dia menjadi kepala pemerintahan. Dia digulingkan pada 2 Feb 1937 setelah oposisi sukses Angkatan Darat. Dia kemudian ditunjuk oleh Perdana Menteri Pangeran Konoe Fumimaro sebagai Menteri

Luar Negeri, tetapi penentangannya terhadap eskalasi perang dengan China membuatnya tidak populer di kancah politik yang didominasi Angkatan Darat. Dia dipaksa pensiun pada tahun 1938, dan keluar dari politik selama beberapa tahun. Pada tahun 1945, ia kembali bertugas dalam upaya untuk membujuk Rusia agar tetap netral dengan Jepang. Setelah perang, dia diadili sebagai penjahat perang Kelas A dan dinyatakan bersalah. Dia dijatuhi hukuman mati dengan digantung, dan merupakan satu-satunya warga sipil yang menerima hukuman mati (Chen, 2009).

BAB 13

KONOE FUMIMARO

1937-1939, 1940-1941

Riwayat Hidup

Konoe Fumimaro merupakan salah satu perdana menteri Jepang yang pernah menjabat di era Kekaisaran *Shōwa*. Konoe Fumimaro menjabat sebagai perdana menteri selama dua kali. Fumimaro menjabat selama periode di era yang paling bergejolak dalam sejarah Jepang Modern. Ia lahir di Tokyo sebagai pewaris keluarga Pangeran Konoe, kepala dari lima keluarga. Konoe adalah keturunan langsung dari keluarga bangsawan yang sangat terhormat, Fujiwara (Yagami, 2006: 13). Konoe Fumimaro dalam bahasa lengkap Konoe Fumimaro, *Kōshaku* (pangeran) Konoe juga dieja Konoye lahir pada

tanggal 12 Oktober 1891 di Tokyo, Jepang dan meninggal 16 Desember 1945 di Tokyo. Ia pemimpin politik dan perdana menteri Jepang pada tahun 1937-1939 dan 1940-1941, yang tidak berhasil mencoba membatasi kekuatan militer dan menjaga agar perang Jepang dengan China tidak meluas menjadi konflik dunia (Encyclopedia Britannica, 2020c).



Gambar 13.1. Konoe Fumimaro
Sumber: Encyclopedia Britannica, 2020c)

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Konoe lahir dari lima keluarga terdepan di mana bupati (*sesshō*) dan kanselir (*kampaku*) dipilih. Ayahnya, Atsumaro, adalah seorang negarawan terkemuka. Konoe adalah anak yang cerdas dan sensitif, tetapi dia cenderung gugup dan penakut dan dia mengembangkan sikap sinis terhadap masyarakat. Dia dididik dengan elit intelektual bangsa, pertama kuliah di Universitas Kekaisaran Tokyo dan kemudian Universitas Kekaisaran Kyōto, dia lulus dalam bidang hukum. Sebagai mahasiswa, Konoe menjadi akrab dengan filsafat Barat, sastra, sosiologi, dan ma-

salah sosial dan ekonomi, khususnya masalah orang miskin. Salah satu penasihat utamanya di Universitas Kyōto kemudian menjadi salah satu ekonom Marxis terkemuka Jepang. Selama periode ini, Konoe menerjemahkan esai Oscar Wilde ke dalam bahasa Jepang “*The Soul of Man Under Socialism*” tahun 1891, yang diterbitkan dalam jurnal intelektual. Penjualannya dilarang oleh pemerintah karena dinilai membahayakan ketertiban umum (Encyclopedia Britannica, 2020c).

Reformasi *House of Peers*

Perjalanan karir politik Konoe bermula saat Konoe disorot oleh artikel yang sensasional dan kontroversial “*Reject the Anglo-Ameri-*

can-Centered Peace”, lalu pertemuan pertama Konoe dengan Pangeran Saionji Kinmochi, juga pengalaman mengecewakan Konoe di Konferensi Perdamaian Paris, dan upayanya untuk mereformasi *House of Peers*. *House of Peers* adalah *the upper house of the imperial Diet as mandated under the Constitution of the Empire of Japan*. *House of Peers* efektif bekerja dari 11 Februari 1889 sampai 3 Mei 1947 (Yagami, 2006).

Di bawah Konstitusi Meiji tahun 1889, Diet Kekaisaran (*the Imperial Diet*) didirikan atas dasar *two houses* dengan kekuatan yang sama. Majelis tinggi, *House of Peers (Kizokuin)*, adalah hampir seluruhnya berfungsi. Awalnya, keanggotaannya sedikit kurang dari 300, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi sekitar 400. *The peer* dimaksudkan untuk mewakili peringkat atas dan kualitas bangsa dan untuk melayani sebagai pengawas majelis rendah. Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Perang Dunia II (*Shūgiin*) awalnya terdiri dari 300 anggota, semuanya dipilih, tetapi secara bertahap jumlah ini meningkat menjadi 466. Kekuatannya dalam banyak hal sebagian besar negatif. Tanpa persetujuan Diet, tidak ada *bill* yang bisa menjadi undang-undang. Pemerintah memang memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan kekaisaran jika terjadi keadaan darurat, tetapi jika peraturan-peraturan ini akan tetap berlaku, Diet harus menyetujuinya pada sesi berikutnya. Ada satu batasan signifikan pada kontrol legislatif tradisional atas *the purse strings*. Jika Diet tidak mengeluarkan anggaran dengan cara yang dapat diterima oleh pemerintah. Pemerintah berhak untuk menerapkan anggaran untuk tahun sebelumnya. Ketentuan ini dipinjam dari praktik Prusia. Diet tidak mengusulkan undang-undang penting tetapi tugas ini diberikan pada eksekutif (Encyclopedia Britannica, 2020c).

Di bawah Konstitusi 1947, Diet tersebut, berganti nama menjadi *Kokkai*, diubah secara drastis baik dalam struktur maupun kekuasaan. Masih ada dua dewan, Dewan Perwakilan Rakyat (*Shūgiin*) dan Dewan Penasihat (*Sangiin*). *Sangiin* kemudian menggantikan *House of*

Peers lama dan memiliki anggota 250 yang terdiri dari dua kategori yaitu 100 anggota dewan dipilih dari negara pada umumnya dengan 152 sisanya dipilih sebagai perwakilan prefektur. Setiap pemilih dapat memberikan surat suara untuk satu kandidat di setiap kategori, memberinya total dua suara. Anggota Dewan menjabat selama enam tahun, dengan setengah dari anggota mencalonkan diri setiap tiga tahun. *House of Councilors* tidak dapat dibubarkan jika terjadi konflik antara Dewan dan cabang eksekutif. Namun, keseimbangan kekuasaan terletak di majelis rendah, di mana kesepakatan umum dengan kebijakan eksekutif harus berlaku. Dalam kasus kebuntuan antara kedua majelis terkait pemilihan perdana menteri, suara majelis rendah akan diutamakan. Anggaran harus diserahkan dahulu ke majelis rendah jika dua majelis tidak bisa bersepakat, posisi majelis rendah berlaku setelah 30 hari. Ketentuan yang sama ini berlaku untuk perjanjian. Dengan undang-undang lain, jika anggota dewan menolak sebuah RUU atau menolak untuk menindaklanjutinya dalam waktu 60 hari, Dewan Perwakilan Rakyat dapat membuatnya menjadi undang-undang dengan melaporkannya kembali oleh mayoritas dua pertiga dari anggota yang hadir (Encyclopedia Britannica, 2020c).

Pada era yang bergejolak di tahun 1930-an, sebagai anggota *House of Peers*, Konoe terus membangun karir politiknya dengan terlibat dalam banyak hal. Konoe berpendapat bahwa cara terbaik untuk mengatasi sistem “*two houses*” adalah melalui pembatasan dari *House of Peers*. Kenkyukai, faksi terkuat di Majelis Tinggi, menentang upaya Konoe untuk mereformasi *House of Peers*. Oleh karena itu, tidak masuk akal bahwa Konoe, sementara mendorong reformasi *House of Peers*, ia juga bergabung dengan *Kenkyukai*. Keterlibatan Konoe dalam reformasi *House of Peers* adalah terpilihnya Konoe Fumimaro sebagai Wakil Ketua *House of Peers* pada tahun 1929. Empat tahun kemudian, pada bulan Juni 1933, Konoe, menggantikan Tokugawa Iesato, menjadi

Ketua kelima *House of Peers* (Yagami, 2006: 16-21). Konoe mendapat perhatian positif dari publik pada tahun 1925 ketika ia mendukung Undang-Undang Pemilihan Umum Jepang. Ia mendapatkan gelar Pangeran sehingga ia mendapat kuris di Dewan Bangsawan Parlemen Jepang. Ia terpilih menjadi ketua Dewan Bangsawan pada tahun 1933. Pada tahun 1934, ia mendapat anugerah Grand Cordon Orde Harta Suci.

Kebijakan Luar Negeri

Sementara itu, perekonomian Jepang sudah tidak stabil sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama dan juga berakhirnya keuntungan ekonomi Jepang sebagai pemasok untuk memenuhi permintaan yang kuat akan barang-barang perang. Perekonomian Jepang memburuk lebih jauh dari kerusakan parah yang disebabkan oleh gempa bumi besar dan kebakaran besar dan segala hal lainnya, Konoe mulai menaruh perhatian pada masalah-masalah yang bergerak cepat seperti masalah Manchuria, kebangkitan militerisme, dan ketidakstabilan sosial yang semakin meluas (Yagami, 2006: 23). Pada usia 40 tahun Konoe Fumimaro memulai karirnya sebagai perdana menteri yang ke-34. Kekacauan tahun 1930-an dan kebangkitan Konoe sebagai sosok seperti "*Messier*" yang akan menyelamatkan negara yang sangat bermasalah, yang ditandai dengan militerisme sayap kanan yang muncul dengan cepat, kemunduran politik partai, dan perkembangan konflik politik antara Saionji dan Konoe tentang masalah menentukan arah yang harus ditempuh Jepang (Yagami, 2006).

Perjalan kabinet pertama Konoe bermula dari insiden Tiongkok, yang terjadi sebulan setelah pelantikan Konoe sebagai perdana menteri pada bulan Juni 1937 yang ke-34, dan upaya Konoe untuk mencapai penyelesaian diplomatik atas insiden tersebut dengan pemerintah nasionalis Tiongkok untuk menghentikan kerusakan hu-

bungan Jepang dengan kekuatan Barat setelah insiden tersebut (Yagami, 2006: 40-41). Sebulan setelah Konoé menjabat sebagai perdana Menteri, pasukan Tiongkok bentrok dengan pasukan Jepang dekat Peking dalam peristiwa yang disebut Insiden Jembatan Marco Polo. Tiga divisi tentara dikirim oleh Konoé. Tentara ini kemudian melancarkan serangan umum setelah tiga minggu berada di lokasi tersebut. Tentara Tiongkok membunuh dua mariner Jepang di Shanghai pada bulan Agustus 1937. Konoé kemudian menyetujui usul Menteri Angkatan Darat Jenderal Hajime Sugiyama untuk mengirim dua divisi dengan alasan untuk membela kehormatan Jepang. Kabinet Konoé mengeluarkan pernyataan dengan menuduh pihak nasionalis dan komunis Tiongkok berperilaku semakin provokatif dan menghina Jepang. Markas Besar Kekaisaran yang otonom secara struktur dari pemerintah terpilih kemudian memerintahkan tentara Jepang di Tiongkok untuk menyerang ibu kota Nanking pada bulan Desember 1937. Nanking kemudian berhasil direbut dalam beberapa minggu setelah tentara Angkatan Darat Jepang terlibat dalam Pembantaian Nanking.

Pemerintah Konoé mengeluarkan pengumuman pada Januari 1938 bahwa ia akan berusaha untuk menghindari konflik dengan Pemerintah Chiang Kai-shek. Kemudian, pihak militer dan Konoé memaksakan untuk pengesahan Undang-Undang Mobilisasi Nasional melalui Diet. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat untuk menguasai semua sumber daya manusia dan bahan-bahan di China. Kemudian, tentara Jepang memperoleh kemenangan di Hankow, Hsuechow, Kanton, Wuchang, dan Hayang. Konoé kemudian mengundurkan diri karena kecewa dengan pihak militer pada bulan Januari 1939. Konoé kemudian digantikan oleh Hiranuma Kiichiro. Konoé ditunjuk sebagai ketua Dewan Penasihat Kekaisaran Jepang.

Konoe menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya setelah Angkatan Darat Jepang tidak puas terhadap Perdana Menteri Mitsumasa Yonai. Angkatan Darat Jepang memanggil kembali Konoe sebagai Perdana Menteri pada 23 Juni 1940. Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Penasihat Kaisar. Kabinet Yonai kemudian bubar pada 16 Juli 1940. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Konoe setelah kembalinya ia ke jabatan perdana Menteri adalah memulai upayanya yang terus menerus untuk mencapai penyelesaian insiden China dengan membentuk Liga Anggota Parlemen Realisasi Perang Suci untuk mengimbangi oposisi dari politikus Saito Takao yang secara terang-terangan menentang Perang Tiongkok-Jepang Kedua di parlemen pada 2 Februari 1940. Ia juga melakukan pembicaraan secara diplomatik dengan AS (Yagami, 2006: 74-75). Serangkaian kebijakan yang diambil Konoe, dimulai dengan mobilisasi nasional, pembentukan Asosiasi Layanan Nasional (*Taisei Yokusankai*), manuver Wang Ching-wei, Pakta Tripartit yang ditan-datangani pada September 1940 sehingga menjadikan Jerman, Italia, dan Jepang dalam satu poros, usulan KTT Konoe dengan Franklin Roosevelt. Kebijakan ini semua dalam politik luar negeri Konoe dalam upayanya mencapai penyelesaian diplomatik dengan Amerika Serikat (Yagami, 2006: 2).

Konoe kemudian menunjuk Yosuke Matsuoka sebagai Menteri luar negeri meskipun harus bertentangan dengan sekutu politik dan Kaisar. Matsuoka populer karena telah membuat Jepang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1933. Kebijakan luar negeri Konoe dan Matsuoka dibuat dengan berdasarkan dokumen yang ditulis oleh angkatan darat. Kebijakan Konoe yang lain adalah tetap mempertahankan posisinya di Tiongkok, pasukan Jepang akan dipindahkan ke Indochina, menghindari konflik dengan Uni Soviet, dan bersiaga penuh menghadapi tindakan militer dari Amerika Serikat dan Britania.

Akhir dari perjalanan Konoe, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya terlepas dari usahanya yang gigih untuk menyelamatkan Jepang dan jalannya yang tragis, Konoe Fumimaro ditakdirkan untuk gagal dalam menghadapi nasib bangsa, kekalahan dan penghinaan juga akhir tragis dari hidupnya sendiri pada empat bulan setelah jatuhnya Jepang. Jenderal Douglas MacArthur mengumumkan bahwa Konoe Fumimaro akan diadili karena kejahatan perang. Mendengar berita tersebut, akhirnya Konoe mengakhiri hidupnya sendiri pada 16 Desember 1945 pada umur 54 tahun (Yagami, 2006: 5).

BAB 14

HIDEKI TŌJŌ

1941-1944

Rezim Diktatorian

Hideki Tōjō adalah Perdana Menteri Jepang yang cukup terkenal dan menjadi perhatian pada masanya. Ia lahir pada tanggal 30 Desember 1884 di Tokyo. Tojo merupakan tentara dan negarawan yang menjadi perdana menteri Jepang ke 27 tepatnya pada periode 1941–1944 (Encyclopedia Britannica, 2020ac).

Ia anak dari Hidenori Tōjō, salah seorang petinggi militer Jepang. Terlahir dari keluarga berlatar belakang militer, ia mengikuti jejak Ayahanda. Hideki Tōjō merupakan lulusan dari akademi militer dan sekolah tinggi perang angkatan darat jepang. Ia menjadi kepala



Gambar 14. 1. Hideki Tōjō
Sumber: Modern Japanese Historical Figures, 2013b

staf angkatan darat pada tahun 1937 dan wakil menteri perang pada tahun 1938. Tōjō muda menunjukkan bakatnya sebagai prajurit yang cakap, ia bahkan dijuluki “Razor Tōjō”. Setelah merangkap sebagai inspektur jenderal penerbangan angkatan darat dan kepala departemen angkatan darat Aeronautika, pada tahun 1940 ia menjadi menteri perang di kabinet menteri Kōnoe kedua dan ketiga (Encyclopedia Britannica, 2020ac).

Pada tahun 1941, akhirnya Tōjō menggantikan Fumimaro Kōnoe menjadi perdana menteri dan merangkap jabatan menteri perang dan menteri dalam negeri. Berdasarkan latar belakang keberhasilan operasi awal perang melawan Amerika Serikat dan Inggris, pada tahun 1942 ia berpartisipasi pada pemilihan umum yang disebut *Yokusan Senkyo* (pemilihan umum tahun 1942), berdasarkan sistem rekomendasi calon yang bertujuan untuk membentuk parlemen pro- Tōjō. Pemilu ini menjadikan parlemen hanya sebatas nama atau formalitas dan memperkuat rezim diktatorian. Pada bulan Februari 1944, ia merangkap jabatan kepala staf umum. Namun, para negarawan senior Nippon mulai mengkritiknya dengan keras karena memperburuk situasi perang, dan pada bulan Juli 1944, orang-orang kabinetnya mengundurkan diri secara massal (Modern Japanese Historical Figures, 2013b).

Kebijakan Luar Negeri

Tōjō merupakan seorang birokrat pekerja keras dan efisien. Tōjō juga merupakan salah satu militeris paling agresif dalam kepemimpinan Jepang bahkan dunia pada saat itu. Perannya yang cukup terkenal ialah saat dia memimpin upaya perang negaranya setelah serangan di

pangkalan militer AS di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, dan di bawah arahnya, kemenangan besar awalnya dicetak di seluruh Asia Tenggara dan wilayah Pasifik Barat. Invasi Sekutu yang berhasil ke Kepulauan Mariana begitu melemahkan pemerintahannya. Namun, ia dicopot sebagai kepala staf pada 16 Juli 1944. Pada 11 September 1945, setelah penyerahan resmi Jepang, ia menembak dirinya sendiri dalam upaya bunuh diri, tetapi ia dirawat hingga sembuh dan pada 29 April 1946, bersama para pemimpin masa perang Jepang lainnya, ia didakwa atas kejahatan perang di hadapan pengadilan militer internasional untuk Timur Jauh di Tokyo (Encyclopedia Britannica, 2020ac).

Pada persidangan, Tōjō dinyatakan bersalah dan kemudian dihukum gantung. Tōjō akhirnya dikenang sebagai salah satu pemimpin yang mempunyai “*power*” pada masanya. Bahkan Gehard L. Weinberg memasukkannya sebagai salah satu pemimpin yang berpengaruh pada Perang Dunia ke 2 dalam bukunya “*Vision of Victory: The Hopes of Eight World War II Leader*” (Weinberg, 2005). *Legacy* Tōjō rupanya berlanjut, karena ia adalah salah satu dari mereka yang dihukum karena kejahatan perang yang juga telah dimasukkan di antara tentara Jepang yang tewas yang diperingati di Kuil Yasukuni di Tokyo. Kunjungan berkala ke kuil oleh berbagai perdana menteri Jepang dan pejabat pemerintah lainnya telah memicu protes keras dari Tiongkok, Korea Selatan, dan negara lain yang berada di bawah pendudukan Jepang selama perang (McNeill, 2005).

Selama menjadi Perdana Menteri, Tōjō dikenang dengan berbagai prestasi dan kebijakannya. Dalam negeri, dia dikenal cukup berhasil membangun industri domestik. Namun, hal yang paling dikenal dari Tōjō ialah kebijakan luar negerinya, apalagi pada masa tersebut adalah masa negara melakukan ekspansi dan berperang khususnya Perang Dunia ke II. Lahir dan berlatar militer membuat arena pertarungan menjadi “makanan” Hideki Tojo. Dengan situasi kondisi demikian

membuat kebijakan luar negeri periode kepemimpinan Hideki Tōjō berorientasi atau berlandaskan kebijakan-kebijakan militer yang bersifat ofensif (menaklukkan/menjajah) dan defensif.

Hideki Tōjō: *The Man Behind Japan During World War II*

Hideki Tōjō sebagai Perdana Menteri Jepang ke 27 yang terkenal “garang” dan menjadi perhatian dunia internasional pada masanya. Ia merupakan tentara dan negarawan yang menjadi perdana menteri Jepang pada periode 1941-1944 ini memang dikenal cukup kejam dalam berbagai hal kebijakan yang diambilnya.

Kebijakan yang perlu digaris bawahi, Tōjō berhasil membentuk parlemen pro-Tōjō. Sistem ini menjadikan parlemen hanya sebatas nama atau formalitas dan memperkuat rezim diktatorian dirinya. Ia juga berhasil mengambil hati Kaisar Hirohito untuk memegang kendali negara dan koloni Jepang dengan maksimal. Pada masa Hideki Tōjō, Jepang dikenal dengan fasismenya. Pengembangan ultranasionalisme yang dilakukan Tōjō ialah menganggap bangsa Jepang keturunan dewa matahari dan menganggap bangsa lain lebih rendah. Berdasarkan pedoman itu, Jepang melancarkan politik ekspansi ke negara-negara maju di kawasan Asia. Termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri dikenal propaganda dengan istilah 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia dan Nippon Pelindung Asia (Nailufar, 2020).

Selama masa kepemimpinannya, Jepang terus melakukan ekspansi ke beberapa negara, terutama di Asia dan juga berpartisipasi di peperangan lintas benua termasuk dengan Amerika Serikat. Salah satu peristiwa militer yang paling terkenal dalam sejarah peperangan dunia ialah penyerangan Pearl Harbour yang inisiatornya ialah Hideki Tōjō. Ia yang menganggap Amerika Serikat pada saat itu calon ancam-

an Jepang di masa mendatang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat secara dadakan dan berhasil meluluh lantakkannya melalui serangan besar via udara (PearlHarbor, 2019).

Pada masa penyerangan Peal Harbour, Tōjō belum menjadi Presiden. Namun peristiwa tersebut cukup membesarkan namanya. Militer Jepang telah lama mendominasi urusan luar negeri Jepang. Meskipun negosiasi resmi antara menteri luar negeri AS dan mitranya dari Jepang untuk meredakan ketegangan sedang berlangsung. Hideki Tōjō sebagai menteri perang yang akan segera menjadi perdana menteri, tidak berniat menarik diri dari wilayah yang direbut. Dia juga menafsirkan ancaman perang Amerika sebagai ultimatum dan bersiap untuk memberikan pukulan pertama dalam konfrontasi Jepang-Amerika pada pengeboman Pearl Harbour (History, 2019b).

Hideki Tōjō menurut beberapa pihak memiliki kegilaan yang sama dengan Adolf Hitler karena menganggap ras Jepang yang paling superior dan membuat dengan entengnya melakukan agresi-agresi militer sampai menyebabkan sekitar delapan juta nyawa melayang di banyak negara termasuk Indonesia yang dijajah selama periode pemerintahan Tōjō (Indozone, 2019). Fokus kebijakannya berlandaskan pada militer. Kebijakannya di sektor ekonomi dan sosial juga berdasarkan pada militer.

Akhirnya, kebijakan agresif Hideki Tōjō “*The Military Czar*” telah memberikan keuntungan besar sejak awal, dengan keuntungan teritorial utama di Indocina dan Pasifik Selatan. Meskipun Tōjō meningkatkan kendali atas negaranya sendiri dengan memperketat produksi industri masa perang, pada tanggal 21 Februari 1944, dia tidak dapat mengontrol takdir dimana Amerika Serikat mampu mengalahkan Jepang di Pasifik Selatan. Ketika Saipan jatuh ke tangan Marinir dan Angkatan Darat AS pada 22 Juni 1944, pemerintahan Tōjō runtuh. Selain pengaruhnya di pemerintahan dengan dukungan Kaisar,

Zaebatsu dan para stakeholder internal menurun, salah satu penyebab keruntuhannya pada saat itu karena ia terlalu tamak dengan mengambil beberapa posisi strategis sekaligus. Setelah Jepang menyerah, Tōjō mencoba bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri dengan pistol 38mm Amerika tetapi dia diselamatkan oleh seorang dokter Amerika yang memberinya transfusi darah. Akhir perjalanan hidupnya, ia dihukum karena kejahatan perang oleh pengadilan internasional dan digantung pada 22 Desember 1948 (History, 2019a).

BAB 15

KUNIAKI KOISO

1944-1945

Kebijakan Koiso Selama PD II

Menelik dari sejarah hubungan antara Jepang dan Indonesia, hal yang tidak dapat dilupakan saat Jepang menyatakan janji terhadap kemerdekaan Indonesia. Janji yang dilayangkan ini dinyatakan oleh Perdana Menteri Jepang bernama Kuniaki Koiso, sehingga janji tersebut dikenal sebagai Janji Koiso. Janji ini dinyatakan oleh Perdana Menteri Jepang Kuniaku Koiso pada tanggal 7 September 1944 di Tokyo ketika sedang berlangsung sidang istimewa Teikoku Henkai ke-85. Kuniaki Koiso lahir di Toghigi pada tanggal 22 Maret 1880 dan menjalani pendidikan berbasis



Gambar 15.1. Kuniaki Koiso
Sumber: *Modern Japanese Historical Figures*, 2013a



Gambar 15.2. Kuniaki Koiso
Sumber: *Encyclopedia Britannica*, 2020o

militer (*Modern Japanese Historical Figures*, 2013a).

Koiso lulus dari Akademi Angkatan Darat pada tahun 1900 sebagai lulusan terbaik. Ia kerap kali mengunjungi Sekolah Tinggi Perang Angkatan Darat, dan bertugas aktif selama Perang Rusia-Jepang. Pada tahun 1930, ia menjadi kepala Biro Urusan Militer dan pada tahun 1932 diangkat menjadi wakil menteri perang. Dia kemudian menjadi komandan divisi ke-5 dan kepala staf Kantōgun, operasi militer di Tiongkok. Dari tahun 1935 hingga 1938, Koiso, sebagai panglima tertinggi, mengarahkan operasi militer di Korea. Selama kabinet Hiranuma (1939) dan Yonai (1940), ia menjabat sebagai menteri luar negeri (*Encyclopedia Britannica*, 2020o).

Setelah jatuhnya kabinet Tōjō di tahun 1944, Koiso diangkat menjadi Perdana Menteri Jepang dan diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan peperangan yang sedang berlangsung. Sebelumnya, Kuniaki Koiso menjadi Gubernur Jenderal Korea pada tahun 1942 dan akhirnya diangkat sebagai Perdana Menteri Jepang pada tahun 1944 dan berakhir di tahun 1945 (*Encyclopedia Britannica*, 2020o). Singkatnya masa jabatan Koiso sebagai perdana menteri merupakan

dampak dari kondisi Jepang dan dunia saat itu yang sedang dalam masa akhir perang dunia ke-2.

Saat masa transisi berakhirnya perang dunia ke-2, mobilisasi rakyat yang dirancang pada tahun 1944 dengan tujuan untuk mening-

katkan produksi persenjataan masa perang dan mengatasi kondisi di tahap pertempuran akhir telah ditetapkan (Japan Center for Asian Historical Records, 2019). Sayangnya invasi dari Amerika Serikat terhadap Jepang tidak dapat dibendung dan akhirnya menyebabkan jatuhnya bom di Hiroshima. Bahkan kabinet yang diusung oleh Kaiso sendiri tidak mendapatkan prestasi yang baik (MacArthur, 1994). Situasi di mana gagalnya Jepang dalam peperangan membuktikan bahwa Kaiso dan kabinetnya tidak dapat mengkordinasikan sistem politik, diplomatik, hingga militer.

Tujuan dalam masa jabatan Koiso adalah negosiasi terhadap sekutu yang akan membantu stabilitas Jepang di medan perang. Kabinet Koiso secara terus-menerus mengalami kerugian di bidang militer. Keadaan diplomatik Jepang dengan Rusia juga semakin memburuk di bawah kepemimpinan Koiso dan akhirnya membuat tujuan utamanya menjadi sia-sia (MacArthur, 1994). Terdesaknya keadaan pemerintahan Jepang saat itu juga berdampak pada negara jajahan dan sekutunya saat itu. Keadaan semakin tidak terkontrol dan memberikan peluang kepada negara jajahannya untuk menyerukan kemerdekaannya, termasuk Indonesia.

Kemunduran Jepang dari medan perang juga menandai berakhirnya masa jabatan Kaiso dan berimbas pada karirnya. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Militer Internasional sebagai penjahat perang kelas A (kejahatan terhadap perdamaian) atas aksinya selama perang berlangsung. Perannya yang memulai dan memicu perang dengan China dan kegagalannya dalam menghentikan perang setelah menjadi Perdana Menteri Jepang (The Pacific War Online Encyclopedia, 2013). Pada akhirnya, Kuniaki Koiso meninggal pada usia 70 tahun di tahun 1950 karena mengidap penyakit saat menjalani masa hukuman penjara seumur hidup (The Pacific War Online Encyclopedia, 2013).

Strategi Militer

Setahun masa jabatan Kuniaki Koiso tidak hanya berdampak terhadap stabilitas domestik Jepang di tengah perang dunia ke-2, tetapi juga berdampak terhadap kondisi hubungan luar negeri (hubungan diplomatik) Jepang dengan negara lain. Kabinet Kuniaki Koiso dimulai pada tahun 1944 dan berakhir pada tahun 1945 yang bertepatan dengan jatuhnya Jepang akibat bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Jepang di tangan Kuniaki Koiso akhirnya tidak dapat bertahan dalam pertempuran melawan Amerika Serikat saat perang dunia ke-2 (Wada, 2011).

Sistem politik sebelumnya yang diterapkan oleh kabinet Tōjō dianggap merugikan kebijakan internal dengan penerapannya yang tidak efektif dan memperburuk kondisi militer Jepang saat itu. Setelah pergantian jabatan dan perubahan kabinet, pemerintahan di bawah kuasa Koiso yang berlatar belakang militer semakin memperkuat kabinet Jepang untuk melanjutkan peperangan. Setelah kabinet Koiso mulai menjabat, beberapa rancangan perubahan administrasi yang mengatur strategi militer dan biaya produksi perang telah dibuat. Tidak seperti kabinet sebelumnya yang dipegang oleh Tōjō, kabinet Koiso mencoba untuk membagi porsi tanggung jawab untuk mengatur kelompok hingga individu dan memulihkan pemisahan secara tradisional antara komando Angkatan Darat dan Angkatan Laut (Office of Strategic Services, 1945).

Spoils-System

Dalam aktivitas pemerintahannya, kabinet Koiso memegang teguh slogan “*Min'I Chotatsu*” yang memiliki arti pertumbuhan atau ekspansi keinginan rakyat. Slogan ini menekankan koordinasi terhadap berbagai pusat kekuatan yang ada di dalam susunan Diet. Hal ini

akhirnya dapat memulihkan sistem anggota Diet dan memberikan kesempatan kepada anggota staf kabinet untuk menjadi pejabat politik, khususnya bagi yang telah dihapuskan oleh kabinet Konoe kedua (Modern Japan, 2010).

Salah satu strategi yang diterapkan secara terus-menerus di sepanjang perang dunia ke-2 adalah mekanisme perang yang disebut “*Outline*”, di mana strategi ini berakibat pada alur operasi dalam peperangan. Para pemimpin Jepang pada saat itu menyadari bahwa perang merupakan konflik bersenjata yang akan berakhir dengan perdamaian bersyarat. Strategi dan pemahaman seperti ini tentu dinilai sangat ambigu mengingat gambaran akan konflik dan perdamaian bersyarat tidak dapat disandingkan dengan aspek politik, ekonomi, hingga diplomasi. Pemulihan sistem Diet ini mengakibatkan terbentuknya mekanisme baru yang ditandai dengan majunya dua puluh empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan majelis tinggi yang masing-masing berasal dari Diet menjadi Menteri dan anggota Dewan Parlemen. Kabinet Kuniaki Koiso ini dianggap sebagai kekacauan dalam sistem Diet yang salah satunya disebabkan oleh “*spoils-system*” dalam pergantian staf dalam susunan kabinetnya (Modern Japan, 2010).

Kebijakan yang diterapkan oleh kabinet Koiso menunjukkan adanya pengaruh dan kendali dari para industrialis yang bukan berasal dari pemerintah atau militer. Rezim besar yang dikeluarkan Koiso dalam masa pemerintahannya telah melakukan reorganisasi besar hingga akhirnya berdampak terhadap industrialisasi khususnya beberapa perusahaan yang paling berpengaruh. Namun ketika penerapan rezim ini melemah karena kesulitan keuangan yang tidak merata, akhirnya Koiso berusaha untuk mengonsolidasikan kekaisaran di balik adanya upaya perang. Selanjutnya, kabinet Koiso membentuk partai baru hingga pergeseran kabinet yang secara khusus dibentuk untuk

mengkritik program tenaga kerja yang sedang berlangsung (Office of Strategic Services, 1945).

Dapat disimpulkan bahwa sistem politik yang diberlakukan oleh Kuniaki Koiso walaupun merujuk pada pemulihan kabinet sebelumnya, kabinet Koiso masih memiliki kendala besar dalam merekonstruksi pengelolaan pemerintahan saat itu. Latar belakang Koiso sebagai pasukan militer yang terpendang juga tidak luput dari pandangan masyarakat dalam melihat sistem yang dijalankan oleh Koiso. Walaupun usaha rekonstruksi sistem politik yang telah diupayakan tidak berakhir seperti yang diharapkan, kabinet Koiso dalam setahun masa jabatannya memberikan perspektif baru terhadap sistem politik saat perang dunia ke-2 berlangsung.

BAB 16

KIJŪRŌ SHIDEHARA

1945-1946

Diplomasi Shidehara

Kijūrō Shidehara merupakan seorang perdana menteri Jepang yang menjabat tidak sampai satu tahun, yaitu dari tanggal 9 Oktober 1945 sampai 22 Mei 1946. Ia menjabat sebagai perdana menteri untuk menggantikan perdana menteri yang sebelumnya yaitu Pangeran Naruhiko Higashikuni. Ia dipilih sebagai perdana menteri atas mandat langsung dari Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito menunjuk langsung Shidehara karena kaisar menganggap bahwa Shidehara merupakan orang yang pro terhadap Amerika Serikat (Schlichtmann, 1995: 61).



Gambar 16.1. Kijūrō Shidehara
Sumber: Encyclopedia Britannica,
2020y

Kijūrō Shidehara merupakan politikus yang berasal dari partai Independen dan ia merupakan perdana menteri yang menjabat pertama setelah perang dunia ke-II. Kijūrō Shidehara dianggap sebagai arsitek utama dari munculnya Jepang modern untuk perannya dalam reformasi konstitusi, pembentukan kembali terhadap partai demokrasi, demobilisasi dan bangsa, serta repatriasi damai militer Jepang, dan Ningen-Sengen atau Human Declaration yang isinya bahwa “Kaisar menolak konsep dirinya sebagai dewa yang hidup”. Shidehara juga terkenal dengan kebijakannya “Diplomasi Shidehara” yang bermaksud ia ingin melakukan perubahan tentang pola pikir masyarakat Jepang dan pemerintahannya yang selalu berpikir tentang perang. Dia ingin membuat politik yang dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan internasional (Schlichtmann, 1995: 33-34).

Shidehara juga berkata bahwa perdamaian dunia tidak hanya bergantung pada instrumen diplomatik, melainkan pada semangat dan niat baik antar negara. Shidehara banyak melakukan upaya untuk mencapai perdamaian dengan melakukan beberapa perjanjian. Dia juga menjadi kepala negosiator dalam *Washington Naval Disarmament Conference* atau yang lebih dikenal dengan Konferensi Angkatan Laut Washington. Di dalam konferensi ini, Shidehara sebagai kepala negosiator tidak hanya menjaga kepentingan Jepang, tetapi ia juga menunjukkan kesediaan Jepang dalam bekerjasama secara damai. Dalam konferensi ini, Shidehara mengatakan bahwa perlucutan senjata dan ekonomi itu saling terkait. Shidehara menganggap bahwa secara natural pasukan militer suatu negara selalu mengantisipasi dan mempersi-

apkan perang. Terbukti dari fakta bahwa mereka melakukannya untuk memegang kekuasaan dan dengan itu dapat mengklaim kekayaannya (Schlichtmann, 1995:49).

Setelah menjabat menjadi perdana menteri, Shidehara menandatangani Jenderal Douglas MacArthur. Ia mengatakan pendapatnya untuk mengubah otonomi militer yang berlaku pada saat itu. Konstitusi mengatur otonomi militer dengan menetapkan bahwa militer hanya bertanggung jawab kepada kaisar. Maka dari itu, militer tidak tunduk dengan perintah dari parlemen. Dan akhirnya setelah beberapa pertemuan, otonomi militer tersebut diubah menjadi ketentuan normal untuk institusi militer (Schlichtmann, 1995: 61).

Sebelum menjadi perdana menteri, Shidehara menjabat sebagai menteri luar negeri sebanyak dua kali. Shidehara sudah masuk di dalam pemerintahan Jepang sebelum dia menjadi menteri luar negeri yang diperkirakan jabatannya di sistem pemerintah sudah mencakup lebih dari 50 tahun (Schlichtmann, 1995: 34). Tidak hanya menjadi menteri luar negeri, Shidehara pernah menjalani berbagai jabatan di pemerintahan Jepang, seperti penasehat kementerian, duta besar Jepang di Amerika Serikat, Deen Haag, dan Kopenhagen, wakil menteri luar negeri, hakim Pengadilan Arbitrase Internasional di Deen Haag, dan menteri luar negeri. Shidehara di anggap mempunyai semangat dan minat yang baik tentang pemerintahan dan diplomasi Jepang. Oleh karena itu, para anggota pemerintahan Jepang banyak yang tertarik untuk melibatkan Shidehara sejak dia masih kuliah di tingkat undergraduate. Dia juga akrab dengan banyak duta besar dan para pejabat dari luar Jepang. Salah satunya Diplomat Amerika Serikat yang pernah menjabat di Korea dan Jepang yaitu William Franklin Sands, ia berkata:

“Shidehara dengan sempurna mencontohkan apa yang Harold Nicolson seorang penulis Inggris tuliskan, yaitu syarat dasar untuk diplomasi yang berhasil yaitu kepatuhan pada prinsip-prinsip kesopanan, kepercayaan, dan kebijaksanaan yang harus menjadi satu-satunya prinsip yang kondusif untuk menyelesaikan konflik atau sengketa secara damai” (Schlichtmann, 1995: 41-42).

Revisi Konstitusi Jepang

Kijūrō Shidehara resmi menjabat sebagai perdana menteri Jepang pada tanggal 9 Oktober 1945. Jabatan ini resmi disandanginya sebagai bentuk mandat yang ia peroleh dari kekaisaran Jepang. Sejak dikukuhkan, ia telah bertekad untuk mengabdikan dirinya pada bangsanya dan menganggap bahwa Jepang harus mampu mengambil bagian dalam membuat perubahan besar yang terjadi dalam dunia internasional. Untuk mencapai hal tersebut ia sempat menyebutkan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan masalah pembangunan dan kesejahteraan bangsa Jepang yang akan dicapai dengan membangun kondisi keadilan politik yang ada di Jepang (Schlichtmann, 1995: 61).

Sejak menjabat menjadi perdana menteri Jepang, dimana ia bertindak sebagai kepala pemerintahan, ia mulai membangun kembali perpolitikan yang ada di Jepang dengan pengembalian sistem partai yang dianggap efektif dan juga mengatur pemulangan tentara Jepang yang berada di bekas medan perang untuk kembali ke negaranya. Hal ini dilakukannya mengingat ia menjabat sebagai perdana menteri Jepang saat perang dunia II baru saja berakhir. Oleh karena itu, ia memiliki tanggung jawab yang besar untuk membangun kembali eksistensi Jepang di mata dunia internasional dengan mengacu pada prinsip-prinsip internasional yang ada (Schlichtmann, 1995: 61).

Dua hari setelah menjabat menjadi seorang perdana menteri, untuk pertama kalinya ia melakukan kunjungan kepada Jenderal Douglas McArthur. Hal ini dilakukannya karena kondisi Jepang yang baru saja mengalami kekalahan pada perang dunia II sehingga konstitusi yang ada harus direvisi. Salah satu masalah utama yang dihadapi pemerintahan Jepang di awal jabatannya sebagai perdana menteri adalah revisi konstitusi Jepang yang berkaitan dengan ketentuan militer terkait otonomi militer dalam urusan luar negeri. Di mana, pada aturan ini disebutkan bahwa militer hanya bertanggung jawab pada kaisar, sehingga tidak akan tunduk pada lembaga parlemen. Dalam hal ini ada beberapa rancangan perundang-undangan yang diajukan berkaitan dengan ketentuan militer dan pertahanan ini. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan kesepakatan (Schlichtmann, 1995: 61-62).

Satu minggu sebelum pelaksanaan presentasi yang akan dilakukan oleh lembaga parlemen, Shihadera mencoba untuk menyerahkan rancangan yang telah disepakati tersebut kepada Jenderal Douglas McArthur yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Tertinggi Sekutu (SCAP) dan sebagai kepala pasukan pendudukan di Jepang. Hal ini dilakukan oleh Shidehara sebagai bentuk untuk meminta pertimbangan kepada McArthur. Rancangan ini juga diserahkan oleh McArthur kepada pihak Amerika Serikat. Rancangan konstitusi ini berupa rencana untuk penyelesaian masalah Jepang dalam hubungannya dengan dunia internasional dengan jalan selain perang. McArthur menyatakan persetujuannya terhadap proposal rancangan undang-undang tersebut yang berbicara mengenai penolakan perang secara konstitusional. Setelah mendengar hal tersebut, kaisar Jepang memberikan perintah untuk melakukan penyusunan dan persetujuan mengenai revisi konstitusi pasal 9 yang diajukan oleh Shihadera. Perintah persetujuan ini dilayangkan kaisar kepada majelis tinggi hingga majelis rendah Jepang (Schlichtmann, 1995: 62-63).

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Shihadera dalam pelaksanaan tugasnya menjadi seorang perdana menteri di Jepang, ia berfokus bagaimana kembali membangun Jepang untuk menghadapi era baru setelah berakhirnya perang dunia II. Hal ini dilakukannya untuk membawa Jepang menuju dunia internasional dengan memperhatikan pembangunan kembali politik yang dianggap cocok diterapkan di Jepang. Perubahan besar yang diharapkan oleh Shihadera dalam politik pemerintahannya adalah arah politik yang “Memandang manusia”. Hal inilah yang menyebabkan ia membuat revisi konstitusi militer untuk meniadakan perang. Ia menganggap bahwa penyelesaian masalah yang dihadapi Jepang dalam hubungan internasional dan hubungannya dengan negara-negara lain dapat dilakukan dengan jalan damai. Perang adalah jalan terakhir yang akan ditempuh apabila Jepang terlibat konflik dengan negara lain.

BAB 17

SHIGERU YOSHIDA

1946-1947, 1948-1954

Kebijakan Doktrin Yoshida

Shigeru Yoshida lahir pada 22 September 1878 di Tokyo dan meninggal pada 20 Oktober 1967 di Ōiso, Jepang. Ia adalah pemimpin politik Jepang yang menjabat beberapa kali sebagai perdana menteri Jepang yang mana sebagian besar masa transisi kritis setelah Perang Dunia II, ketika pasukan sekutu menduduki negara itu dan Jepang sedang berusaha membangun institusi demokrasi baru. Setelah lulus dalam bidang hukum dari Universitas Kekaisaran Tokyo pada tahun 1906, Yoshida masuk ke kementerian luar negeri. Pada tahun 1928, dia diangkat menjadi menteri untuk Swedia, Norwegia, dan



Gambar 17.1. Shigeru Yoshida
Sumber: Encyclopedia Britannica,
2020af

Denmark dan kemudian menjadi wakil menteri luar negeri pada 1928 sampai 1930. Pada tahun 1936, tentara memveto pengangkatannya sebagai menteri luar negeri. Dia malah dijadikan duta besar untuk Inggris Raya dan bertugas sampai tahun 1939. Selama Perang Dunia II, upayanya untuk memaksa penyerahan Jepang awal menyebabkan penangkapannya pada bulan Juni 1945. Dia tidak dibebaskan sampai pendudukan sekutu pada bulan September 1945. Ia kemudian menjabat sebagai menteri luar negeri di Kabinet Shidehara Kijūrō yang dibentuk setelah penyerahan dirinya. Setelah ketua Partai

Liberal, Hatoyama Ichirō, dilarang oleh sekutu untuk berpartisipasi dalam politik, Yoshida mengambil alih kendali partai dan menggantikan jabatan perdana menteri pada tanggal 22 Mei 1946 (Encyclopedia Britannica, 2020af).

Pada awal masa pascaperang dunia ke 2, para pemimpin dunia perpolitikan di Jepang mulai berpikir keras untuk membangkitkan kembali Jepang dari masa kekalahan perang dunia. Hal terpenting yang perlu mereka lakukan saat itu bukanlah memikirkan bagaimana caranya merebut kembali tanah mereka dari kepemilikan pihak Amerika Serikat melainkan lebih mengutamakan mengenai sandang, pangan, dan papan bagi warganya yang telah menjadi korban. Hal ini secara nyata dapat kita lihat bahwa pada masa-masa awal pascaperang dunia ke 2, kebutuhan Jepang semuanya bergantung pada kebaikan hati Amerika Serikat yang mau memberikan mereka makanan dan bantuan moneter dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Jepang sangatlah banyak serta ditambah lagi dengan kembalinya para tentara yang ditarik dari beberapa ne-

gara di Asia membuat penambahan jumlah penduduk semakin banyak. Kondisi ini menimbulkan tingginya tingkat pengangguran pada saat itu. Oleh karena itu, Shigeru Yoshida yang menjabat sebagai petinggi partai politik kemudian terpilih untuk menjadi perdana menteri membuat suatu kebijakan untuk memperbaiki kembali Jepang agar seperti semula dengan cara merekonstruksi kembali perekonomiannya pada saat itu (Man, 2007: 119).

Kebijakan doktrin Yoshida ini sendiri sebenarnya di beri nama bukan oleh Yoshida sendiri melainkan oleh Masashi Nishihara pada tahun 1977 di mana dia merupakan seorang ahli terkemuka yang pada saat itu berusaha mendefinisikan konsistensi strategi pragmatis Jepang pada masa pascaperang dunia ke 2 (Sugita, 2016: 123). Pada awalnya doktrin Yoshida ini sempat dianggap tidak akan berhasil mengingat tujuan dari doktrin ini adalah memulihkan posisi Jepang dengan segala keterpurukan yang mereka sedang alami saat itu. Mereka menganggap bahwa pembangunan ekonomi hanya akan dibutuhkan pada masa depan untuk memperkuat otonomi negara. Kebijakan ini dianggap hanya sebagai siasat dari Amerika untuk terus menguasai Jepang. Namun Yoshida pada saat itu tetap gigih dengan kebijakan yang telah dibuatnya. Strategi besar yang mempunyai mekanisme sejalan dengan Amerika walaupun tidak harus saling beraliansi berusaha diwujudkan oleh Yoshida. Hal tersebut dilakukan dengan cara menandatangani perjanjian San Fransisco. Dalam perjanjian yang telah disepakati bersama antar dua negara tersebut, Jepang wajib memberikan pangkalan militer bagi Amerika untuk memberikan keamanan bagi Jepang yang dimana Jepang tidak memiliki kekuatan militer yang kuat untuk melindungi negaranya akibat hukuman dari Amerika yang melarang Jepang memperkuat militernya dan justru harus mengganti rugi kerusakan yang disebabkan pada masa perang dunia ke 2 akibat kekalahannya (Tellis, 2017: 84).

Dengan mekanisme yang dibuat oleh Yoshida dalam strategi yang dimilikinya, membuat mantan musuh Jepang pada masa perang dunia ke 2 justru membantu Jepang dalam jaminan keamanan ekonomi seperti misalnya dispensasi ekonomi, akses pasar di benua Barat, bantuan keuangan internasional dan transfer teknologi. Selain itu, Jepang juga mendapatkan perlindungan militer dari Amerika Serikat sehingga Jepang dapat fokus dalam membangun kembali perekonomiannya yang telah hancur. Maka dari itu, Yoshida tidak mau terlalu naif dalam memanfaatkan hubungannya dengan Amerika yang notabene merupakan musuhnya pada masa perang dulu karena dengan begitu, ekonomi negaranya dapat meningkat kembali dari masa resesi yang pernah terjadi. Hal ini dapat membuktikan bahwa Yoshida mampu mempertahankan dirinya dari kekuasaannya Amerika yang bersifat mendominasi dan justru memanfaatkan peluang yang dimilikinya untuk mewujudkan tujuan dari doktrin yang dibuatnya. Meskipun begitu, kubu sayap kiri masih terus menentang keputusan yang dibuat oleh Yoshida untuk mempercayakan keamanan militer negaranya kepada Amerika yang bisa jadi mereka akan kembali menindas Jepang (Tellis, 2017: 85).

Diplomasi Ekonomi Yoshida

Yoshida mampu memimpin kabinet dan memiliki banyak pengikut sekalipun ia memerintah secara otokratis. Hal ini disebabkan ia dapat memulihkan perekonomian Jepang dari masa krisis pasca Perang Dunia II. Kerja samanya yang dijalin dengan AS dan Eropa mendatangkan keuntungan bagi Jepang karena Yoshida ahli dalam melakukan diplomasi ekonomi sehingga negara-negara yang dulunya menjadi lawan berubah menjadi negara yang siap membantu perekonomian Jepang. Ia menjadi menteri luar negeri Jepang melalui sistem pemilihan umum. Karirnya di dunia politik sangat banyak. Selain sebagai

Menteri luar negeri, ia juga pernah menjadi diplomat di Inggris. Ia juga menjadi sekretaris jenderal di LDP dan selanjutnya menjadi ketua partai LDP. Kematangannya dalam dunia politik membuat Kaisar Showa menunjuk dirinya sebagai perdana Menteri.

Kaisar Showa menunjuk Yoshida untuk menjadi perdana menteri yang didasarkan pada konstitusi Meiji pada saat Yoshida telah menjadi menteri luar negeri Jepang selama tujuh bulan (Tozawa, 2013: 223). Sementara itu, muncul partai baru yaitu *Japanese Communist Party* (JCP) sebagai salah satu partai komunis non pemerintah terbesar di dunia. JCP memiliki program untuk membentuk masyarakat berdasarkan demokrasi, sosialisme, perdamaian dan oposisi terhadap militerisme. Partai Komunis Jepang (JCP), Nihon Jepang (atau Nippon) Kyōsantō, juga disebut Partai Komunis Jepang, partai politik kiri Jepang yang didirikan pada tahun 1922. Awalnya, partai tersebut dilarang, dan beroperasi secara sembunyi-sembunyi sampai setelah komando pendudukan Sekutu Perang Dunia II memulihkan kebebasan berserikat politik di Jepang. Partai itu didirikan secara resmi pada bulan Oktober 1945 (Encyclopedia Britannica, 2020l).

Japanese Communist Party (JCP)

Pada tahun 1949 JCP memenangkan 35 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah) dari Diet (legislatif) dan hampir 10 persen suara, tetapi tekanan eksternal dan internal begitu menghancurkan partai tersebut sehingga kehilangan semua kursinya dalam pemilihan umum tahun 1952. Pada tahun 1955, partai tersebut mengatur ulang dan mulai meningkatkan keanggotaan dan kursi di Diet yang mencapai puncaknya ketika memenangkan 39 kursi majelis rendah pada tahun 1979. Pada tahun 1980-an, partai tersebut rata-rata memperoleh antara 5 dan 10 persen suara dan rata-rata memperoleh suara sekitar 30 kursi di dalam ruangan. Pada tahun 1993 ia dikurangi menjadi hanya

15 kursi, dan pada tahun-tahun berikutnya ia mengubah kebijakannya menjadi partai sosialis demokratis yang lebih tradisional. Partai ini juga mengambil sikap yang kuat terhadap senjata nuklir. Meskipun partai ini menaikkan jumlah kursi menjadi 26 pada tahun 1996, dukungannya terkikis dalam pemilihan berikutnya, total kursinya turun di bawah 10 dalam pemungutan suara antara tahun 2003 dan 2012. Namun, partai tersebut mengalami kebangkitan kembali dalam pemilihan 2014, saat mengumpulkan 21 kursi. Nasib JCP mengikuti lintasan serupa di *House of Councilors* (majelis tinggi) dari Diet. Partai ini mencapai puncak 23 kursi setelah pemilu 1998 sebelum jatuh menjadi kurang dari 10 pada tahun 2004. Penampilan yang lebih kuat dalam kontes 2013 mendapat total kursi menjadi 11 (Encyclopedia Britannica, 2020l).

Pada saat proses untuk menyusun konstitusi Jepang, GHC (*general headquarters*) memberikan saran bahwa harus melakukan pemilihan umum untuk ke depannya. Aturan ini membuat Yoshida pada saat itu harus dipilih melalui Diet. Yoshida pun terpilih menjadi menteri luar negeri, tetapi partai yang menaunginya mengalami kekalahan dalam proses pemilihan tersebut. JCP yang menjadi partai terbesar saat itu yang memiliki 143 kursi mencoba menawari Yoshida untuk bergabung di dalamnya, tetapi Yoshida menolak hal tersebut dan dia menegaskan untuk berusaha membangun oposisi yang tangguh di dalam sistem partai (Tozawa, 2013: 224).

Perbaikan Hubungan dengan Negara-Negara di Asia Tenggara

Pada saat awal terpilih menjadi menteri luar negeri Jepang, Yoshida memiliki visi di mana Jepang haruslah menjadi negara komersial karena berhubungan dengan prinsip-prinsip liberal di dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Visi ini yang menjadikannya sebagai prioritas utama dalam perkembangan perekonomian Jepang, berga-

bung dalam sistem yang menganut sistem pasar bebas dalam perdagangan barat, tidak terlibat dalam suatu konflik apapun di luar negaranya, serta memegang teguh prinsipnya dalam hal demokrasi dan damai sesuai konstitusi pascaperang. Tidak mengikuti tekanan yang berasal dari kubu konservatif yang lebih nasionalis daripada politik sayap kiri, membangun interaksi seperti politik, birokrasi, maupun bisnis yang aman bagi negaranya (McDougall, 1988: 55).

Pada awalnya Yoshida doktrin yang digantikan dengan fukuda doktrin dimulai dari masa reparasi yang diwajibkan oleh Amerika kepada Jepang untuk memperbaiki semua fasilitas dan kehancuran yang terjadi pada pasca perang dunia ke-2 pada saat disepakatinya perjanjian *San Fransisco Conference*. Mulai dari situ, Jepang mulai saling berhubungan dengan berbagai negara penerima reparasi seperti salah satu contohnya adalah Indonesia yang meminta pembayaran untuk reparasi sebanyak 17,5 miliar USD, adapun Filipina yang meminta ganti rugi sebesar 8 miliar USD. Kondisi ini membuat Yoshida lebih mengutamakan untuk membangun perekonomian negaranya agar mampu membayar semua biaya ganti rugi pasca perang dunia ke-2 yang di tanggunginya dibandingkan dengan memperkuat keamanan militernya. Dari sinilah hubungan antara Jepang dan Asia Tenggara yang awalnya hanya sebatas keterkaitan dalam kebijakan reparasi perang. Pada tahun 1950an Jepang mengalami kesulitan dalam hal perdagangan di pangsa pasar China sehingga membuat pemerintah Jepang perlahan-lahan mulai melirik Asia Tenggara untuk sebagai penyedia bahan mentah sekaligus sebagai pasar untuk hasil produksinya. Namun pada saat yang sama Amerika Serikat yang turut andil dalam perang Vietnam dulu hingga pada masa berakhirnya perang Vietnam dan disepakatinya *ASEAN summit conference* yang membuat Jepang keluar dari wilayah Asia Tenggara membuat pemerintah Jepang pada masa itu mengambil keputusannya untuk mengubah kebijakan Jepang di mana yang awal-

nya bergantung seutuhnya dengan Amerika menjadi berhubungan baik dengan Asia Tenggara untuk mendapatkan hubungan baik antara satu sama lainnya. Hal ini di sampaikan dalam pidato yang dibacakan oleh menteri luar negeri Takeo Fukuda di Manila. Doktrin fukuda ini dibuat untuk menjadi landasan kebijakan Jepang yang perlahan-lahan lebih diarahkan ke kawasan Asia Tenggara dengan mendorong Jepang untuk dapat memainkan perannya dalam politik menjadi lebih aktif di kawasan tersebut. Dari sinilah fase baru mulai dimasuki antara Jepang dan negara-negara di Asia Tenggara di bawah kepemimpinan menteri luar negeri Jepang yang baru dan doktrin lama yang digunakan oleh Shigeru Yoshida digantikan (Purbantina, 2013: 41).

BAB 18

HITOSHI ASHIDA

1948

Penjara Senju

Hitoshi Ashida adalah seorang politisi birokrasi Jepang yang terkemuka dalam lanskap politik pascaperang dan menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada 10 Maret 1948 sampai 15 Oktober 1948 dan ia berasal dari Partai Liberal Demokratik. Hitoshi Ashida lahir pada tanggal 15 November 1887 di Fukuchiyama, Japan dan meninggal di usianya yang ke 71 tahun pada tanggal 20 Juni 1959 di Tokyo, Japan (Mimir, 2019).

Hitoshi Ashida memulai karirnya setelah lulus dari Sekolah Hukum Universitas Tokyo pada tahun 1912, dan kemudian ia memasuki

kementerian luar negeri pada tahun 1932 dan terpilih sebagai Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1932 dan sekaligus juga menjabat sebagai Presiden Japan Times pada periode 1933 sampai 1940. Dia menulis “Sejarah Diplomasi Dunia Terbaru” dan “Sejarah Diplomasi Perang Dunia II” yang berisi penjelasan mengenai penyebab Perang Dunia II

dengan berbekal pemahaman dari sejarah hubungan diplomatik setelah perang. Dalam kariernya di dunia politik, dia juga pernah menjabat sebagai presiden partai demokrat Jepang pada tahun 1947 dan menjadi wakil perdana menteri dan menteri luar negeri kabinet Satoshi Katayama (Mimir, 2019).



Gambar 18.1. Hitoshi Ashida
Sumber: Mimir, 2019

Pada masa jabatannya sebagai seorang perdana menteri pada tahun 1948, ia mengatur tentang apa yang disebut kabinet tengah. Akan tetapi, hanya dalam tujuh bulan saja seorang Hitoshi Ashida menjabat sebagai perdana menteri karena ia dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya akibat peristiwa penjara senju yaitu suatu skandal korupsi yang menargetkan dua menteri kabinetnya. Peristiwa ini dikenal dengan penjara senju yang mana merupakan kasus dimana sebuah perusahaan pupuk kimia Showa Denko yang melakukan suap besar ke dunia politik Jepang dengan tujuan untuk menerima pinjaman dari keuangan rekonstruksi yang aman (History, 2019c).

Rekonstruksi keuangan yang aman ini merupakan sebuah institusi keuangan jangka panjang pemerintah yang didirikan pada tahun 1947 setelah perang dunia kedua. Pinjaman pemerintah penuh memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan kembali dengan metode produksi gradien yang mana pemerintah mendanai terutama pada industri inti seperti batubara, baja dan tenaga listrik. Namun, ka-

rena sebagian besar dana bergantung pada penerbitan obligasi pembiayaan rekonstruksi dan penjaminan emisi BOJ, mereka mengundang (pengembalian inflasi) dan menghentikan pemberian pinjaman karena penerapan Garis Dodge pada tahun 1949 yang diserap oleh Bank Pembangunan Jepang pada tahun 1952 (History, 2019c).

Pada Juni 1948, sebanyak 44 orang termasuk Mr.Hirano, Perdana Menteri Hitoshi Ashida, Wakil Perdana Menteri Nishio Suehiro dan kabinetnya didakwa atas skandal korupsi ini. Akhirnya Hitoshi Ashida mengundurkan diri dan pensiun dari posisinya sebagai Perdana Menteri Jepang dan Partai Demokrat Jepang pada 15 Oktober 1948. Selanjutnya jabatan Perdana Menteri dilanjutkan oleh Shigeru Yoshida. 10 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1958, semua menteri termasuk Perdana Menteri Hitoshi Ashida terbukti tidak bersalah dalam kasus korupsi tersebut (History, 2019c).

BAB 19

ICHIRO HATOYAMA

1954-1956

Penggabungan Dua Partai Konservatif

Ichiro Hatoyama merupakan salah satu perdana menteri Jepang pasca Perang Dunia II yang menjabat pada tanggal 12 Desember 1954-23 Desember 1956. Ichiro Hatoyama lahir pada tanggal 1 Januari 1883 dan wafat pada tanggal 7 maret 1959. Ichiro Hatoyama lahir dari keluarga kosmopolitan yang kaya, ayahnya adalah lulusan Yale University dan ibunya adalah seorang penulis terkenal dan pendiri perguruan tinggi wanita. Hatoyama berasal dari Partai Liberal Demokratik. Ichiro Hatoyama memulai karirnya di dunia politik ketika terpilih menjadi anggota parlemen Jepang pada tahun 1915 sebagai anggota partai yang



Gambar 19.1. Ichiro Hatoyama
Sumber: Fandom, 2020a

dominan. Setelah itu, ia terpilih menjadi pejabat partai terkemuka dan pada tahun 1931 ia diangkat menjadi menteri pendidikan (Encyclopedia Britannica, 2020g).

Banyak kebiasaan Hatoyama yang tidak disukai oleh anggota parlemen Jepang yang lain, terutama di bidang militer sehingga ia terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya. Saat itu ia mulai menghabiskan waktunya dengan ikut berperang sampai setelah perang berakhir pada September 1945 (Nakajima, 2006). Ichiro Hatoyama mulai mereorganisasi Partai Liberal

sebagai penerus Seiyukai. Setelah tahun 1946 Ichiro Hatoyama akan menjabat sebagai perdana Menteri, namun Amerika pada saat itu menentang keinginan Hatoyama untuk memegang jabatan politik apapun. Pada akhirnya Hatoyama diizinkan untuk duduk di kursi parlemen setelah adanya perjanjian damai antara Jepang dengan negara-negara Barat pada tahun 1952. Pada November 1954 Ichiro Hatoyama mengorganisir partai baru yaitu Partai Demokrat (Encyclopedia Britannica, 2020g).

Pada saat itu Ichiro Hatoyama memaksa Yoshida Shigeru mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada bulan Desember 1954. Hatoyama menggantikannya, karena perdana menteri saat itu dianggap tidak memiliki kekuatan yang mayoritas, sehingga Hatoyama memiliki inisiatif untuk menggabungkan dua partai konservatif yaitu Liberal dan Demokratik menjadi Partai Liberal Demokratik baru (Nakajima, 2006: 106). Sebagai perdana menteri, Hatoyama adalah politisi Jepang pertama yang memanfaatkan media radio dan televisi dalam berkampanye. Ia berhasil meningkatkan hubungan antara Jepang dan negara-negara Asia (Encyclopedia Britannica, 2020g).



Gambar 19.2. Pulau Shikotan dan Habomai
 Sumber: Dikarna & Aini, 2019

Permasalahan Kepulauan Kuril

Ichiro Hatoyama melakukan pertemuan kabinet pertama pada 10 Desember 1954, dalam konferensi pers ia menyatakan keinginannya untuk meningkatkan hubungan antara Jepang dengan Uni Soviet dan komunis China untuk memperluas hubungan perdagangan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perang (T. Tanaka, 1993: 67). Pada saat itu, Jepang juga berusaha untuk menormalkan kembali hubungannya dengan Uni Soviet dengan mengesampingkan masalah territorial. Berkat usaha dan kerja keras Ichiro Hatoyama dalam melakukan negosiasi dengan Uni Soviet, akhirnya kedua negara ini berhasil menandatangani deklarasi bersama untuk membangun kembali hubungan diplomatik. Walaupun masalah territorial sepenuhnya

tidak terpecahkan tetapi dengan adanya deklarasi bersama maka Pulau Habomai dan Shikotan akan dikembalikan ke Jepang tepat ketika perjanjian damai antara Jepang dan Uni Soviet disepakati (T. Tanaka, 1993: 90).

Shikotan atau dikenal dengan nama Pulau Shpanberg adalah salah satu pulau besar di Kepulauan Kuril. Letaknya berada di sebelah timur lepas pantai Semenanjung Nemuro, Hokkaido, Jepang. Pulau ini terletak paling selatan di Kepulauan Kuril yang diklaim Jepang sebagai wilayah Jepang. Pegunungan dan perbukitan yang landai menjadi salah satu ciri dari topografi pulau ini. Pulau ini memiliki dua desa yaitu Malokurilskoye atau desa Shikotan atau Shakotan, dan Krabozavodskoye atau desa Anama. Setelah Perang Dunia II, Kepulauan Kuril Selatan menjadi bagian dari Uni Soviet. Namun Jepang menentang kepemilikan Iturup, Kunashir, Kepulauan Shikotan, dan Kepulauan Habomai. Berdasarkan Deklarasi Bersama yang disepakati pada 1956, Uni Soviet setuju untuk menyerahkan Kepulauan Shikotan dan Habomai. Namun pada 1960, Jepang menandatangani perjanjian keamanan dengan AS. Hal itu membuat Soviet membatalkan niatnya untuk menyerahkan Shikotan dan Habomai kepada Jepang. Saat itu, Soviet menyatakan hanya akan memberikan pulau-pulau tersebut kepada Jepang ketika semua pasukan asing ditarik dari wilayahnya (Dikarna & Aini, 2019). Sampai saat ini, sengketa atas kedua pulau ini belum menemukan kata sepakat. KTT G20 yang dilaksanakan di Osaka, Jepang pada tahun 2019 tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Rusia bahkan menuduh Jepang telah menyalahgunakan fungsi kursi G20 karena telah memajukan klaim teritorial tanpa sepengetahuan pihak Rusia.

Ichiro Hatoyama di masa pemerintahannya juga menganjurkan perlunya persenjataan kembali dan menekankan bahwa Jepang harus ikut berpartisipasi dalam mekanisme pertahanan kolektif yang diciptakan oleh negara-negara demokratis. Ichiro Hatoyama menganggap

bahwa hubungan keamanan bilateral memiliki kepentingan yang relative (Nakajima, 2006: 107). Selain membangun kembali hubungan diplomatik antara Jepang dan Uni Soviet, salah satu pencapaian terbesar Ichiro Hatoyama yang lain di masa jabatannya adalah dengan mendukung pembebasan bersyarat untuk beberapa penjahat perang kelas A yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ichiro Hatoyama terus bekerja untuk memperkuat kemandirian politik dan ekonomi Jepang melalui berbagai kebijakan politik termasuk dalam pembentukan UU Investigasi Konstitusi, dan Hukum Susunan Dewan Pertahanan Nasional. Pada tahun 1956, Ichiro Hatoyama memutuskan untuk pensiun dari jabatannya dan di gantikan oleh Tanzan Ishibashi (Fandom, 2020b).

Deklarasi Bersama Jepang-Uni Soviet

Ichiro Hatoyama merupakan Perdana Menteri Jepang pada tahun 1954 sampai 1956 yang merupakan pengganti Yoshida Shigeru. Sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang, Ichiro Hatoyama pernah menjadi menteri pendidikan tepatnya pada kabinet Inukai dan Saito. Selain itu, ia juga pernah menjadi bagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa pemerintahan Rikken Siyukai pada tahun 1915.

Pada saat menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang, Ichiro Hatoyama berhasil menandatangani Deklarasi Bersama di Kota Moskow. Dimana tujuan dari penandatanganan ini adalah untuk menormalkan kembali hubungan antara Jepang dan Uni Soviet yang akhirnya menghentikan perang yang terjadi antara kedua negara tersebut yang telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun. Perlu waktu setengah tahun bagi kedua negara untuk menyelesaikan Deklarasi Bersama tersebut. Penyebab utama berlarut-larutnya perundingan ini adalah sulitnya menyelesaikan persoalan teritorial. Penandatanganan Deklarasi

tersebut merupakan awal dari hubungan diplomatik antara Jepang dan Uni Soviet pasca perang (T. Tanaka, 1993: 90).

Perubahan dalam kepemimpinan politik Jepang setelah dipimpin oleh Ichiro Hatoyama menimbulkan kecemasan tersendiri bagi Amerika Serikat yang berpikir bahwa pemerintahan Jepang yang baru akan menghalangi kepentingan ekonomi dan keamanan AS di Jepang karena kecenderungan Jepang yang mulai mendukung peningkatan perdagangan antara Jepang dengan negara-negara komunis. Tepat setelah pelantikan sebagai perdana menteri Jepang yang baru, Ichiro Hatoyama mengumumkan keinginannya kepada publik untuk kembali bekerja sama dengan Uni Soviet. Namun sebenarnya, Ichiro Hatoyama mengeluarkan kebijakan tersebut yaitu karena kepentingan domestik. Salah satunya yaitu Jepang ingin merebut kembali wilayah teritorial yang pernah dirampas oleh Uni Soviet yaitu Pulau Habomai dan Shikotan. Mengenai masalah teritorial tersebut, memorandum Jepang berupaya untuk mencegah segala sesuatu mengenai perjanjian kerja sama antara Jepang dan Uni Soviet agar tidak bertentangan dengan perjanjian damai San Fransisco. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Ichiro Hatoyama mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat apabila benar kebijakan tersebut sesuai dengan isi Perjanjian Damai San Fransisco. Dukungan Amerika Serikat ini hanya berlaku apabila wilayah yang diklaim oleh Amerika Serikat bukanlah bagian dari Kuril karena Habomai dan Shikotan tidak dianggap sebagai bagian dari mereka (T. Tanaka, 1993: 67).

Mulai dari Februari 1956 hingga akhir Mei 1956, Pemerintah Jepang terlibat dalam merumuskan pedoman umum untuk negosiasi dengan Uni Soviet. Hatoyama memberikan tugas kepada penasihat kebijakan luar negerinya untuk menyelesaikan pedoman mengenai kebijakan tersebut. Beberapa pihak pada saat itu ingin menunda kemajuan mengenai perundingan tersebut sampai hasil konferensi Jenewa pada

bulan Juli 1956 menjadi Jelas (T. Tanaka, 1993: 77). Ichiro Hatoyama tidak tergoyahkan, sebaliknya pada saat itu ia mencoba memanfaatkan Aide-Memoire. Ia secara persuasif menegaskan bahwa Jepang harus menormalkan hubungannya dengan Uni Soviet dengan mengesampingkan masalah yang pernah ada, ini semua karena Jepang telah mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat mengenai klaim wilayah tersebut (T. Tanaka, 1993: 90).

Hatoyama mengunjungi Moskow dan memulai negosiasi pada 19 Oktober 1956. Selama pembicaraan di Moskow, Hatoyama berhasil menandatangani deklarasi bersama untuk membangun kembali hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut. Namun, masalah teritorial tidak sepenuhnya terpecahkan, tetapi Deklarasi Bersama menyatakan bahwa Pulau Habomai dan Shikotan akan dikembalikan kepada Jepang ketika Perjanjian Damai antara Jepang dan Uni Soviet disepakati (T. Tanaka, 1993: 90). Keadaan di atas memberi gambaran mengenai keberhasilan diplomasi Jepang dibawah pemerintahan Ichiro Hatoyama dalam menghadapi Uni Soviet. Hatoyama berhasil menjalin hubungan baik dengan Uni Soviet.

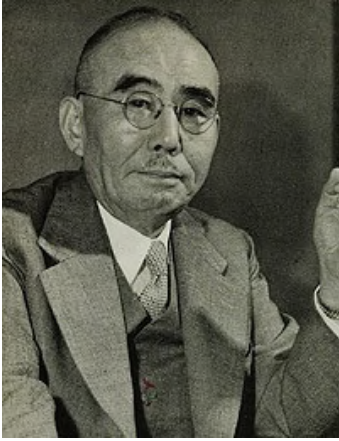
BAB 20

ISHIBASHI TANZAN

1956-1957

Kebijakan Dalam dan Luar Negeri

Ishibashi Tanzan lahir pada 25 September 1884 di Tokyo dan meninggal 25 April 1973 di Tokyo. Ia seorang politikus, ahli ekonomi, dan jurnalis yang menjadi perdana menteri Jepang dari Desember 1956 hingga Februari 1957. Ia putra seorang pendeta Buddha sekte Nichiren. Ishibashi belajar filsafat dan lulus dari Universitas Waseda kemudian memasuki bidang jurnalisme. Dia bergabung dengan *Tōyō Keizai Shimpō*, majalah mingguan tentang ekonomi, dan dikenal karena komentarnya yang blak-blakan tentang urusan ekonomi. Pada tahun 1934, Ishibashi mulai menerbitkan majalah berbahasa Inggris,



Gambar 20.1. Ishibashi Tanzan
Sumber: *Modern Japanese Historical Figures*, 2019a

the Oriental Economist, dan pada tahun 1939 menjadi presiden majalah tersebut. Ia menjabat sebagai penasihat berbagai badan ekonomi pemerintahan dan pada tahun 1946 menjadi menteri keuangan di Kabinet Perdana Menteri Yoshida Shigeru. Pada tahun 1947 hingga 1951, ia tidak memenuhi syarat untuk jabatan publik karena arahan pendudukan sekutu berdasarkan aktivitas jurnalistiknya selama Perang Dunia II (Encyclopedia Britannica, 2020k).

Meskipun kesehatannya buruk, ia menjadi presiden Asosiasi Persahabatan Jepang-Soviet pada 1960 dan Asosiasi Promosi Perdagangan Internasional Jepang. Dia mengunjungi Rusia dan Eropa pada tahun 1964 untuk mempromosikan perdagangan. Pada tahun 1959, ia mengunjungi China dan kembali ke sana pada tahun 1963 sebagai ketua pameran perdagangan Jepang. Dia menganjurkan perjanjian perdamaian multilateral antara Jepang, Amerika Serikat, Cina, dan Uni Soviet, tetapi kebijakannya yang semakin progresif membuatnya tidak populer dengan Partai Liberal-Demokrat, dan dia dikalahkan dalam tawaran pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1963 (Encyclopedia Britannica, 2020k).

Sekalipun Ishibashi aktif di level internasional, namun selama menjabat jadi perdana menteri, ia hanya sekali ke luar negeri, ke Singapura. Ia belajar filsafat di Universitas Waseda pada tahun 1907. Ia terjun ke dunia jurnalistik saat masih muda, tetapi kehilangan pekerjaan pertamanya karena ia lupa tugas beritanya ketika menulis esai tentang self destruction. Akhirnya dia tidak hanya menulis untuk *Ekonom Timur* tetapi juga menjadi pemilik tahun 1939. Peran Ishibashi sebagai seorang ekonom dan penerbit membawa dia lebih dekat ke kehidupan

publik, meskipun dia tidak pernah mencari jabatan. Seperti yang telah disebutkan diatas, pada Mei 1946, ia diangkat menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Perdana Menteri Shigeru Yoshida (NewYorkTimes, 1973).

BAB 21

NOBUSUKE KISHI

1957-1960

Perjalanan Karir Politik

Nobusuke Kishi merupakan seorang perdana menteri Jepang yang menjabat selama tiga tahun 128 hari (31 Januari 1957-19 juli 1960). Nobusuke Kishi lahir dengan nama asli Sato Nobusuke di Prefektur Yamaguchi pada 13 November 1896. Ia lahir dan diadopsi oleh kakak laki-laki ayahnya yang bernama Kishi. Ia meninggal dunia di umur 90 tahun tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1987. Ia menjadi perdana menteri setelah bergabung dengan Partai Demokratik Liberal (LDP) yang mana pada saat itu partai ini merupakan partai terbesar di Jepang (Encyclopedia Britannica, 2020n).



Gambar 21.1. Nobusuke Kishi
Sumber: Encyclopedia Britannica, 2020n

Perjalanan kariernya di dunia politik Jepang terus menanjak. Sebelum menjabat sebagai perdana menteri, ia terlebih dahulu mengawali kariernya dengan menjadi seorang pegawai negeri di Kementerian Pertanian dan Perdagangan. Tahun 1936, ia bertanggung jawab atas pengembangan industrialisasi Manchuria yang diakuisisi oleh Jepang. Setelah itu, di tahun 1941 ia bergabung di bawah kabinet Hideki Tejo dan menjabat sebagai menteri perdagangan dan industri. Selama menjabat sebagai menteri perdagangan dan industri,

Nobusuke Kishi memiliki peran penting dalam mengelola pengadaan militer di saat perekonomian Jepang melemah. Pada tahun 1944, ia menentang kebijakan Tejo untuk melanjutkan perang dengan segala cara, karena penentangan ini pemerintahan Tejo akhirnya runtuh dan mengakibatkan dirinya harus mendekam dipenjara selama kurang lebih tiga tahun. Ia dibebaskan pada tahun 1948 tanpa pengadilan. Tahun 1953, ia bergabung dalam partai Demokratik Jepang dan menjadi salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berperan penting untuk membentuk Partai Liberal Demokratik (LDP) di tahun 1955. Ia menjadi menjadi menteri Luar negeri pada kabinet Tanzan Ishibashi (Encyclopedia Britannica, 2020n).

Kerja Sama Keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat

Pada saat Tanzan Ishibashi jatuh sakit, Nabosuke Kishi akhirnya menggantikan posisinya sebagai perdana menteri Jepang pada Februari 1957. Saat Nabosuke menjabat sebagai perdana menteri, ia sangat menekankan hubungan Jepang dan Amerika Serikat harus terjalin dengan baik sehingga salah satu kebijakan yang dikeluarkan di masa ja-

batannya ialah membangun ulang kerja sama keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat (Encyclopedia Britannica, 2020n).

Kekalahan yang diterima Jepang mengharuskan dibubarkannya militer Jepang. Kemudian pada tahun 1951 lahir perjanjian *Treaty of Francisco* yang memberikan pemulihan kedaulatan untuk Jepang. Meskipun demikian, Jepang merasa perjanjian tersebut kurang menguntungkan bagi negaranya karena adanya perjanjian tersebut menyebabkan Jepang tidak bisa membentuk kekuatan militer lagi, sehingga perjanjian ini sangat merugikan bagi negara Jepang (Beckley, Horiuchi, & Miller, 2018: 3). Pada tahun 1956, Hatoyama Ichiro yang menjabat sebagai perdana menteri waktu itu, mencoba untuk membangun hubungan diplomatik dengan Uni Soviet sehingga sempat timbul ketegangan antara Amerika Serikat dan Jepang (Beckley et al., 2018:4).

Ketegangan yang sempat terjadi kembali, tentunya membuat Nobusuke Kishi khawatir akan adanya ancaman bagi keamanan negaranya, sehingga dibuat perjanjian yang dianggap akan saling menguntungkan keduanya yaitu *Treaty of Mutual Cooperation and Security* yang isinya kedua negara berjanji untuk mencegah serangan bersenjata dan diharapkan akan memadamkan kerusuhan internal skala besar dan juga akan bersikeras untuk menjaga keamanan Internasional dan terus menjalin kerja sama untuk memperoleh kedamaian antar negara. Selain itu, perjanjian tersebut juga disertai dengan kepentingan Jepang dalam bidang ekonomi (US Embassy, 2019).

Kerja Sama Ekonomi antara Jepang dan Amerika Serikat

Hasil dari kesepakatan yang diperoleh Nobusuke Kishi dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi ialah adanya pinjaman yang diberikan oleh Amerika Serikat dengan bunga yang rendah. Ia menye-

tujui kesepakatan ini dikarenakan Jepang pernah mengalami kelangkaan modal yang diperlukan untuk investasi domestik. Bantuan dana yang diberikan ini diharapkan akan mendorong peningkatan investasi di Jepang. Sementara itu, Amerika Serikat berjanji akan menahan diri untuk tidak menekan Jepang dalam pengembangan militer. Kesepakatan ini memungkinkan Jepang untuk meminimalkan pengeluaran negara. Amerika Serikat juga berjanji akan membantu untuk mempromosikan ekspor Jepang. Untuk menindaklanjuti kesepakatan ini, Amerika Serikat aktif dalam membantu peningkatan pengeksporannya sehingga keuntungan yang diperoleh Jepang semakin tinggi (Beckley et al., 2018: 5-6).

Namun, pada saat Nobusuke Kishi berjuang untuk menjaga keamanan negaranya, rakyat Jepang sangat menentang kebijakan yang dikeluarkan ini. Mereka menganggap kebijakan yang dikeluarkan melanggar kedaulatan nasional negara dan akan menjadikan Jepang sebagai negara otoriter. Awal tahun 1960an, kelompok pelajar, buruh sosialis dan komunis bergabung untuk melakukan demonstrasi penolakan dari kebijakan Nobusuke Kishi. Akhirnya, kebijakannya menciptakan gangguan politik terbesar yang dialami Jepang. Kemudian, pada 23 Juli 1960 ia mengumumkan pengunduran dirinya (Beckley et al., 2018: 7).

Kebijakan Memodernisasi LDP

Pemaparan di atas telah menceritakan mengenai kehidupan Nobusuke Kishi secara umum. Nobusuke Kishi merupakan seorang perdana menteri yang menjabat pada 31 Januari 1957 hingga 19 Juli 1960. Perjalanan karier Nobusuke Kishi selama terjun di dunia politik di Jepang tidaklah mudah. Banyaknya masalah dan rintangan yang ia hadapi selama menjabat utamanya dalam pengambilan kebijakan yang menurutnya akan menguntungkan dan menyejahterakan rakyatnya nyatanya di pandang buruk oleh rakyatnya sendiri hingga akhir per-

jalanannya ia masih dinilai buruk oleh rakyat Jepang sendiri (R. Eldridge, 2020).

Selama menjabat sebagai perdana menteri, Nobusuke Kishi yang kebijakannya berfokus untuk membangun hubungan diplomatik dengan negara lain akhirnya bisa membawa Jepang sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1959, Jepang bisa menjadi Dewan Ekonomi dan Sosial di PBB. Nobusuke Kishi juga memberikan fondasi yang kuat terhadap Partai Demokratik Liberal yang melatarbelakangi karier Politikanya. Partai tersebut awalnya terbentuk karena adanya komitmen kuat diantara para anggota yang menginginkan pertumbuhan ekonomi dibangun selama era kepemimpinan Nobusuke Kishi. Komitmen ini tentunya didukung dengan sifat ambisius yang dimiliki oleh Nobusuke Kishi sehingga ia dapat memodernisasi LDP dan membangun daya tarik agar dapat dicintai oleh rakyatnya. Adanya dukungan dari stabilitas partainya, Nobusuke Kishi akhirnya semakin terdorong untuk mengeluarkan kebijakan yang dilandasi dengan pro Barat (Samuels, 2001).



Gambar 21.2. Perdana Menteri Nobusuke Kishi menampilkan perjanjian keamanan Amerika Serikat-Jepang setelah upacara penandatanganan di Gedung Putih pada 9 Januari 1960
Sumber: R. Eldridge, 2020

Selama menjabat sebagai perdana menteri, Nobusuke Kishi berfokus untuk mengubah atau merevisi perjanjian keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat dan juga membangun perekonomian di Jepang setelah perang Dunia II. Nobusuke Kishi berpendapat bahwa menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat tentunya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan negaranya. Keinginannya ini tercermin dalam kebijakan domestik yang diterapkannya dengan membuat “Rencana Ekonomi Jangka Panjang Baru” yang diawali dengan penerimaan pinjaman dari Amerika Serikat yang akan digunakan untuk membangun lapangan kerja di Jepang yang diharapkan dapat menciptakan peningkatan standar hidup bagi masyarakat Jepang (LDP, 2019).

Kerja Sama dengan Indonesia

Dana pinjaman tersebut rencananya akan digunakan Jepang untuk membantu membayar reparasi kerugian di Indonesia akibat penjajahan yang pernah dilakukannya. Pembiayaan reparasi untuk Indonesia ini bukan hanya didasari dengan penyesalan tetapi akan dijadikan langkah awal terjalannya hubungan kerja sama diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan harapan suatu hari nanti Nobusuke Kishi dapat menjadikan Jepang sebagai negara yang ekonominya dapat memengaruhi negara-negara di kawasan Asia Tenggara (LDP, 2019).

Sementara itu, perjanjian tersebut dianggap memiliki ketimpangan bagi negara Jepang selepas kekalahan yang diperoleh Jepang pada saat Perang Dunia II. Kebijakannya ini tentunya didasari dengan keinginan untuk memperbaiki ketidakadilan yang diterima Jepang karena keberadaan perjanjian itu mengakibatkan Jepang tidak memiliki kekuatan militer dan pertahanan yang kuat. Isi dari perjanjian tersebut menjelaskan bahwa Jepang dilarang memiliki unsur militeristik dan tidak diizinkan membentuk kekuatan militer baik darat ataupun

udara. Tentunya ini akan menunjukkan bahwa Jepang menjadi negara yang pertahanannya lemah di bawah kendali Amerika Serikat sehingga perlu untuk merevisi perjanjian yang ada. Sementara itu, dasar dari suatu negara yang kuat apabila kekuatan militer negara tersebut dapat menjamin keamanan dan pertahanan negaranya. Pada 19 Juni 1960, perjanjian tersebut bisa di ratifikasi dengan terbentuknya “*Treaty of Mutual Cooperation and Security*” yang dapat menjadikan langkah awal bangkitnya kekuatan militer dari Jepang (Beckley et al., 2018: 5).

BAB 22

HAYATO IKEDA

1960-1964

Kebijakan Deflasi

Hayato Ikeda lahir pada tahun 1899. Ia berasal dari keluarga pembuat *sake* (minuman keras). Pada tahun 1925, Ikeda menyelesaikan studinya di Universitas Kyoto dan mengambil jurusan hukum. Sebelum terpilih menjadi perdana menteri Jepang, Ikeda memiliki riwayat jabatan menteri seperti wakil menteri keuangan pada tahun 1947 sampai 1948. Kemudian menjadi menteri keuangan dalam pemerintahan Yoshida Shigeru pada tahun 1949 hingga 1952. Setelah itu, Ikeda menjadi menteri perdagangan luar negeri dan industri sejak tahun 1959 sampai 1960 (Encyclopedia Britannica, 2020j).



Gambar 22.1. Hayato Ikeda
Sumber: Encyclopedia Britannica,
2020j

Ikeda berusaha menstabilkan ekonomi yang dilanda inflasi dengan kebijakan deflasi yang kuat yang direkomendasikan oleh Joseph Dodge, seorang bankir Detroit yang dikirim oleh pemerintah AS untuk mempelajari kesulitan ekonomi di Jepang. Pengejaran Ikeda atas “pembiayaan seimbang” terbantu setelah tahun 1950 oleh kontrak militer AS yang terkait dengan Perang Korea. Di bawah Perdana Menteri Yoshida, Ikeda memainkan peran utama dalam negosiasi perjanjian damai dengan Amerika Serikat. Pada bulan Oktober 1952, ia menjadi menteri perdagangan dan industri internasional, dan sebagian besar sisa dekade itu ia menjadi menteri keuangan atau perdagangan inter-

nasional, atau menteri tanpa portofolio. Dia juga menjabat sebagai sekretaris jenderal Partai Liberal (kemudian Partai Liberal-Demokrat) dan sebagai ketua komite penelitian urusan politik partai (Encyclopedia Britannica, 2020j).

Ketika Kishi Nobusuke mengundurkan diri pada Juli 1960, Ikeda menjadi presiden partai dan memulai empat tahun sebagai perdana menteri sejak 14 Juli 1960. Dengan tujuan menggandakan pendapatan nasional Jepang dalam 10 tahun, Ikeda meluncurkan kebijakan pertumbuhan ekonomi tingkat tinggi berdasarkan pengeluaran sektor publik yang diperluas, pengurangan pajak, dan upaya untuk menjaga inflasi dan suku bunga tetap rendah. Dia berusaha keras untuk mendobrak hambatan perdagangan barang Jepang di pasar luar negeri. Ikeda mempertahankan profil rendah dalam urusan luar negeri. Ia terus membina hubungan dekat dengan Amerika Serikat dalam masalah ekonomi dan keamanan. Ia juga mendukung perluasan hubungan

perdagangan dengan Uni Soviet dan China. Ikeda mengundurkan diri pada November 1964 karena kesehatan yang buruk (Encyclopedia Britannica, 2020j).

Perjanjian Keamanan Jepang-AS

Pemerintahan Perdana Menteri Ikeda diwarnai oleh “politik dialog” (*hanashiai no seiji*) dan “modernisasi partai” (*to kindaika*) dilakukan dengan semangat “toleransi dan kesabaran” (*kanyo to nintai*). Kebijakannya berpusat pada promosi aktif pertumbuhan ekonomi yang secara mencolok dilambangkan dengan “Rencana Penggandaan Pendapatan” dan upaya untuk menggerakkan ekonomi ke arah keterbukaan internasional yang lebih besar (Lib Dems, 2019b).

Masa jabatannya diwarnai dengan keadaan ekonomi yang terus membaik. Ikeda berusaha menjalin kerjasama dengan AS yang melahirkan Perjanjian Keamanan Jepang-AS. Meskipun demikian, perjanjian tersebut membuat masyarakat menjadi khawatir akan kredibilitas Jepang di luar negeri. Oleh karena itu, Ikeda sangat berhati-hati dalam menjalin kerjasama tersebut terutama dalam melibatkan partai-partai oposisi dalam dialog karena akan memberikan dampak negatif di Diet. Kebijakan Ikeda menghasilkan kestabilan politik dalam negeri terutama tidak adanya konflik dengan partai oposisi.

Golden Sixties

Selama periode ini, Jepang diberkahi dengan tenaga kerja yang berlimpah dan sangat terampil, membuat kemajuan substansial dalam inovasi teknologi, dan mampu memanfaatkan harga internasional yang stabil dan murah untuk sumber daya alam yang dianggap penting. Jika digabungkan dengan vitalitas yang meluap dari masyarakat Jepang pada umumnya, kondisi pertumbuhan selama “Golden Sixties” (*Ogon no*

Rokuju Nendai) sangat ideal. Pemerintahan Ikeda dan LDP sepenuhnya memahami pentingnya perkembangan ini dan mampu merumuskan kebijakan efektif yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat (Lib Dems, 2019b). Kebijakan Ikeda dengan program “*income doubling plan*” berhasil membuat perekonomian Jepang menjadi dua kali lipat untuk produk nasional brutonya. Standar kehidupan masyarakat Jepang terus meningkat. Pengangguran berkurang dan disparitas pendapatan semakin kecil di masyarakat Jepang.

Ikeda menerapkan tiga pilar untuk mendukung pembangunan ekonominya, yaitu 1) pemotongan pajak, (2) jaminan sosial, dan (3) investasi publik, energi laten di dalam sektor swasta diaktifkan secara terampil (Lib Dems, 2019b). Kebijakan ini menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat sehingga standar hidup masyarakat Jepang terus meningkat dan konfrontasi politik tidak pernah terjadi. Stabilitas politik terus berlanjut di era Ikeda dan LDP memperoleh dukungan yang besar dengan memperoleh kemenangan dalam pemilihan anggota dewan pada Juli 1962 dengan memenangkan 21 kursi di distrik nasional dan 48 di distrik regional dengan total 69 kursi (Lib Dems, 2019b). Administrasi Ikeda mendapat dukungan kuat di kedua kamar Diet sehingga ia dapat menjalankan kebijakannya dengan lancar baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri.

Ikeda kemudian memanfaatkan pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut dengan memperluas anggaran pemerintah pusat dan daerah dan secara aktif mempromosikan kebijakan penting di tingkat regional dengan mengurangi pajak. Ikeda mengeluarkan undang-undang yang sangat bermanfaat untuk industri primer, yaitu “*Basic Law for Agriculture*” (*Nogyo Kihon-ho*), “*Basic Law for Small and Medium-sized Enterprises*” (*Chusho Kigyo Kihon-ho*), “*Law for the Promotion of Coastal Fisheries*” (*Engan Gyogyo Shinko-ho*), dan “*Basic Law for Forestry*” (*Ringyo Kihon-ho*) (Lib Dems, 2019b). Ikeda mengeluarkan un-

dang-undang ini untuk mendukung pembangunan dan mengurangi disparitas regional di Jepang. Undang-undang lain yang dikeluarkan Ikeda untuk mempromosikan kesejahteraan dan pendidikan publik, yaitu “*Child Rearing Allowance Law*” (*Jido Fuyo Teate-ho*), “*Law for the Welfare of the Elderly*” (*Rojin Fukushi-ho*), “*Law for the Welfare of Mothers and Children*” (*Boshi Fukushi-ho*), “*Law Concerning Measures for the Free Provision of Textbooks for Compulsory Education*” (*Gimu Kyoiku Shogakko Kyokasho Musho Sochi-ho*), dan “*Universal Health Insurance*” (*Kokumin Kai Hoken*) (Lib Dems, 2019b).

Perdana Menteri Ikeda juga melakukan upaya besar untuk meningkatkan pemahaman dan membangun hubungan persahabatan antara Jepang dan negara lain. Selama periode tiga tahun mulai tahun 1961, ia sering bepergian ke luar negeri untuk mengunjungi berbagai kepala negara termasuk Presiden AS Kennedy, beberapa negara Eropa, Amerika Utara, dan Asia Tenggara. Selain itu, pertemuan Ikeda di Tokyo pada tahun 1961 dengan pemimpin Korea Park Chunghee berkontribusi banyak pada upaya untuk mencapai kesepakatan awal mengenai normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara (Lib Dems, 2019b).

BAB 23

EISAKU SATO

1964-1972

Penghargaan Nobel Perdamaian

Eisaku Sato lahir pada tanggal 27 maret 1901 di Tabuse, Prefektur Yamaguchi, Jepang. Ia lahir dari sebuah keluarga *samurai* tua. Sato merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas Tokyo pada tahun 1924. Ia mengawali karirnya dengan bergabung di kementerian kereta api pada tahun 1924 hingga ia berhasil menjadi wakil menteri transportasi pada tahun 1948 dan di tahun yang sama Sato bergabung dengan *Liberal Democratic Party* (Nobelpeacesummit, 2019).

Eisaku sato merupakan salah satu perdana menteri Jepang yang memiliki pengabdian yang lama menjadi seorang perdana menteri



Gambar 23.1. Eisaku Sato
Sumber: Nobelpeacesummit, 2019

dalam sejarah Jepang. Dia adalah perdana menteri ketiga terlama yaitu menjabat selama tiga kali periode dimulai pada tahun 1964 hingga ia memutuskan untuk mengundurkan diri pada tahun 1972. Pada masa jabatannya terjadi surplus perdagangan, tak lama setelah kepulauan Ryukyu berhasil dikembalikan ke pemerintahan Jepang. Selama masa pelayanannya, Eisaku Sato berhasil memimpin kebangkitan ekonomi Jepang yang cenderung krisis pasca perang dunia dua (Ensiklopedia, 2019a). Selain itu Eisaku Sato juga merupakan orang Asia pertama yang mendapat penghargaan nobel perdamaian atas dedikasinya dalam memberikan kontribusi yang

besar terhadap dunia dan berusaha menjalankan hubungan diplomatik dengan baik dengan negara lain. Eisaku Sato juga merupakan salah satu orang yang sangat penting dalam perumusan perjanjian Non proliferasi Nuklir (MacBride, 2019).

Peningkatan Kerja Sama dengan Amerika Serikat

Dalam perjalanan karirnya, sebelum menjadi perdana Menteri, Eisaku Sato beberapa kali memegang jabatan penting di pemerintahan Jepang. Ia pernah menjadi menteri jasa dan telekomunikasi, menteri konstruksi, menteri keuangan, dan menteri perdagangan dan industri internasional. Eisaku Sato terpilih menjadi perdana menteri Jepang yang ke-38 setelah perdana menteri sebelumnya Ikeda mengundurkan diri karena kondisi kesehatan yang buruk. Saat menjadi perdana Menteri, Sato memegang kendali kekuasaan, pertumbuhan ekonomi Jepang terus meningkat seiring dengan



Gambar 23.2. Kedudukan Kepulauan Ryukyu
 Sumber: Ensiklopedia, 2019a

meningkatnya hubungan baik dengan negara-negara Asia lainnya terutama dengan China dan Korea selatan. Dalam kepemimpinan Sato, Amerika Serikat dan Jepang mencapai kesepakatan untuk pengembalian beberapa pulau Jepang yang diduduki oleh Amerika serikat diantaranya yaitu kepulauan Ryukyu, Pulau okinawa, dan Kepulauan Ogasawara (Bonin) dengan syarat menarik semua senjata nuklir yang ada di daerah tersebut. Namun Sato mendapat kecaman

keras dari warga Jepang karena ketentuan dalam perjanjian tersebut masih memungkinkan pasukan militer Amerika Serikat masih tetap bisa berada di daerah Kepulauan Okinawa. Sisi positif dari Perjanjian tersebut yaitu hubungan Amerika Serikat dan Jepang yang cenderung stabil dan semakin membaik dari waktu ke waktu (Encyclopedia Britannica, 2020x).

Eisaku sato merupakan perdana menteri yang kontroversial di negara Jepang. Seiring dengan itu Jepang juga turut mendukung Amerika Serikat atas perang Vietnam yang membuat aliran kiri Je-



Gambar 23.3. Kepulauan Ogasawara
Sumber: Ensiklopedia, 2019b

pang menuduhnya sebagai pelayan yang patuh pada kepentingan Amerika Serikat (MacBride, 2019).

Dalam masa pengabdianya sebagai perdana menteri Jepang, ia berperan penting dalam menandatangani Perjanjian Hubungan Dasar antara Jepang dan Republik Korea dan dalam membangun hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Dia juga berusaha untuk membina hubungan persahabatan dan meningkatkan perdagangan dengan negara lain di Kawasan Asia Tenggara. Dia berkontribusi pada kembalinya Okinawa, Ryukyu dan Kepulauan Ogasawara secara damai ke Jepang oleh Amerika Serikat dan peningkatan hubungan dengan China (hubungan diplomatik didirikan hingga akhir 1972). Dia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian untuk kebijakan luar negerinya yang damai. Sato menyumbangkan setengah hadiahnya ke Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tokyo, sebuah pusat penelitian dan akademik internasional (MacBride, 2019).

Pada awal 1970-an masalah terjadi dengan Amerika Serikat atas surplus besar Jepang di AS. Perdagangan meningkatkan tekanan pada Sato. Dia berusaha untuk mencari pasar baru Jepang di Eropa dan Uni Soviet, tetapi ketidakpopuleran kebijakannya terus berlanjut, terutama setelah Presiden Nixon mengunjungi China pada Februari 1972, mendahului upaya serupa Jepang. Akhirnya Eisaku Sato mengundurkan diri sebagai perdana menteri Jepang (Encyclopedia Britannica, 2020x). Eisaku sato meninggal pada 3 Juni 1975 di Tokyo tak lama setelah ia mengundurkan diri dari pemerintahan Jepang (Nobelpeacesummit, 2019). Eisako Sato menjadi perdana menteri yang akan terus dikenang karena keberhasilannya dalam mencegah Jepang jatuh kembali ke militerisme melalui usahanya untuk mempertahankan Konstitusi pasifik pasca perang. Ia juga memiliki peran besar dalam usaha non-proliferasi senjata nuklir.

Hubungan Bilateral Jepang-Amerika Serikat dalam perang Vietnam

Pasca perang dunia II berakhir, dunia kembali dilanda perang dingin. Perang dingin merupakan perang akibat perbedaan ideologi antara ideologi komunisme dan liberal. Gelombang komunisme yang pada saat itu mengguncang negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara menyebabkan perang Vietnam terjadi. Amerika Serikat sebagai negara super power yang berideologi liberal demokrasi berusaha dalam menghentikan gelombang komunisme yang masuk ke Asia Tenggara dan negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea. Peperangan tersebut bertujuan untuk menghentikan dominasi komunisme yang akan merambat mulai dari China, Korea Utara, Indo-china, hingga dinilai akan menghasilkan efek domino hingga ke Australia apabila Vietnam dan negara Indochina lainnya jatuh ke dalam ideologi komunis.

Beberapa negara seperti Korea selatan, Thailand, dan Australia pun memberi bantuan militernya untuk membantu Amerika Serikat di Perang Vietnam. Negara Jepang sendiri yang pada saat itu dipimpin oleh perdana menteri Eisaku Sato juga mengambil sikap untuk mendukung Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Seiring dengan itu juga aliran kiri Jepang menuduh Sato sebagai pelayan yang patuh pada kepentingan Amerika Serikat. Eisaku sato selaku pemimpin negara itu tentunya memiliki alasan yang kuat atas kebijakan yang diambilnya. Eisaku Sato sangatlah takut Jepang jatuh ke tangan komunis. Eisaku Sato sendiri sangatlah membenci ideologi komunis dan sangat fanatik untuk mendukung kampanye anti-komunisme. Hal tersebut Karena tidak sesuai dengan cita-cita dan falsafah hidup rakyat Jepang. Namun Jepang tidak bisa memberikan bantuan militernya secara langsung untuk membantu Amerika Serikat. Hal ter-

sebut sebagai akibat dari konstitusi perdamaian Jepang yang saat itu merupakan kebijakan politik Eisaku Sato dan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang berusaha mengeluarkan pemikiran-pemikiran rakyat Jepang dari sikap militerisme dan rasa nasionalisme berlebihan. Jepang telah mengalami kekalahan besar dalam perang dunia II dan mereka tidak ingin lagi terlibat dalam perang besar secara langsung. Jepang saat itu lebih fokus untuk pembangunan dan kebangkitan ekonominya yang mengalami krisis pada perang dunia II. Faktor lain yang menghambat Jepang untuk turun langsung dalam hal militer adalah karena Reputasi Eisaku Sato yang telah menerima penghargaan nobel perdamaian sebagai pemimpin yang cinta akan perdamaian melalui kebijakannya dan keikutsertaannya dalam konvensi Non-Proliferasi Nuklir. Namun pada tahun 1967 Jepang mengambil peran dalam perang Vietnam. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Amerika Serikat akan mengembalikan pulau Okinawa ke dalam administrasi Jepang (Llewelyn, 2010).

Amerika Serikat kemudian mencapai kesepakatan untuk menyerahkan kembali beberapa pulau Jepang yang diduduki oleh Amerika Serikat diantaranya yaitu kepulauan Ryukyu, Pulau Okinawa, dan Kepulauan Ogasawara (Bonin). Namun Sato mendapat kecaman keras dari warga Jepang karena ketentuan dalam perjanjian tersebut masih memungkinkan pasukan militer Amerika Serikat masih tetap bisa berada di daerah Kepulauan Okinawa. Sisi positif dari Perjanjian tersebut yaitu hubungan Amerika Serikat dan Jepang yang cenderung stabil dan semakin membaik dari waktu-ke waktu. Pada awal 1970-an, masalah terjadi pada Amerika Serikat atas surplus besar Jepang dalam kerjasama Jepang-AS. Sektor perdagangan memberikan banyak tekanan pada Sato. Dia berusaha untuk mencari pasar baru Jepang di Eropa dan Uni Soviet, tetapi ia tak kunjung berhasil menguasai perdagangan terutama setelah Presiden Nixon mengunjungi

China pada Februari 1972, mendahului upaya serupa Jepang (Encyclopedia Britannica, 2020x).

Sejak tahun 1955, kendali kepemimpinan Jepang didominasi oleh satu partai yaitu *Liberal Democratic Party* (LDP). Hal tersebut menjadi teka-teki tersendiri bagi masyarakat Jepang hingga kini. Namun beberapa ilmuwan dan para ahli politik mengatakan bahwa hal tersebut tidak lepas dari peran aktor individu. Semua mengarah kepada Eisaku Sato. Menurut para ahli eksisnya LDP merupakan hasil dari perjuangan Eisaku Sato. Sato memainkan peran penting dalam pembentukan LDP dan eksistensinya sebagai sebuah partai. Karir Sato bersama LDP dimulai pada akhir 1940-an dan awal 1950-an. Sebelum terbentuknya LDP, Sato berkontribusi dalam membangun partai *Liberal Yoshida Shigeru* (pendahulu LDP) dan membangun hubungan kuat dalam dunia bisnis dan birokrasi pemerintahan Jepang.

Dalam masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Jepang yaitu pada tahun 1964-1972, Eisaku Sato berusaha membangkitkan ekonomi Jepang serta menjalin hubungan dengan negara-negara besar lainnya seperti Korea Selatan, China, dan terutama Amerika Serikat. Jauh sebelum menjabat sebagai perdana menteri, Selama masa Pemerintahan Ikeda Hayato pada awal 1960-an, Eisaku Sato secara bertahap telah mempersiapkan kursi kepemimpinannya dengan menyempurnakan gagasan yang penting bagi aturan satu partai, gagasan tentang kepemimpinan dan pembaruan kebijakan di bawah satu partai. Setelah berhasil memperoleh bangku pada akhir 1964, ia membangun pemerintahan yang cenderung stabil dan tahan lama melalui gagasan-gagasan cerdas yaitu diantaranya masalah kebijakan luar negeri yang sangat mendesak berkenaan dengan isu pengembalian pulau Okinawa ke tangan Jepang, agenda besar dalam negeri, gaya kepemimpinan yang digerakkan oleh teknologi informasi dan fokus pada pendidikan

kewarganegaraan serta memperkuat fondasi intelektual pemerintah konservatif.

Masa jabatannya yang panjang pada akhirnya melibatkan pertukaran politik yang sulit di awal 1970-an, tetapi sebagai negarawan senior, Satō mengurangi perselisihan faksi dan mengkonsolidasikan pencapaian kebijakannya, dibuktikan dengan ia menerima penghargaan nobel perdamaian pada tahun 1974. Sementara politik dan institusi Jepang telah berubah secara signifikan sejak masa Satō, perdana menteri yang lalu Shinzō Abe menunjukkan banyak hubungan dan kesejajaran yang luar biasa dengan pemimpin ini, menunjukkan pentingnya warisan Satō untuk pemerintahan LDP hingga saat ini (Tsuda, 2019).

BAB 24

KAKUEI TANAKA

1972-1974

Malari

Kakuei Tanaka lahir pada 4 Mei 1918 di Kariwa, prefektur Niigata, Jepang. Ia meninggal pada 16 Desember 1993 di Tokyo. Ia adalah politikus yang menjadi perdana menteri Jepang dari 1972 hingga 1974 dan yang kemudian menjadi tokoh sentral dalam skandal politik besar. Tanaka adalah satu-satunya anak dari seorang pedagang sapi yang bangkrut. Ia putus sekolah pada usia 15 tahun dan segera membuka perusahaan konstruksinya sendiri, Perusahaan Teknik Sipil Tanaka. Bisnisnya berkembang pesat selama Perang Dunia II, sebagian besar karena kontrak militer, dan dia menjadi salah satu

orang terkaya di Jepang. Memasuki politik, ia terpilih untuk duduk di majelis rendah Diet (parlemen) pada tahun 1947 dan naik dengan cepat melalui jajaran Partai Liberal-Demokrat yang kuat untuk menjadi menteri layanan pos dan komunikasi pada tahun 1957. Ia mengundurkan diri dari jabatan itu pada tahun 1958, ia kemudian menjabat sebagai menteri keuangan dari tahun 1962 hingga 1964. Ia menjadi salah satu politisi paling kuat di partainya dan diangkat menjadi sekretaris jenderal partai pada tahun 1965 dan sekali lagi pada tahun 1968 (Encyclopedia Britannica, 2020ab).



Gambar 24.1. PM Tanaka dan Presiden AS, Richard Nixon
Sumber: Idhie, 2019

Pada bulan Juli 1972, Kakuei Tanaka terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang menggantikan perdana menteri sebelumnya, Eisaku Sato. Ia berhasil menjalin hubungan diplomatik antara Jepang – Tiongkok pada masa kepemimpinannya. Ia juga berhasil merevitalisasi ekonomi Jepang dan membangun banyak proyek pemerintah. Kakuei Tanaka sangat populer di masyarakat Jepang pada waktu itu. Banyak tulisan-tulisan mengenai dirinya di koran, majalah, dan buku-buku. Kakuei Tanaka sempat berkunjung ke Indonesia saat peridodennya sebagai perdana menteri pada Januari 1974. Kedatangan Kakuei

Tanaka disambut dengan demonstrasi oleh mahasiswa dan pelajar di Jakarta. Para demonstran menolak investasi asing dari Jepang, dan aksi tersebut berujung pada anarkisme. Peristiwa ini dikenal sebagai MALARI atau Malapetaka Lima Belas Januari. Pada saat pertemuannya dengan presiden Soeharto, Soeharto meminta maaf atas ketidaknyamanan Kakuei Tanaka dalam kunjungannya (Abdulsalam, 2018).

Civil Engineer Politician

Kakuei Tanaka pernah terjerat skandal suap dengan perusahaan asal Amerika Serikat, Lockheed yang memproduksi pesawat tempur. Lockheed menyuap Kakuei Tanaka dan perantaranya untuk dapat menghasut maskapai Jepang, All Nippon Airways agar membeli 21 unit pesawat komersial milik Lockheed dan tidak membeli pesawat McDonell Douglas. All Nippon Airways membeli pesawat Lockheed pada tahun 1972. Kemudian Kakuei Tanaka ditangkap pada Juli 1976 dan dibebaskan pada Agustus 1976 dengan membayar uang jaminan sejumlah \$690.000. Pada tahun 1983, Kakuei Tanaka divonis bersalah dan dihukum 4 tahun penjara serta membayar denda sekitar 500 juta yen (Encyclopedia Britannica, 2020ab; Idhie, 2019).

Majalah Bungei Shunju pernah memberitakan bahwa Kakuei Tanaka merupakan politisi yang sering bercengkrama dengan geisha. Geisha sendiri merupakan istilah untuk wanita penghibur di Jepang. Kakuei Tanaka juga pernah terlibat kasus perselingkuhan dengan salah satu pendukungnya, Aki Sakato. Skandal ini terbongkar pada bulan November 1974 dan ia segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Jepang pada saat itu. Terlepas dari skandal yang dialaminya, Kakuei Tanaka sangat berjasa dalam pembangunan di negaranya, bahkan ia mendapat julukan “*civil engineer politician*” karena keahliannya dalam bidang *civil engineer* sekaligus sebagai politisi dan juga karena ia telah berhasil membuat Jepang menjadi terindustri-

alisasi, pemulihan kota, dan elektrisasi kereta api di negaranya (Idhie, 2019).

Tanaka adalah salah satu perdana menteri yang populer di masyarakat Jepang karena keberhasilannya dalam merevitalisasi ekonomi Jepang. Keberhasilan diplomatiknya dengan beberapa negara seperti Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, dan Indonesia. Meskipun demikian, pada tahun 1974, memasuki masa pemilihan, ekonomi Jepang mengalami inflasi sehingga berdampak pada partainya. Ia kemudian mengundurkan diri pada Desember 1974.

BAB 25

TAKEO FUKUDA

1976-1978

Skandal *Showa Denko*

Takeo Fukuda lahir pada 14 Januari 1905 di Gunma, ibu kota Prefektur Gunma, di pegunungan Honshu tengah. Lalu meninggal karena emfisema yang kronis di rumah sakit Tokyo Women's Medical College pada 5 Juli 1995 ketika berusia 90 tahun. Ia berasal dari keluarga Samurai dan ayahnya adalah seorang Wali Kota Gunma. Tumbuh dari keluarga petani yang kaya raya di Gumma Ken (prefektur), Fukuda bersekolah di sekolah yang terbaik, kemudian lulus dari Universitas Tokyo pada tahun 1929. Setelah lulus dari perguruan tinggi, ia kemudian masuk ke kementerian ke-



Gambar 25.1. Takeo Fukuda
Sumber: Ensiklopedia, 2019c

uangan dan menjadi anggota DPR sejak tahun 1952. Karier politiknya meliputi masa jabatan dapat terbilang sangat banyak dan aktif yaitu sebagai menteri pertanian, menteri keuangan sebanyak tiga kali, dan menteri urusan luar negeri. Fukuda kemudian menikah dan dianugerahi lima anak yaitu tiga putra dan dua putri. Putra yang paling tua atau anak pertamanya, Yasuo Fukuda menjadi perdana menteri pada September 2007 yang kemudian menjadikannya putra pertama dari seorang perdana menteri Jepang yang menjadi perdana menteri. Ia

mengikuti jejak ayahnya, Takeo Fukuda (Encyclopedia Britannica, 2020d).

Pengalaman Takeo Fukuda dalam dunia politik:

1. Kementerian Keuangan 1929-50
2. Wakil Menteri 1945-46
3. Direktur Biro Perbankan 1946-47
4. Direktur Biro Anggaran 1947-50
5. Anggota DPR 1952-90
6. Menteri Keuangan 1965-66
7. Sekretaris Jenderal dan Presiden Partai Demokrat Liberal 1966-68
8. Menteri Keuangan 1968-71, 1973-74
9. Menteri Luar Negeri 1971-72; Wakil Perdana Menteri 1974-76
10. Perdana Menteri 1976-78 (Encyclopedia Britannica, 2020d)

Di luar negeri, Fukuda justru meraih kesuksesan yang lebih besar. Doktrin Fukuda yang diucapkan pada tahun 1977 di Manila pada saat itu, menyatakan tekad Jepang untuk tidak pernah lagi menggunakan kekuatan militer dan berusaha untuk memperkuat hubungannya

dengan negara-negara Asia Tenggara. Fukuda juga berperan penting dalam menyelesaikan perjanjian perdamaian dan persahabatan tahun 1978 dengan China. Janji Fukuda untuk menstabilkan ekonomi sempat tidak terpenuhi setelah satu tahun, karena kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya semakin menurun ketika beberapa anggota LDP terlibat dalam skandal Showa Denko. Skandal ini melibatkan tokoh utama yaitu Shin Kanemaru yang menjabat sebagai wakil ketua Partai Demokratik Liberal dan ketua fraksi Takeshita. Fraksi ini adalah fraksi yang terkuat di dalam partai LDP. Kanemura mengakui menerima suap senilai 500 juta Yen (lebih dari Rp8 miliar). Kanemura juga melibatkan transfer rahasia dari dana yang bersumber dari AS ke perusahaan pupuk, menyebabkan jatuhnya koalisi Ashida, pemerintah terakhir yang dipimpin sosialis Jepang selama hampir setengah abad. Fukuda terpaksa membubarkan kabinetnya pada tahun 1978. Setelah tahun 1978, Takeo Fukuda masih berpartisipasi aktif dalam dunia politik hingga pada tahun 1990, ia pensiun dari politik. Setelah dia meninggalkan jabatannya, Fukuda menjadi sebagai seorang filsuf yang berpegang pada masalah yang dihadapi dunia dan umat manusia (Sayle, 1995).

Fukuda Doctrine

Hubungan Jepang-ASEAN memasuki babak baru saat Perdana Menteri Takeo Fukuda mendeklarasikan *Fukuda Doctrine* pada tahun 1977. Kebijakan Fukuda menurut Michael Yuhuda merupakan inisiatif pertama Jepang yang paling ambisius setelah berakhirnya Perang Dunia II. Doktrin ini dirancang untuk menjadi dasar bahwa kebijakan Jepang lebih diarahkan ke Asia Tenggara dan mendorong agar Jepang memainkan peranan politik yang positif di wilayah ini. Sejak inilah, kemudian hubungan Jepang-Asia Tenggara dianggap memasuki fase baru. Dalam salah satu isi *Fukuda Doctrine*, juga terdapat poin “*heart-to-*

heart understanding". Landasan Jepang mengeluarkan kebijakan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa demonstrasi "Anti Jepang" saat kunjungan Perdana Menteri Kakuei Tanaka ke negara-negara ASEAN pada tahun 1974. Demonstrasi yang berujung pada kerusuhan ini merupakan bentuk penolakan masyarakat ASEAN atas dominasi perekonomian Jepang di negaranya (Ministry of Foreign Affairs, 1977).

Para demonstiran menilai Jepang menjajah ASEAN dalam bentuk baru melalui banyaknya aliran modal Jepang yang masuk ke negara-negara ASEAN. Jepang juga dinilai hanya ingin mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara ASEAN untuk kepentingan industrinya. Esensi dari *Fukuda Doctrine* mencakup tiga hal yaitu Jepang tidak akan menjadi negara adidaya militer. Kedua, Jepang akan menjalin hubungan dengan rasa saling pengertian dan saling percaya terhadap negara-negara Asia Tenggara. Ketiga, Jepang akan bekerja sama secara positif dengan seluruh negara ASEAN sebagai mitra yang sejajar (Ministry of Foreign Affairs, 1977).

Ketiga poin tersebut menjadi salah satu alasan Fukuda untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan ASEAN. Ia berusaha meyakinkan negara-negara ASEAN mengenai niatnya untuk menjalin kerjasama tanpa ada maksud untuk menguasai negara tersebut. Fukuda menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN hampir di semua sektor terutama sektor perdagangan. Sementara itu, negara-negara di Asia Tenggara tersebut berusaha membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan Jepang untuk meningkatkan perekonomian negara mereka.

Beberapa bentuk kerja sama yang telah terbentuk seperti tahun 1977 terbentuknya ASEAN-Japan Forum dan ASEAN Japan Center di tahun 1981. Terdapat kunci dari kerja sama antara Jepang dan ASEAN yaitu adanya ODA (*Official Development Aid*) yang telah terjadi sejak awal kerja sama Jepang dengan masing-masing negara ASE-

AN. Pendirian *ASEAN-Japan Centre* (AJC), *ASEAN-Japan Commemorative Summit*, *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), *Japan East Asia Network of Exchange for Student and Youths* (JENESYS), *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA). Jepang juga merupakan peng-gagas studi mengenai *Comprehensive Economic Partnership in East Asia* (CEPEA) untuk menjajaki kemungkinan kerangka kerja sama bagi in-tegrasi ekonomi diantara negara anggota EAS dan melakukan pengu-gjian terhadap dampak ekonomi CEPEA terhadap negara-negara EAS (Singh, 2017).

Terbentuknya *ASEAN-Japan Forum* dan *ASEAN Japan Center* ada-lah awal kerjasama antara negara-negara ASEAN dan Jepang. Ker-jasama tersebut bermula dari kerja sama antara Jepang dengan salah satu negara di ASEAN berkembang menjadi kerja sama regional. ODA menjadi kunci yang sangat memberikan manfaat bagi negara-negara ASEAN karena berfungsi sebagai investasi yang jumlahnya terus ber-tambah. *Fukuda Doktrin* sukses meningkatkan kerja sama di kawasan regional ASEAN dan Jepang. Doktrin memberikan pengaruh yang positif bagi kebijakan luar negeri Jepang di Kawasan Asia Tenggara. Doktrin ini berhasil mengembalikan citra Jepang menjadi negara yang selalu siap membantu bagi negara-negara di Asia Tenggara.

BAB 26

MASAYOSHI ŌHIRA

1978-1980

Perjalanan Karier

Masayoshi Ōhira adalah seorang politikus Jepang, dia mengabdikan selama dua tahun. Ia meninggal mendadak karena serangan jantung di kantornya pada 12 Juni 1980. Ia lahir di Toyohama, Kagawa pada tahun 1910 dan kuliah di Universitas Hitotsubashi. Orang tuanya bernama Ohira Ricki dan Saku, ayahnya adalah petani kelas menengah di Kagawa dan ibunya adalah wanita yang berpikiran kuat dan sangat supel. Sebagai anak petani, masa kecil Ohira diwarnai dengan kerja keras dan sedikit kekayaan, serta memiliki ciri khas pedesaan Jepang pada zaman Taisho. Dia mengatakan kehidup-



Gambar 26.1. Masayoshi Ōhira
Sumber: Encyclopedia Britannica,
2020u

an petani adalah satu putaran kerja keras yang berkelanjutan dengan sangat sedikit yang bisa ditunjukkan pada akhirnya. Setelah itu, pada tahun 1916, Ohira masuk sekolah dasar dan pada tahun 1923, masuk sekolah menengah atas. Pada tahun 1926, ia berharap dapat masuk angkatan laut tetapi ia jatuh sakit ketika mengikuti pemeriksaan kesehatan dan ia gagal masuk angkatan laut (Envall, 2015: 86).

Pada tahun 1927 merupakan masa yang sulit bagi Ōhira dan keluarganya, karena Ōhira Ricki (ayah Ohira) meninggal. Mereka mendapatkan kendala ekonomi dalam pendidikan Ōhira. Namun Ōhira mendapat tawaran dari bibinya dan mulai belajar di *Takamatsu Higher School of commerce* pada tahun 1928. Pada tahun 1933 ia melanjutkan studinya di *Tokyo University of commerce* (sekarang Hitotsubashi University) setelah menyelesaikan studinya ia lulus untuk menjadi sipil yang lebih tinggi (Envall, 2015:86). Setelah lulus tahun 1936, ia meniti karir di Departemen Keuangan dan kemudian tahun 1952, ia terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, menjabat selama 10 periode. Ōhira menjadi terkenal karena kemampuan negosiasinya. Pada tahun 1960, sebagai kepala sekretaris kabinet Ikeda Hayato, dia membantu menstabilkan negara setelah kekacauan anti-Amerika di akhir 1950-an. Sebagai menteri luar negeri pada kabinet Ikeda kedua tahun 1962, ia mempersiapkan pemulihan hubungan dengan Korea Selatan. Kemudian, sebagai menteri luar negeri di kabinet Tanaka, dia membuka jalan bagi normalisasi hubungan dengan Republik Rakyat China. Pada tahun 1978, setelah memenangkan kursi kepresidenan Partai Liberal-Demokratik (LDP), Ōhira terpilih sebagai perdana menteri. Namun, kurang dari dua tahun kemudian, ia mengadakan pemilihan umum

setelah sejumlah anggota LDP bergabung dengan oposisi dalam mosi tidak percaya. Ōhira tiba-tiba meninggal selama kampanye pemilihan (Encyclopedia Britannica, 2020u).

Kebijakan Luar Negeri

Ia mengambil jadwal yang padat dan melakukan perjalanan ke China, Eropa, dan Australia serta menghadiri berbagai KTT. Ia juga melakukan kampanye di dua pemilihan umum, pada Oktober 1979 dan Juni 1980. Di dalam negeri, dia sempat bertarung antar faksi dengan LDP. Di level internasional, pemerintahannya masih berusaha untuk mengatasi guncangan minyak kedua yang memperburuk situasi politik di Timur Tengah, dan invasi Soviet ke Afghanistan. Strategi kepemimpinan Ōhira terdiri dari stimulasi intelektual berbasis transaksional dan visi kepemimpinan paternalistik. Tujuannya adalah menjadikan Jepang kekuatan internasional yang aktif dan bertanggung jawab (Envall, 2015).

Ōhira memiliki visi untuk Jepang dengan membentuk badan pengembangan kebijakan independen, seperti *Policy Research Association*, yang menerima anggota dari berbagai latar belakang dan tidak hanya dari LDP. Ōhira merupakan pemain kunci dalam permainan politik Jepang dan selalu memperhatikan konsekuensi pemilihan domestik dari kebijakan luar negeri. Sebaliknya, sebagai penganut agama yang kuat akan pentingnya kerja sama internasional. Ia melihat keberhasilan kerja sama di KTT Tokyo sama pentingnya dengan kepentingan nasional negara. Kemudian, terjadi persaingan yang ketat antar faksi di LDP. Namun, Ōhira adalah pemimpin yang cekatan di Tokyo di mana persaingan tersebut tidak memberikan banyak pengaruh besar karena kepemimpinannya yang terbilang sukses (Envall, 2015).

BAB 27

ZENKŌ SUZUKI

1980-1982

Perjalanan Karier Politik

Zenko Suzuki lahir di Yamada pada tanggal 11 Januari 1911. Ia adalah seorang putra dari Suzuki Zengoro dan Hisa. Suzuki Zengoro bekerja menjalankan bisnis perikanan. Suzuki menempuh pendidikannya di bidang perikanan yakni Sekolah Perikanan Prefektur Miyako. Sejak ia memasuki dunia pendidikan, ia dikenal dengan sebutan “Ajaib” karena ia mampu memperoleh nilai-nilai bagus dan hal tersebut ia peroleh secara konsisten. Pada tahun 1930, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Pelatihan Perikanan atau Universitas Perikanan Tokyo untuk mempelajari akuakultur. Ia tumbuh seperti anak-



Gambar 27.1. Zenkō Suzuki
Sumber: Encyclopedia Britannica,
2020aa

-anak pada umumnya yang suka mendengarkan cerita, ia tertarik membaca buku-buku yang berhubungan dengan pahlawan *samurai*, seperti Araki Mataemon dan Goto Mototsugu (Envall, 2015: 112).

Menurut catatan dari seorang temannya selama bersekolah, Suzuki dikenal sebagai anak yang memiliki kepribadian yang baik. Sebelumnya, ia hidup terisolasi di pedesaan, barulah ia melanjutkan pendidikannya di Tokyo. Ia dihadapkan dengan berbagai pergolakan politik yang ada di negara itu, seperti permasalahan kelas dan meningkatnya nasionalisme di tahun 1930. Setelah memperoleh gelar sarjananya di tahun 1935, ia kemudian masuk ke dalam dunia kerja dan bekerja di salah satu organisasi perikanan. Tidak hanya satu, ia dikenal sangat aktif bergabung dalam berbagai organisasi lain yang berbau perikanan, seperti *Zenkoku Gyogyō Kumiai Kyōkai* (Persatuan Asosiasi Perikanan Nasional) dan *Zenkoku Gyogyō Kumiai Rengō Kai* (Federasi Nasional Asosiasi Perikanan). Tahun 1939, Suzuki memutuskan untuk menikahi seorang gadis yang bernama Ogihara Sachi yang merupakan putri dari Presiden Sekolah Perikanan Hakodate (Envall, 2015: 112).

Karir Suzuki mulai naik setelah Perang Pasifik dimulai, di mana ia dipindahkan ke Asosiasi Perikanan Prefektur dan menduduki jabatan sebagai kepala departemen perikanan. Dalam dunia politik, dimulai pada saat terjadi bencana gempa yang diikuti tsunami yang melanda pantai Sanriku pada tahun 1933 dan melihat kegagalan pemerintah Jepang dalam menangani peristiwa tersebut. Hal ini lantas membuatnya bertekad untuk memasuki dunia politik dan membuat perubahan dalam dunia pemerintahan melalui bidang politik. Akhirnya setelah Perang Dunia II ia resmi memasuki dunia politik dan terpilih menjadi

anggota parlemen yang diusung oleh partai sosialis Jepang (JSP) pada tahun 1947. Meskipun sebenarnya dari segi ideologi ia bukanlah merupakan seorang yang menganut paham sosialis. Tidak lama menjabat, ia akhirnya pindah ke Partai Reformasi Sosialis (*Shakai Kakushintō*), dan kemudian Partai Liberal Demokratik (LDP). Suzuki terpilih sebagai anggota LDP pada tahun 1949, yang dulunya dikenal dengan nama Partai Liberal Konservatif (*Jiyūtō*). Memasuki tahun 1952, ia kemudian menjadi menteri parlemen untuk Badan Urusan Dalam Negeri dan dua tahun setelahnya menduduki jabatan sebagai wakil residen Dewan Riset urusan Kebijakan Partai Liberal (Envall, 2015:113).

Memasuki tahun 1980, perdana Menteri Jepang yang saat itu menjabat, Ōhira meninggal secara tiba-tiba dan mengejutkan banyak pihak. Tidak sampai di situ, publik kembali dikejutkan dengan naiknya Zenko Suzuki untuk memegang jabatan perdana menteri sebagai pewaris Kochikai atau faksi Ōhira. Hal ini mengejutkan banyak pihak dikarenakan sosok dari Suzuki dianggap tidak mampu mengemban jabatan perdana menteri yang memegang tanggung jawab yang tinggi dan harus menghadapi tantangan yang ada pada saat itu. Gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Suzuki menyangkut masalah-masalah transaksional dan *laissez-faire*, dengan visi politik yang sebagian besar manajerial atau konservatif dalam hal masyarakat Jepang yang lebih luas dan dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat itu. Akhirnya memasuki tahun 1982, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang perdana menteri (Envall, 2015: 112).

Slogan “Politik Harmoni”

Saat menjabat, Suzuki menjunjung slogan politiknya, “politik harmoni,” sambil menekankan internasionalisme moderat. Pada tahun 1981 ia menghadiri pertemuan puncak dengan Presiden AS Ronald Reagan di mana hubungan kedua negara didefinisikan sebagai “alian-

si". Tahun 1982, Suzuki menuai kritik atas kesulitan ekonomi Jepang dan atas penanganannya yang kontroversi terjadi setelah buku teks Jepang direvisi untuk meremehkan agresi negara terhadap China selama Perang Dunia II. Suzuki kehilangan dukungan dalam LDP, dan pada tahun 1982 dia memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin partai dan dengan demikian melepaskan jabatan perdana menteri. Dia mempertahankan kursinya di Diet dan terus memimpin faksi yang cukup besar di LDP. Suzuki tetap aktif dalam politik sampai pensiun pada tahun 1990 (Encyclopedia Britannica, 2020aa).

Zenko Suzuki sebagai salah seorang perdana menteri yang pernah menjabat di Jepang pada masa jabatan tahun 1980 sampai tahun 1982 memberikan kontribusi yang besar bagi Jepang meskipun masa jabatannya tergolong singkat. Sebelum menduduki jabatannya sebagai seorang perdana menteri di Jepang, ia sudah menduduki beberapa jabatan yang ada di kabinet. Zenko Suzuki dikenal sebagai sosok yang hebat dalam hal mediasi, bahkan ia tercatat telah menduduki jabatan sebagai ketua dewan eksekutif LDP (*Liberal Democratic Party*) sebanyak 10 kali masa jabatan. Sehingga tidak mengherankan jika naiknya posisi Zenko Suzuki menggantikan pendahulunya, yakni Ohira Masayoshi dianggap oleh presiden LDP sebagai suatu keputusan yang tepat. Hal ini juga didorong karena Zenko Suzuki yang dipandang berbakat dan juga memiliki kesetiaan pada partainya (Encyclopedia Britannica, 2020aa).

Pada saat Zenko Suzuki menduduki jabatan sebagai seorang perdana menteri Jepang, ia memegang teguh sebuah slogan politik yang menjadi keyakinannya, yakni "Politik Harmoni". Tidak hanya itu, Zenko Suzuki juga memberikan penekanan khusus politiknya pada internasionalisme moderat. Namun, di masa jabatannya sebagai seorang perdana menteri, Zenko Suzuki banyak mengalami kendala dan juga dihadapkan pada permasalahan yang kompleks di Jepang pada saat itu.

Pada tahun 1981, Zenko Suzuki diketahui melakukan sebuah pertemuan puncak dengan Presiden Ronald Reagan yang merupakan presiden Amerika Serikat yang menjabat pada saat itu, di mana kedua negara ini memang dikenal sebagai dua negara yang terlibat dalam satu hubungan aliansi. Ada juga permasalahan ekonomi di Jepang yang menjadi sorotan masyarakat Jepang pada tahun berikutnya yang sampai membuat Zenko Suzuki kehilangan dukungan dari partai LDP sebagai seorang perdana Menteri (Encyclopedia Britannica, 2020aa).

Northern Territories

Pada masa pemerintahan Zenko Suzuki yang juga merupakan tokoh dengan paham internasionalisme sangat memperhatikan hubungannya dengan negara-negara yang ada di dunia. Pada masa jabatannya sebagai perdana menteri Jepang dihadapkan pada permasalahan hubungan antara Jepang dan Uni Soviet. Hal ini berkaitan dengan “Northern Territories”. Hal ini berkaitan dengan wilayah utara yang dianggap sebagai wilayah yang diperebutkan antara Jepang dan Soviet pasca perang dunia II, khususnya mengenai empat pulau paling selatan yang dianggap telah direbut dari Jepang. Namun, pada masa jabatan Zenko Suzuki yang mengedepankan politik harmoni dan juga memperhatikan fakta bahwa Jepang dari segi strategis dianggap tidak memiliki sumber daya alam yang memadai sehingga diplomasi dianggap sebagai salah satu jalan yang paling bijak yang dapat ditempuh oleh Jepang. Hal ini dikarenakan Jepang tidak unggul dalam sumber daya alam sehingga alangkah baiknya Jepang tidak melibatkan diri dalam konflik internasional, meskipun ia berada di bawah satu aliansi dengan Amerika Serikat yang berkonflik dengan Soviet kala itu. Tetapi, dalam hal ini Jepang juga memberikan penekanan bahwa Jepang dan Uni Soviet yang secara geografis bertetangga penting untuk menjaga hubungan baik antar keduanya, tetapi apabila usaha-usaha

tersebut hanya dilakukan oleh pihak Jepang saja, maka hal itu tidak akan membuahkan hasil. Diharapkan pihak Uni Soviet juga berusaha untuk mengusahakan perbaikan hubungan antara keduanya (Kimuri, 1981).

Zenko Suzuki dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang perdana menteri di Jepang bisa dikatakan memberikan kontribusi yang cukup baik selama masa jabatannya. Ada banyak hal yang terjadi selama masa jabatannya yang singkat tersebut, mulai dari permasalahan ekonomi hingga permasalahan teritori yang membuatnya harus bekerja ekstra bersama kabinetnya. Masa jabatannya juga merupakan lanjutan dari Ohira sehingga tidak banyak kebijakan yang berubah dari sebelumnya. Namun, jika berbicara mengenai arah politik, Zenko Suzuki mengedepankan politik harmonis dan juga asas internasionalisme, di mana ia selalu berusaha membangun hubungan baik antara Jepang dan negara-negara di dunia tanpa melalui jalan kekerasan, tetapi mengedepankan diplomasi. Hal ini tercermin dengan usahanya menjadikan perekonomian Jepang maju dengan mengandalkan sumber daya manusia yang dimiliki dan upaya penyelesaian konflik dengan jalan damai dengan Uni Soviet terkait masalah teritorial kedua negara.

BAB 28

YASUHIRO NAKASONE

1982-1987

Perjalanan Karier Politik

Nakasone Yasuhiro lahir pada 27 Mei 1918 di Takasaki, Jepang dan meninggal pada 29 November 2019 di Tokyo. Ia adalah politisi Jepang yang merupakan pemimpin Partai Liberal-Demokrat (LDP) pada tahun 1982 sampai 1989 dan menjadi perdana menteri Jepang pada tahun 1982 sampai 1987. Ia adalah putra seorang pedagang kayu kaya. Ia lulus pada tahun 1941 dari Universitas Kekaisaran Tokyo (sekarang Universitas Tokyo) dan menjabat sebagai letnan di angkatan laut kekaisaran selama Perang Dunia II. Saat perang berakhir, dia menjadi saksi pengeboman atom

di Hiroshima. Pada tahun 1947 Nakasone terpilih menjadi anggota majelis rendah Diet (parlemen), menjadi salah satu orang termuda yang pernah menduduki kursi di badan itu. Dia mempertahankan kursinya dalam pemilihan berikutnya dan secara berturut-turut memegang beberapa jabatan kabinet, termasuk menteri transportasi pada tahun 1967 sampai tahun 1968, menteri pertahanan pada tahun 1970 sampai tahun 1971, serta menteri perdagangan dan industri internasional pada tahun 1972 sampai tahun 1974 (Tikkanen, 2020).



Gambar 28.1. Pertemuan antara Presiden Ronald Reagan dan Perdana Menteri Nakasone pada tahun 1987
Sumber: Onishi, 2019

Setelah Perdana Menteri Suzuki Zenko mengundurkan diri pada bulan Oktober 1982, Nakasone sebagai sekutu kuat Tanaka Kakuei, memenangkan kontes empat arah untuk menjadi presiden LDP dan dengan demikian, karena dominasi partai tersebut, ia menjadi perdana menteri Jepang. Dia secara resmi terpilih sebagai perdana menteri oleh Diet Jepang pada November 1982. Oposisi politik mampu memaksa pemilihan parlemen lebih awal pada Desember 1983. LDP kehilangan mayoritas mutlak, tetapi Nakasone mempertahankan jabatannya dengan membentuk kabinet koalisi (Tikkanen, 2020).

Negara Kreditor Terbesar Di Dunia

Sebagai perdana menteri, Nakasone berusaha untuk memperkuat hubungan Jepang dengan Amerika Serikat dengan meningkatkan kontribusi Jepang pada pertahanannya sendiri dan dengan menurunkan hambatan perdagangan Jepang untuk barang-barang Amerika. Usahanya untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menimbulkan kontroversi yang cukup besar di Jepang. Nakasone mencoba meningkatkan reputasi Jepang sebagai salah satu kekuatan ekonomi terkemuka dunia dengan sering melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berunding dengan sekutu Jepang. Di kancah domestik, ia mensponsori program langkah-langkah penghematan pemerintah dalam upaya mengurangi utang publik Jepang. Pada bulan Oktober 1984, Nakasone ditegaskan kembali sebagai presiden LDP, sehingga mendapatkan masa jabatan kedua sebagai perdana menteri. Ekonomi Jepang melanjutkan pertumbuhannya yang berkelanjutan di bawah pemerintahannya, dan pada akhir masa jabatan kedua Nakasone, Jepang telah menjadi negara kreditor terbesar di dunia dan mulai menyaingi kekuatan Amerika Serikat dalam ekonomi dunia (Tikkanen, 2020).

Sistem “*Balance Diplomacy*”

Nakasone sukses dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara lain untuk mendukung peningkatan perekonomian Jepang ke arah yang lebih baik setelah berbagai masalah yang dihadapi negara tersebut pasca Perang Dunia II. Untuk kebijakan domestik, ia memperkuat sistem pertahanan dengan merevisi *Japan's American-written Pacifist Constitution*. Ketika menjadi anggota parlemen, ia memiliki peran dalam meningkatkan pembiayaan untuk penelitian nuklir. Ia juga telah menunjukkan kemampuan kepada dunia melalui kerja samanya dengan Presiden Ronald Reagan dan Perdana Menteri Margaret That-

cher. Kerja samanya dengan Presiden Ronald Reagan dalam hal peningkatan kerjasama militer. Hubungan dekat dengan Amerika Serikat ini dikenal dengan istilah Ron-Yasu (Onishi, 2019). Kemampuannya melakukan diplomasi memberikan dampak yang positif pada perkembangan ekonomi Jepang karena sistem “*balance diplomacy*” yang diterapkannya. Ia juga menurunkan trade barrier terhadap barang-barang produksi AS. Kebijakan ini makin mengukuhkan posisi Jepang di kancah internasional. *Balance diplomacy* ini juga diterapkan dalam hubungannya dengan Korea Selatan. Ia menjadi presiden pertama Jepang yang berhasil memulihkan hubungan dengan Korea yang sempat renggang karena penjajahan yang dilakukan oleh Jepang dahulu (Japan Times, 2019b).

Berbicara tentang dunia perpolitikan di Jepang, salah satu poin penting yang perlu di-*highlight* ialah konsep konstitusi yang dijalankan. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan segala pertimbangan historis di masa lampau, Jepang benar-benar mencoba membangun negaranya tanpa embel-embel perang dan ancaman militer terutama terhadap bangsa lain atau dengan kata lain lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan *soft power* dalam menjalin hubungan dengan negara lain dan membangun kembali bangsanya.

Kemampuannya berbicara dan mengolah kata juga membawa keuntungan tersendiri sebab menjadi awal yang baik untuk hubungannya bersama Kakuei Tanaka sebagai mantan Perdana Menteri Jepang di tahun 1972-1974. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya menduduki jabatan dibawah kabinet kerja Kakuei Tanaka yakni dalam bidang perdagangan internasional dan industri. Eratnya hubungan kekerabatan tersebut membuat Yasuhiro Nakasone memutuskan untuk menamai kabinet kerjanya dengan sebutan Kabinet Tanakasone sebagai bukti keakraban yang terjalin di masa lalu. Alasan lainnya yang mendasari pemberian nama tersebut ialah besarnya pengaruh dan pe-

ran Kakuei Tanaka di masa-masa sebelum Yasuhiro terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang selanjutnya (Thayer, 1985: 54).

Partai Demokrasi Liberal sendiri merupakan partai politik terbesar di Jepang yang didirikan sejak tahun 1955. Secara garis besar, partai ini banyak berfokus pada *business interest* dalam kaitannya dengan perumusan suatu kebijakan publik/nasional di Jepang sehingga lebih condong pada konsep kebijakan yang berbau ekonomi dan politik. Ia memenangkan pemilihan anggota *House of Representative* dengan *majority* sebanyak 12 kali sejak Mei 1958 sampai Februari 1990. Sebelum menjadi Perdana Menteri, Yasuhiro sempat menjabat sebagai ketua Partai Demokrasi Liberal selama dua periode. Keberhasilannya tersebut semakin memuluskan jalannya untuk menjadi perdana menteri mengingat betapa besar kontribusi dan berpengaruhnya partai ini dalam ajang pemilihan perdana menteri di Jepang secara berkala (Thayer, 1985: 51).

Neo Liberalisme

Yasuhiro Nakasone memiliki konsep kepemimpinan yang menjunjung tinggi prinsip *balance diplomacy* dengan pendekatan *soft power*nya (Japan Times, 2019b). Hal ini dituangkan melalui serangkaian kebijakan yang ia keluarkan baik itu kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Di samping itu, gaya kepemimpinannya yang terbuka juga menghidupkan sistem pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan warga negara dengan menempuh jalur-jalur damai seperti kerja sama, negosiasi, dan diplomasi. Perspektif inilah yang mendukung lahirnya paham neo-liberalisme di masa kepemimpinannya yang mana ia menggunakan pengaruh kekuatan industri sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang sehingga mampu bersaing dengan negara sekelas Amerika Serikat dan Inggris dimasa itu (Mainichi, 2019). Penerapan paham ini memang cu-

kup berpengaruh pada penentuan arah kebijakan yang dianut oleh Yasuhiro. Adapun arah kebijakannya banyak berfokus pada sektor ekonomi demi menunjang visi dan misinya kala itu sebagaimana prinsip dasar dalam administrasinya yaitu memperkuat perekonomian Jepang, menciptakan perdamaian dan membangun demokrasi yang sehat. Tujuannya agar Jepang dapat menjadi negara dengan sistem kesejahteraan dan budaya yang kuat.

Keberhasilan Yasuhiro sebagai Perdana Menteri Jepang juga turut dipengaruhi dengan pengalaman berpolitiknya sebelum ia menjabat sebagai perdana menteri. Ia pernah bekerja di bawah kabinet kerja Kakuei Tanaka dalam bidang *Ministry of International Trade and Industry* di mana ini menjadi poin plus yang sangat dipertimbangkan oleh pimpinan partai (*House of Representatives*) ketika seseorang memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai seorang perdana menteri. Keputusan tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat penting karena beratnya tugas dan tanggung jawab bagi yang bekerja di kementerian tersebut yang banyak berkaitan dengan strategi dalam membangun dan menjalin hubungan luar negeri serta mengatur keuangan negara, sehingga para mantan pekerja di bidang tersebut dianggap mumpuni untuk menjalankan roda pemerintahan sebagai calon perdana menteri selanjutnya. Oleh karena itu, dengan segudang pengalaman politiknya tentu membuat Yasuhiro tidak melewatkan kesempatan emas tersebut agar semakin memuluskan jalannya untuk menduduki kursi jabatan Perdana Menteri Jepang saat itu.

Mengawali kariernya sebagai Perdana Menteri ke-45 Jepang, Yasuhiro mempromosikan liberalisasi pasar untuk mendukung dan memperkuat *free trade movement* yang mana merupakan bagian dari penerapan paham neo-liberalisasi. Ia pun mulai berkontribusi dalam upaya merevitalisasi ekonomi secara global yang diwujudkan dengan membangun relasi internasional dengan banyak negara seperti Ame-

rika Serikat, China, Korea Selatan, negara-negara di ASEAN dan bahkan di wilayah Eropa Barat (Lib Dems, 2019a). Tujuannya ialah untuk memperkuat kerja sama ekonomi antar negara tersebut sehingga kepentingan nasional Jepang dapat terpenuhi tanpa harus menggunakan cara-cara kekerasan.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, pada tahun 1983 ia mengeluarkan kebijakan liberalisasi pasar yang komprehensif berupa pengurangan tarif pada barang-barang yang diperdagangkan dengan total barang sebanyak 75 buah meliputi 47 buah barang pertanian dan 28 buah barang industri. Berbekal tekad untuk bergerak melampaui kebijakan liberalisasi tradisional Jepang yang dinilai masih sempit dalam pemberlakuan tarif barang, maka kabinet kerja Yasuhiro pun mulai mengambil satu langkah lebih maju di mana ia menerapkan aturan penghapusan hambatan perdagangan non-tarif seperti inspeksi impor, standar produk dan lain sebagainya. Ini didukung pula dengan berlakunya "*Law to Promote Market Liberalization*" yang semakin mengukuhkan prinsip *equal treatment* terhadap barang dari dalam negeri ataupun luar negeri (Lib Dems, 2019a). Kebijakan ini pada akhirnya terbilang sukses besar di bawah pemerintahan Yasuhiro dan menjadi pencapaian terpenting beliau saat itu sehingga memperoleh pengakuan secara global serta memperkuat perekonomian Jepang di masa kepemimpinannya dulu.

Dalam urusan domestik, Yasuhiro juga mengupayakan adanya reformasi kebijakan fiskal dan administrasi di Jepang. Bersamaan dengan itu, beberapa hal penting yang turut menyoroti agenda politik Yasuhiro ialah melakukan restukturasi perkerataapian nasional Jepang, mengembangkan penelitian dan penerapan teknologi kreatif, upaya untuk meningkatkan produktivitas serta memperkuat industri pertanian, perikanan dan kehutanan, modernisasi usaha kecil dan menengah, mempromosikan kampanye penghijauan bangsa dan lingkung-

an, peningkatan dukungan dalam penelitian kanker, pengembangan inisiatif terhadap pembangunan kembali rumah dan kota/desa, serta penguatan kebijakan dalam penanganan kenakalan remaja di Jepang (Lib Dems, 2019a).

Slogan “Jepang sebagai Bangsa Internasional”

Dengan menggunakan slogan “Jepang sebagai Bangsa Internasional”, ia juga berhasil mengamankan wilayah di negara-negara blok barat, mempertahankan sistem perdagangan bebas secara global, memperluas bantuan kepada negara-negara berkembang, serta meningkatkan peran ekonomi dan politik Jepang dalam komunitas internasional (Lib Dems, 2019a). Atas segala prestasi luar biasanya tersebut menjadikan pemerintahan Yasuhiro Nakasone sebagai masa kepemimpinan terpanjang ketiga di Jepang pasca perang dunia II yakni sebanyak 1.806 hari.

Sebagai kesimpulan, dalam politik domestiknya Yasuhiro Nakasone berupaya keras untuk mengonsolidasikan sistem politik Jepang pasca perang melalui serangkaian reformasi kebijakan administrasi, fiskal, pajak dan pendidikan. Keempat aspek tersebut menjadi titik tumpu perubahan di bawah kepemimpinannya sebab berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian yang berdampak pula terhadap kesejahteraan warga negara. Perubahan ini mengacu pada penyesuaian antar kepentingan nasional yang ingin dicapai dan ideologi yang tertanam dalam individu pemimpinnya.

BAB 29

TOSHIKI KAIFU

1989-1991

Perjalanan Karir Politik

Toshiki Kaifu adalah putra seorang pemilik studio fotografi di Tokyo Jepang yang lahir pada 2 Januari 1931 di Kota Nagoya. Kaifu ini merupakan lulusan dari Departemen Hukum Universitas Waseda, Tokyo, pada tahun 1954. Memasuki dunia politik, ia memenangkan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota Partai Liberal-Demokratik (LDP) pada tahun 1960 dan secara berturut-turut terpilih kembali setelah itu. Sebagai anggota Partai Demokrat Liberal, Toshiki Kaifu mencalonkan diri dengan sukses pada pemilihan umum Jepang 1960 dan menjabat sebagai anggota termuda



Gambar 29.1. Toshiki Kaifu
Sumber: Fandom, 2019

dari National Diet. Toshiki Kaifu menjabat selama enam belas periode, dengan total 49 tahun. Dia menjabat sebagai wakil sekretaris ketua Kabinet Perdana Menteri Miki Takeo pada tahun 1974-1976 dan kemudian menjadi menteri pendidikan pada 1976-1977 di bawah Perdana Menteri Fukuda Takeo. Ia memegang jabatan terakhir ini lagi pada 1985-1986 di bawah Perdana Menteri Nakasone Yasuhiro (Encyclopedia Britannica, 2020m).

Kaifu terpilih menjadi perdana menteri menggantikan Uno Sōsuke yang hanya menjabat tiga bulan dan kemudian mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri pada tahun 1989 karena skandal keuangan dan ketidakpuasan publik terhadap Partai Liberal-Demokratik yang memerintah. Kaifu pada 8 Agustus 1989 dipilih untuk mengisi masa jabatan Uno sebagai presiden partai, dan kemudian dipilih oleh Dewan Perwakilan untuk menggantikan Uno sebagai Perdana Menteri. Pada bulan Oktober 1989, Kaifu terpilih untuk masa jabatan dua tahun penuh sebagai presiden LDP (Partai Liberal-Demokratik), dan pada bulan Februari 1990 LDP di bawah kepemimpinannya memenangkan kemenangan besar dalam pemilihan umum nasional untuk Dewan Perwakilan, dengan mempertahankan mayoritas di badan legislatif tersebut (Encyclopedia Britannica, 2020m).

Kebijakan Luar Negeri

Beberapa capaian besar Toshiki Kaifu saat menjabat sebagai perdana menteri yaitu pada tanggal 10 Agustus 1991, Toshiki Kaifu menjadi pemimpin pertama yang melakukan kunjungan resmi ke Tiongkok dan memutuskan isolasi diplomatik Tiongkok setelah insiden

Tianmen Square pada tanggal 4 Juni 1989. Toshiki Kaifu kemudian juga mendapat capaian besar saat berhasil mengakhiri partisipasi Jepang dalam sanksi ekonomi terhadap China dan menawarkan pinjaman 949,9 juta dolar Amerika Serikat dan tambahan 1,5 juta dolar Amerika Serikat dalam bantuan darurat menyusul kerusakan banjir di China Selatan pada bulan Juni dan Juli 1991 (Reuters, 1991).

Kaifu kemudian menolak untuk mencalonkan diri kembali menjadi presiden LDP pada Oktober 1991 setelah dia kehilangan dukungan dari para pemimpin partai kunci, yang tidak setuju dengan upayanya untuk mereformasi politik elektoral Jepang. Di seluruh kabinetnya, faksi Toshiki Kaifu terlalu kecil untuk melakukan reformasi yang dia cari, dan dampak berkelanjutan dari skandal Sagawa Express menyebabkan banyak masalah. Akhirnya, masa jabatannya sebagai perdana menteri kemudian berakhir setelah ia mengundurkan diri pada November 1991 dan kemudian digantikan oleh Kiichi Miyazawa (Reid, 1992).

Setelah masa jabatannya berakhir, Kaifu kemudian tetap terlibat dalam politik. Pada tahun 1994 ia meninggalkan LDP untuk menjadi pemimpin Shinshintō (Partai Perbatasan Baru), tetapi setelah partai tersebut dibubarkan pada tahun 1997, Toshiki Kaifu mendukung partai Ichiro Ozawa sampai dia kembali bergabung ke Partai Liberal Demokratik pada tahun 2003. Ia kehilangan kursinya pada pemilu 2009 oleh calon LDP Mitsuhiro Okamoto, yang menyaksikan berakhirnya dominasi Partai Liberal Demokratik yang hampir tak terputus sejak 1955. Pada saat kekalahannya, Toshiki Kaifu merupakan anggota “*the lower house of the Diet*” terlama, dan dia juga mantan perdana menteri pertama yang dikalahkan dalam pemilihan ulang sejak 1963 (Encyclopedia Britannica, 2020m).

BAB 30

KIICHI MIYAZAWA

1991-1993

Perjalanan Karir Politik

Miyazawa Kiichi merupakan perdana menteri Jepang ke-78 dan menjabat dari 5 September 1991 sampai dengan 9 Agustus 1993. Ia berasal dari Partai Liberal Demokratik yang mana merupakan salah satu partai terbesar di Jepang saat itu. Namun sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang, Kiichi Miyazawa sebelumnya telah menempuh karier di bidang politik dan memegang berbagai posisi penting dalam pemerintahan Jepang. Posisi penting tersebut diantaranya, pada tahun 1953 ia terpilih menjadi anggota parlemen dan pada tahun 1962 ia berhasil mengamankan po-



Gambar 30.1. Kiichi Miyazawa
Sumber: Martin, 2007

sisi kabinet pertamanya sebagai direktur jenderal Badan Perencanaan Ekonomi. Selanjutnya, ia menjabat sebagai menteri perdagangan dan industri internasional pada tahun 1970 sampai 1971, menteri urusan luar negeri 1974 sampai 1976 dan menteri keuangan 1986 sampai 1988. Ia juga pernah menjabat sebagai sekretaris kabinet pada awal 1980-an dan sebagai wakil perdana menteri di kabinet Takeshita Noboru (Encyclopedia Britannica, 2020t).

Kariernya tentu saja tidak berjalan mulus begitu saja. Selama menjabat sebagai menteri keuangan pada tahun 1988, ia pernah terlibat dalam skandal penjualan perusahaan dan skandal penyusunan yang mengguncangkan pemerintahan Jepang, sehingga mengharuskannya untuk mengundurkan diri sebagai menteri keuangan pada saat itu. Namun, dia segera memulihkan reputasinya dan segera kembali ke tempat kekuasaan setelah terpilih sebagai presiden LDP pada 27 oktober 1991 serta menjadi perdana menteri pada 5 November 1991 (Encyclopedia Britannica, 2020t).

Kebijakan Luar Negeri

Selama dua tahun menjabat sebagai perdana Menteri Jepang, Kiichi Miyazawa mempresentasikan Jepang sebagai negara yang cinta damai. Ini tercermin dalam pidato Kebijakannya yang menetapkan “Perdamaian, Kebebasan dan Kemakmuran” sebagai tujuan bersama yang harus dikejar Jepang bersama dengan negara-negara lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Jepang menjalankan politik luar negerinya dengan pedoman: 1) Menjamin kesejahteraan Ekonomi dunia; 2) Memastikan Perdamaian Dunia; 3) Mempromosikan Nilai

Universal; 4) Menangani Masalah Global (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1992).

Melalui keempat pedoman tersebut Miyazawa telah mengambil langkah dan mengeluarkan beberapa kebijakan yang sangat penting seperti mengeluarkan peraturan yang kemudian mengharuskan Jepang untuk berpartisipasi dalam pengiriman pasukan ke luar negeri bersama PBB untuk misi perdamaian. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sejak 1992, Jepang secara aktif telah terlibat dalam upaya mengatasi konflik regional di seluruh dunia (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1992). Selain itu, pada masa pemerintahannya, prioritas kebijakan luar negeri Miyazawa diketahui berpusat pada pemeliharaan hubungan persahabatan antara Jepang dan Amerika Serikat. Miyazawa sendiri memiliki kemampuan linguistik dan pengalaman diplomatik yang mumpuni sehingga dengan kemampuan tersebut, Miyazawa mampu memperbaiki kemerosotan hubungan antara Jepang dan Amerika Serikat (Weeks, 1991).

Selain itu, selama menjabat sebagai perdana menteri, Kiichi Miyazawa mampu mendorong hubungan yang lebih baik dengan negara-negara tetangga atau negara-negara di kawasan Asia lainnya. Ia memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemeliharaan perdamaian di kawasan Asia, ia turut memberikan ide untuk melakukan peningkatan intensitas dialog keamanan dan politik antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1992).

Namun, pada tanggal 9 Agustus 1993, ia harus mengakhiri karirnya sebagai perdana Menteri. Ia digulingkan sebagai perdana menteri setelah diketahui tidak bisa meloloskan Rancangan Undang-Undang reformasi politik yang telah ia janjikan. Selain itu, dia juga terbukti tidak dapat menyatukan atau mengontrol faksi yang bertikai di dalam partai Liberal Demokratik sehingga beberapa faksi tersebut bergabung dengan partai-partai oposisi untuk mengeluarkan mosi tidak perca-

ya. Kemudian, Kiichi Miyazawa harus mengundurkan diri karena kalah dalam mosi tidak percaya dalam parlemen. Hal ini juga sekaligus menjadi akhir kekuasaan dan kendali atas Diet (parlemen) dari Partai Liberal Demokrat selama 38 tahun berturut-turut (Encyclopedia Britannica, 2020t).

Slogan “*Seikatsu Taikoku*”

Kiichi Miyazawa merupakan Perdana Menteri Jepang yang menjabat setelah Toshiki Kaifu. Adapun selama masa pemerintahannya, ia dikenal dengan pembentukan kabinetnya yang digambarkan sebagai awal dari pemerintahan arus utama yang konservatif. Serta dengan keahlian kebijakan yang dimilikinya membuat Miyazawa terkenal di Amerika Serikat maupun negara-negara lainnya (LDP, 2019).

Tak lama setelah menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang, Kiichi Miyazawa memberikan pidato kebijakan pertamanya pada sesi luar biasa Diet pada tanggal 8 November 1991. Di dalam pidatonya, Ia mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Jepang sebagai *standard of living great power* dengan slogan “*seikatsu taikoku*”. Slogan ini dimaknai dalam artian “*a great place to live*” dan “*a better quality of life*” (Edstrom, 1999: 153). Maksud slogan tersebut, ia ingin mempromosikan terciptanya negara yang hidup dan berpengetahuan luas yang standar hidupnya sedemikian rupa sehingga negara tersebut benar-benar dapat dikatakan sebagai negara yang maju, tidak hanya dalam artian materi melainkan juga dalam hal kualitas hidup yang kaya dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Adapun beberapa kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Kiichi Miyazawa sekaligus menjadi tantangan terpenting yang dihadapi kabinet Miyazawa antara lain adalah: 1) Mempromosikan kerja sama dengan *United Nations Peacekeeping Operations* (PKO);

2) Menangani perkembangan dalam negosiasi perdagangan multilateral putaran Uruguay di bawah *General Agreement on Traffics and trade* (GATT); dan 3) Reformasi politik (LDP, 2019).

30.4. Jepang Mengirim Pasukan Penjaga Perdamaian

Sehubungan dengan hal tersebut, tugas legislatif pertama yang dijalankan oleh Kabinet Miyazawa adalah memastikan pengesahan Rancangan Undang-undang kerjasama PKO. Adapun RUU ini memiliki lima syarat wajib bagi partisipasi Jepang dalam operasi PKO yang kemudian dimasukkan kedalam Undang-Undang. Diantaranya 1) Pihak yang terlibat dalam konflik harus menyetujui gencatan senjata; 2) Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus menyetujui pengenalan personel penjaga perdamaian; 3) Netralitas pasukan penjaga perdamaian harus diperhatikan dengan ketat; 4) Personel Jepang harus ditarik jika kondisi diatas tidak sepenuhnya terpenuhi; 5) Penggunaan senjata kecil hanya diizinkan dalam hal tindakan tersebut dianggap mutlak diperlukan untuk melindungi nyawa pasukan penjaga perdamaian (LDP, 2019).

Kemudian pada tanggal 15 Juni 1992, RUU PKO ini resmi disahkan. Terbukti UU ini dapat dikatakan benar-benar merupakan pencapaian luar biasa yang sangat meningkatkan kemampuan Jepang untuk berkontribusi pada komunitas internasional. Berdasarkan UU ini, Jepang dapat mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Kamboja dan Mozambik serta berpartisipasi dalam upaya bantuan pengungsi di Rwanda. Kedua aktivitas inilah yang meningkatkan reputasi Jepang di kancah Internasional (LDP, 2019).

Kemudian, selama periode Pemerintahan Miyazawa, Jepang merupakan salah satu negara yang menikmati keuntungan maksimal dari perdagangan internasional di bawah sistem perdagangan bebas multilateral berdasarkan GATT di era pascaperang. Dengan demikian, sangatlah penting bagi Jepang untuk memperkuat dan mempertahankan

sistem perdagangan bebas multilateral melalui penyelesaian awal dan sukses dari negosiasi Putaran Uruguay, yang tujuan utamanya adalah untuk menetapkan aturan baru untuk perdagangan internasional. Putaran Uruguay sedang dalam fase terakhirnya, Jepang pada bagiannya, harus terus melakukan upaya untuk menyukseskan proses negoisiasi (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1992).

Reformasi Politik

Dalam hal mencapai reformasi politik, pada masa pemerintahan Kiichi Miyazawa dianggap menjadi tugas yang terbilang sulit. Hal ini dikarenakan, terdapat banyak sekali skandal yang terjadi dalam masa pemerintahan Kiichi Miyazawa ini. Miyazawa sendiri telah berjanji akan berkomitmen penuh dalam tercapainya reformasi politik ini. Ia menginstruksikan untuk merumuskan proposal konkret untuk kemudian diajukan dan disahkan oleh Diet, yang mana proposal tersebut mengenai empat hal berikut:

1. Revisi tentang pembagian kursi untuk distrik pemilihan majelis rendah;
2. Keuangan politik;
3. Etika politik; dan
4. Reformasi parlementer.

Namun, untuk mencapai konsensus di dalam partai tentang masalah ini sangat sulit. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai reformasi macam apa yang harus dilakukan (LDP, 2019). Selain itu, masalah perpecahan yang terjadi di dalam Partai Demokrat Liberal juga menjadi faktor yang menyebabkan sulit tercapainya reformasi politik ini.

Pada 11 Desember 1992, Perdana Menteri Kiichi Miyazawa kemudian memutuskan untuk merombak personel kabinet dan par-

tainya. Hal ini, ia lakukan dengan maksud untuk menstabilkan partai secara internal dan memperkuat tekadnya untuk mengejar reformasi politik. Kemudian ia kembali menegaskan komitmennya untuk melaksanakan reformasi politik yang fundamental. Namun, pendapat dalam LDP terpecah dalam masalah ini. Pengesahan RUU reformasi Politikpun harus ditunda sehingga memunculkan tanggapan dari Partai oposisi berupa pengajuan Mosi tidak percaya di Kabinet. Miyazawa Kiichipun harus mengundurkan diri sebagai perdana menteri akibat kekalahan dalam mosi tidak percaya ini. Hal tersebut sekaligus mengakhiri masa jabatan sebagai Perdana Menteri Jepang (LDP, 2019).

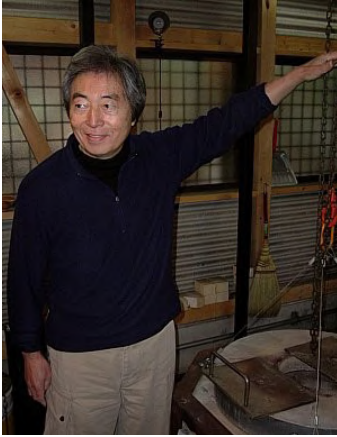
BAB 31

MORIHIRO HOSOKAWA

1993-1994

Perjalanan Karir Politik

Morihiro Hosokawa lahir di Tokyo, Jepang, pada 14 Januari 1938. Morihiro Hosokawa merupakan seorang Perdana Menteri Jepang yang mulai menjabat pada 9 Agustus 1993 sampai 28 April 1994. Ia berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh di Jepang, di mana berdasarkan garis keturunan ayahnya merupakan keturunan Hosokawa keluarga *samurai* ternama dalam sejarah Jepang kuno. Sedangkan berdasarkan garis keturunan ibunya, ia adalah cucu Fumimaro Konoé mantan Perdana Menteri Jepang yang pernah menjabat tiga periode pada masa perang dunia II. Selain itu, Morihiro Ho-



Gambar 31.1. Morihiko Hosokawa
Sumber: Yellin, 2005

sokawa juga masih terhitung keluarga Kaisar Akihito. Setelah lulus sebagai sarjana hukum di Universitas Sophia di Tokyo, ia menjadi reporter dan jurnalis di Asahi Shimbun pada tahun 1968. Pengalaman yang ia miliki sebagai jurnalis ini membantu ia memahami politik, dan menjadi pendorong ia memutuskan untuk terjun dalam ranah politik (Watanabe, 2016: 345).

Awal masuk ke dunia politik, Morihiko Hosokawa bergabung dalam partai terkuat masa itu yakni Partai Demokratik Liberal (LDP) dan kemudian berhasil menjadi anggota Majelis Tinggi pada 1969. Selanjutnya, ia aktif berpolitik dan berkampanye sehingga berhasil terpilih dan diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan. Setelah menjadi Wakil Menteri Keuangan, Morihiko semakin memahami situasi didalam pemerintahan dikendalikan dan sulit untuk diubah. Pada tahun 1983 Morihiko kemudian mengundurkan diri dan memilih pulang ke kampung halamannya di Pulau Kyushu, Provinsi Kumamoto. Morihiko kemudian memutuskan ikut serta sebagai kandidat dalam pemilihan gubernur di wilayah Kumamoto dan berhasil terpilih. Morihiko menjabat selama dua periode, meskipun ia berpotensi besar menang dalam pemilihan kandidat gubernur periode ketiga, Morihiko memilih mundur dari kursi pemerintahan daerah (Watanabe, 2016: 346).

Kebijakan Luar Negeri

Sejak lama, Morihiko Hosokawa memiliki ambisi dan keinginan kuat untuk mengubah sistem politik lama Jepang sebab ia menilai dalam pemerintahan masa itu terdapat skandal keuangan dalam hal ini masalah korupsi politik. Untuk mewujudkan ambisinya menciptakan

pemerintahan yang bersih dari korupsi politik, Morihiro kemudian bertekat membentuk *Japan New Party* atau Partai *Nihon Shinto* ditahun 1992. Selanjutnya pada tahun 1993 tepatnya tanggal 9 Agustus Morihiro terpilih dan diangkat sebagai Perdana Menteri Jepang. Ia menjabat selama 8 bulan namun kemudian mengundurkan dirinya pada 28 April 1994 karena tuduhan melakukan manipulasi keuangan oleh LDP. Selama menjabat sebagai perdana enteri, Morihiro berhasil mendapat pengesahan RUU untuk mengubah pola sistem pemilu sebagai upayanya dalam membatasi korupsi politik dalam pemerintahan dan berhasil meningkatkan kuota kekuatan suara relatif di daerah perkotaan (Encyclopedia Britannica, 2020i).

Untuk kebijakan luar negeri, ketika menjadi Perdana Mentrei Jepang, ia mengeluarkan pengakuan bahwa Jepang benar telah melakukan agresi pada perang dunia II dan mengakui kesalahan dari negaranya serta mengeluarkan permintaan maaf bagi pihak-pihak yang menjadi korban perang dunia II. Morihiro membangun citra dan menjalin hubungan luar negeri yang baik sehingga menjadi Perdana Menteri Jepang yang cukup dikenal masyarakat luar. Ia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Presiden Amerika, Presiden William J. Clinton. Selain itu juga, Morihiro ikut hadir dalam pertemuan APEC (*Asia-Pacific Economic Conference*) di Seattle pada 20 November 1993 (Watanabe, 2016: 349).

Japan New Party

Morihiro Hosokawa adalah perdana menteri Jepang pada 9 Agustus 1993 sampai 28 April 1994. Sebelum menjadi perdana menteri Jepang, Morihiro Hosokawa punya latar belakang kedudukan dan pengaruh yang cukup kuat dalam politik Jepang dan sudah dikenal oleh publik. Dimana Ia merupakan keturunan keluarga samurai ternama dalam sejarah Jepang kuno, dan cucu Fumimaro Konoe mantan Per-

dana Menteri Jepang. Selain itu pengalamannya sebagai jurnalis dan kemampuan ia menarik perhatian publik kemudian yang menjadi salah satu faktor pendukung hingga ia berhasil menduduki kursi perdana menteri (Watanabe, 2016: 345).

Morihiro Hosokawa yang merupakan ketua dan pendiri dari Japan New Party termasuk bersama koalisinya berhasil menjatuhkan LDP yang saat itu merupakan partai tunggal dominan di Jepang, dan terpilih menduduki kursi Perdana Menteri Jepang 1993. Morihiro Hosokawa merupakan perdana menteri non-LDP pertama dalam empat dekade, dan mengangkat panji reformasi elektoral untuk merubah pola sistem pemilu dan berhasil mendapat pengesahan RUU untuk meningkatkan kuota kekuatan suara relatif di daerah perkotaan (Ando et al., 2015: 16).

Meskipun hanya menikmati masa jabatan kurang lebih sembilan bulan, waktu yang tergolong singkat, pemecatan LDP menandai titik balik dalam dinamika politik pasca-perang di Jepang, dan hal itu menunjukkan gambaran bahwa partai oposisi buktinya bisa menjadi pesaing sejati bagi partai tunggal dalam pemerintah. Selama periode non-LDP, yakni pemerintahan baru Perdana Menteri Morihiro Hosokawa berhasil mendorong perubahan penting dalam sistem pemilihan atau elektoral, yang menandai multipartai yang lebih sistemis mulai bisa diwujudkan. 480 kursi di Majelis Rendah Jepang (*House of Representatives*) dipilih dari konstituensi multi-anggota, sistem baru yang dipasang digabungkan dari representasi proporsional di tingkat blok (180 kursi didistribusikan 11 blok secara nasional) dengan daerah pemilihan beranggota tunggal (300 kursi). Perubahan yang digagas ini berarti bahwa partai besar tidak bisa lagi mendominasi pemilihan umum dan mendominasi daerah pemilihan dengan banyak calon. Perubahan ini juga menghasilkan penguatan peran organisasi partai nasional, sejak kandidat tunggal dari partai yang sama tidak lagi bersaing satu sama

lain. Situasi ini menyebabkan para calon mengembangkan kelompok pendukung lokalnya sendiri (*koenkai*) dan menjalankan kampanye yang sangat personalistik (Tkach, 2003: 107).

Selain membawa perubahan pada sistem politik Jepang masa itu, Morihiro Hosokawa memiliki kepribadian yang sangat berbeda dibandingkan dengan perdana menteri yang menjabat sebelumnya. Selama 38 tahun pemimpin-pemimpin Partai Demokrat Liberal yang memerintah Jepang, waktu senggang pribadi, keterbukaan publik, dan populisme hampir tidak diperjuangkan oleh perdana menteri Jepang. Hal tersebut sangat berbeda dengan kepribadian Morihiro Hosokawa, dimana sejak dia menduduki kursi Perdana Menteri, ia terlihat menikmati waktu pribadi, dan sangat terbuka kepada publik. Pada konferensi pers pertama Hosokawa, ia membuat perubahan mencolok dalam gaya dan substansi. Alih-alih duduk di meja memberikan jawaban yang tidak jelas atas pertanyaan yang diajukan dari jurnalis yang telah dipilih sebelumnya, seperti yang dilakukan di masa lalu, Hosokawa berdiri di podium, secara spontan memanggil reporter sendiri dan memberikan jawaban langsung secara singkat dan jelas (T. Watanabe, 1993).

BAB 32

TOMIICHI MURAYAMA

1994-1996

Perjalanan Karier Politik

Tomiichi Murayama adalah perdana menteri Jepang yang ke 81. Ia lahir pada tanggal 23 maret 1924. Saat menjabat sebagai perdana menteri, Murayama berusia 70 tahun. Murayama adalah seorang politikus yang menjabat sebagai perdana menteri pada tanggal 30 Juni 1994 hingga 1996. Murayama merupakan ketua partai sosial demokrat Jepang (SDPJ) pada Agustus 1993 yang merupakan partai terbesar ketiga di dewan perwakilan, majelis rendah dari diet nasional. Murayama terpilih menjadi perdana menteri karena mendapat dukungan dari aliansi tripatit yang terdiri dari partai demokrat liberal



Gambar 32.1. Tomiichi Murayama
Sumber: Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1995

(LDP), partai sosial demokrat Jepang, dan partai baru sakigake setelah perdana menteri Tsutomu Hata mengundurkan diri sebagai perdana menteri saat itu. Setelah satu tahun menjabat, tepatnya pada Agustus 1995 pertama kalinya Murayama merombak kabinetnya (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1995).

Murayama juga merupakan perdana menteri sosialis pertama Jepang sejak 1948. Pada masa pemerintahannya, Murayama membantu menyatukan koalisi yang rapuh. Namun karena tidak pernah memiliki pemahaman yang kuat mengenai kekuasaan, Murayama mengundurkan diri sebagai perdana menteri tahun 1996 yang kemudian digantikan oleh Ryutaro Hashimoto pimpinan dari partai demokrat liberal (Encyclopedia Britannica, 2018).

Permintaan Maaf Internasional

Saat masa pemerintahannya, Murayama terkenal saat peringatan 50 tahun setelah berakhirnya perang II tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1995, yang secara resmi mengumumkan pernyataan permintaan maaf atas tindakan agresi, penjajahan dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh tentara Jepang saat itu. Tentara Jepang meninggalkan penderitaan dan kesedihan bagi banyak orang, juga meninggalkan bekas luka menyakitkan bagi orang-orang yang mendapat perlakuan tidak senonoh saat masa perang. Seperti dengan wanita-wanita Korea Selatan yang digunakan untuk memuaskan nafsu birahi para tentara Jepang saat itu. Wanita yang mereka sediakan untuk memuaskan hasrat mereka dikenal dengan sebutan *Jugun Lanfu*. Saat masa perang, wanita Korea-lah yang paling banyak menjadi korban tentara Jepang. Wanita

Korea diminati para tentara Jepang meski saat itu tidak hanya wanita Korea yang dibawa oleh pemerintah Jepang namun ada juga para wanita yang berasal dari Filipina dan Indonesia (Fauzia, 2017).

Murayama saat peringatan 50 tahun setelah berakhirnya perang, mengumumkan inisiatif perdamaian dan persahabatan serta program pertukaran terhadap negara-negara tetangga Asia bekas jajahan. Pernyataan ini merupakan bentuk kebijakan eksternal Jepang guna membangun perdamaian dunia dan membangun hubungan baik dengan negara-negara Asia. Dengan saling memberi pengertian dan keyakinan Jepang berharap dapat mengatasi rasa sakit pada masa lalu serta dapat bersama-sama membangun masa depan Asia Pasifik (Cobbold, 1996).

Permintaan maaf Murayama diketahui juga sebagai permintaan maaf yang paling eksplisit yang pernah dilakukan oleh pejabat pemerintah Jepang atas kekejaman masa perangnya, mengingat tidak hanya Murayama yang telah melakukan hal tersebut namun pemimpin sebelumnya juga pernah melakukan hal yang sama. Maka permintaan maaf internasional Murayama disebut juga sangat bersejarah dalam masa pemerintahan Jepang. Permintaan maaf dalam hal ini tentunya juga difokuskan pada komunitas di hubungan internasional, pemimpin Jepang ke Jerman hingga Inggris meminta maaf atas pelanggaran yang terjadi bertahun-tahun, dekade bahkan ratusan tahun sebelumnya. Karena dengan pelanggaran di masa lalu bisa saja menjadi pemicu rentannya sebuah hubungan negara satu dengan negara yang lainnya. Terkhusus dengan Korea Selatan yang paling mengalami trauma akan masa lalu saat perang. Dalam masa pemerintahan Tomiichi Murayama tidak banyak kebijakan yang ia keluarkan mengingat ia hanya menjabat selama dua tahun, namun hanya saja ia terkenal dengan pidato permintaan maafnya terhadap negara-negara bekas koloninya (Edwards, 2005).

Dari sinilah kita dapat melihat bahwa permohonan maaf yang berfokus pada komunitas dalam urusan internasional adalah sebagai langkah awal bagi negara yang pernah melakukan kekejaman dan kesalahan pada masa lalu untuk membangun kembali kekuatan dan ikatan antar komunitas politik dan juga memperdalam hubungan antar berbagai kelompok dalam suatu negara.

BAB 33

RYŪTARŌ HASHIMOTO

1996-1998

Perjalanan Karier Politik

Ryutaro Hashimoto merupakan seorang politisi asal Jepang yang lahir pada 29 Juli 1937. Ayah Ryutaro adalah seorang politisi. Sang ayah, Ryogo Hashimoto pernah menjabat sebagai menteri pendidikan, serta menteri kesejahteraan dan kesehatan Jepang pada masa pemerintahan Perdana Menteri Nobusuke Kishi. Ryutaro merupakan Perdana Menteri Jepang yang menjabat selama dua tahun, masa jabatan dimulai pada tahun 1996 hingga tahun 1998. Hashimoto berasal dari Partai Liberal Demokratik (LDP). Ryutaro mengawali karir politiknya pada tahun 1963, ditandai dengan terpilihnya ia seba-



Gambar 33.1. Ryutaro Hashimoto
Sumber: Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2019a

gai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jepang. Ryutaro mewakili distrik Okayama. Ketika menjadi anggota DPR, Ryutaro menjabat sebagai direktur divisi urusan sosial, bidang sosial dan perburuhan (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2019a).

Pada tahun 1978, Ryutaro diangkat menjadi Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang pada masa pemerintahan Perdana Menteri Masayoshi Ohira. Pada saat menjadi menteri kesehatan, ia membuat kebijakan seputar kesejahteraan sosial dan perawatan medis. Tahun 1980 hingga tahun 1986, Ryutaro menjabat sebagai Ketua Komisi Riset di Partai Liberal Demokratik (LDP) divisi Administrasi Publik dan Keuangan. Selama masa jabatannya, ia mengupayakan reformasi administrasi dan pemulihan keuangan publik. Selanjutnya, pada tahun 1986 hingga tahun 1987, Ryutaro Hashimoto menjabat sebagai Menteri Perhubungan dan Transportasi Jepang. Ketika itu ia berhasil menyelesaikan moda perkeretaapian nasional Jepang. Dari tahun 1987-1989, Ryutaro menjabat sebagai sekretaris jenderal Partai Demokratik Liberal, perannya sebagai sekretaris jenderal membuatnya harus bertanggung jawab terhadap semua urusan di dalam partai (Encyclopedia Britannica, 2020f).

Setelah menyelesaikannya perannya sebagai sekretaris jenderal di partainya, Ryutaro menjabat sebagai Menteri Keuangan Jepang yang dimulai pada tahun 1989 hingga tahun 1991. Saat menjadi Menteri Keuangan, Ryutaro mewujudkan reformasi pajak. Di tahun 1991, Ryutaro Hashimoto mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan dikarenakan banyaknya permasalahan dan skandal yang terjadi di industri perbankan Jepang (Encyclopedia Britannica, 2020f).

Japanese Silk Road Diplomacy

Kemudian pada bulan Juni 1994, Ryutaro terpilih sebagai Menteri Industri dan Perdagangan Internasional Jepang. Sejak saat itu, Ryutaro membuat berbagai kebijakan untuk industri dan perdagangan. Ryutaro fokus pada penguatan sistem perdagangan multilateral serta menjaga liberalisasi perdagangan dan investasi di negaranya. Setelah menjadi Menteri Industri dan Perdagangan Internasional, Ryutaro beralih dan terpilih menjadi Wakil Perdana Menteri Jepang di tahun 1995-1996. Kemudian berlanjut menjadi Perdana Menteri dari tahun 1996-1998 (McNeill, 2006). Selama menjadi perdana menteri, ia menangani masalah domestik, salah satunya adalah reformasi administrasi dan deregulasi (Mishima, 1998). Dalam urusan internasional, pada tahun 1997, Ryutaro mengeluarkan gagasan "*Japanese Silk Road Diplomacy*" yang mana menjadi ajang diplomatik internasional yang menarik konektivitas dan kebangkitan jalur sutra di Asia Tengah (Dadabaev, 2019).

Di tahun yang sama pula, yaitu 1997, pada masa pemerintahannya, ia menerapkan kenaikan pajak nasional untuk mengurangi defisit anggaran negara, namun perekonomian Jepang terus mengalami penurunan hingga mengalami resesi ekonomi terparah yang pernah terjadi di negara tersebut. Di tahun berikutnya, yaitu 1998, terjadi krisis moneter yang melanda. Akhirnya Ryutaro Hashimoto mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Jepang (Encyclopedia Britannica, 2020f). Terlepas dari jabatannya sebagai perdana menteri di tahun 1998, Ryutaro masih terus aktif di dunia politik. Ryutaro dipilih menjadi ketua fraksi partainya, yaitu Partai Liberal Demokratik. Namun pada tahun 2004, Ryutaro mengundurkan diri sebagai ketua fraksi partai LDP karena terlibat kasus kampanye ilegal berkedok donasi. Pada tahun 2005, secara efektif pensiun dari politik. Ryutaro meninggal pada tanggal 1 Juli 2006 di Tokyo (Peoplepill, 2019).

Diplomasi Eurasia

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Ryutaro Hashimoto merupakan Perdana Menteri Jepang yang menjabat selama dua tahun, masa jabatan dimulai pada tahun 1996 hingga tahun 1998. Hashimoto berasal dari Partai Liberal Demokratik (LDP). Ryutaro terpilih menjadi Wakil Perdana Menteri Jepang di tahun 1995-1996. Kemudian berlanjut menjadi perdana menteri dari tahun 1996-1998 (Britannica, 2020). Selain itu, pada masa jabatannya, Ryutaro juga berperan dalam diplomasi Eurasia (Eropa-Asia). Dari tahun 1990-1997, fokus utama politik internasional adalah memenuhi tantangan yang ditimbulkan akibat berakhirnya perang dingin (1989-1991). Meredanya perang ideologi tersebut membuka ruang bagi upaya diplomatik Jepang, sekaligus memberikan kesempatan bagi Jepang untuk mengembangkan politik luar negerinya di Asia Timur. Berakhirnya perang dingin, membawa perubahan pada sistem politik Jepang. Terjadi reformasi sistem politik, hukum, dan ekonomi yang dianggap telah ketinggalan zaman untuk membangun sistem negara yang kuat dan mandiri serta menyesuaikan realitas internasional (Kazuhiko, 2014).

Tantangan yang dihadapi Ryutaro dalam membuat kebijakan luar negeri ialah membuat peta jalur untuk negaranya dalam menghadapi dua kekuatan yang muncul yaitu Tiongkok dan Amerika yang meningkat. Diplomasi Eurasia ini merupakan jawaban atas tantangan yang dihadapi oleh Ryutaro. Tiongkok berseteru dengan Amerika, penyebabnya adalah Taiwan. Ryutaro baru menjabat dalam hitungan minggu ketika terjadi krisis regional tersebut. Ryutaro fokus pada keamanan warga negara dan keamanan wilayah pesisir Jepang. Ryutaro harus menyesuaikan kebijakan luar negerinya. Ryutaro meningkatkan hubungan bilateral dengan Tiongkok dan memastikan bahwa Jepang tidak akan berada dalam posisi yang memperburuk situasi krisis yang

terjadi pada dua kekuatan besar tersebut. Ryutaro mengeluarkan upaya strategis yang dapat diterapkan seluas mungkin untuk memperkuat kebijakan luar negeri Jepang secara menyeluruh. Kebijakan tersebut dikenal sebagai diplomasi Eurasia. Secara singkat, diplomasi Eurasia adalah gagasan Ryutaro berisikan mengenai gagasan untuk menarik Rusia ke Asia Pasifik dan memperkenalkan dinamika kawasan baru yang nantinya akan memberi Jepang lebih banyak ruang dan kesempatan untuk netral antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Selain itu, Ryutaro ingin menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan internasional, yaitu sengketa wilayah utara dengan Russia, empat pulau di Utara yaitu Hokkaido yang direbut Uni Soviet pada hari terakhir Perang Dunia II (Kazuhiko, 2014).

Sejak saat itu, Kementrian Luar Negeri Jepang sibuk dengan berbagai inisiasi kerjasama dengan Rusia. Di bidang ekonomi, kebijakan baru memfokuskan pada kerja sama ekonomi Ryutaro Hashimoto dengan Boris Yeltsin (Presiden Rusia tahun 1991-1999). Atas inisiatif Ryutaro, negara-negara anggota forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik memutuskan pada pertemuan November 1997 di Vancouver, untuk mengakui Rusia sebagai anggota di tahun berikutnya. Hal itu merupakan pencapaian terbaik untuk diplomasi Eurasia di Jepang (Paramonov & Puzanova, 2018).

KTT Jepang-Russia pada April 1998 di Kawana (Australia), pemerintah Jepang mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah territorial dengan resolusi perdamaian. Namun, hal tersebut merupakan akhir dari diplomasi dengan Russia di era Ryutaro. Pada musim panas, Rusia diguncang krisis keuangan dan menyebabkan kesehatan Yeltsin menurun. Di Jepang, LDP mengalami kemunduran dalam pemilihan dewan, karena pemilih menolak kebijakan ekonomi pemerintah, sekaligus telah terjadi krisis moneter pada saat itu. Ryutaro pun terpaksa mengundurkan diri (Kazuhiko, 2014).

BAB 34

KEIZO OBUCHI

1998-2000

Perjalanan Karier Politik

Keizo Obuchi merupakan Perdana Menteri Jepang yang lahir pada tanggal 25 Juni 1937. Sebelum menjabat sebagai perdana menteri, ia merupakan anggota parlemen Jepang selama lebih dari 30 tahun, ia kemudian menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Jepang pada tahun 1997 hingga terpilih menjadi perdana menteri di usianya yang ke- 60 tahun (UNESCO, 2019). Ia menjabat sebagai perdana menteri menggantikan Ryutaro Hashimoto yang dipaksa mengundurkan diri karena dianggap kurang berupaya atau tidak becus dalam memperbaiki perekonomian yang gagal. Keizo Obuchi menjabat



Gambar 34.1. Keizo Obuchi
Sumber: UNESCO, 2019

sebagai perdana menteri selama kurang lebih dua tahun yakni pada pertengahan tahun 1998 hingga awal tahun 2000 di bawah naungan Partai Liberal Demokratik (LDP).

Pada awal masa jabatannya, ia diberi julukan *cold pizza* oleh masyarakat Jepang dikarenakan ia dianggap sebagai sosok yang biasa saja, hambar dan tidak karismatik. Bahkan kritikus Jepang memprediksi bahwa Keizo Obuchi tidak akan bertahan lama menjabat sebagai perdana menteri. Meskipun ia pernah menjabat sebagai menteri luar negeri, Obuchi dianggap terlalu berhati-hati atau tidak berani untuk melakukan reformasi luas yang diperlukan untuk menyelesaikan krisis keuangan terburuk Jepang dalam beberapa dekade dimana sistem perbankan negara runtuh, pengangguran meningkat dan dana pensiun publik *running dry* (Sims, 2000).

CJK FTA

Namun tidak seperti yang diperkirakan, selain sikapnya yang lemah lembut dan tenang dalam menghadapi masalah, ia merupakan orang yang berintegritas. Ia membantah semua anggapan dari masyarakat dengan memperlihatkan sikap tegas serta keahlian dan keberanian politiknya yang mana dengan cepat memperbaiki kebijakan lama yang cenderung tidak mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik dan sejumlah langkah ekonomi lainnya melalui parlemen yang mampu menghentikan sementara kemerosotan ekonomi Jepang (Sims, 2000). Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, Keizo Obuchi dianggap berhasil menunjukkan beberapa tanda perbaikan ekonomi. Keizo Obuchi berhasil memperbaiki kondisi perekonomian negaranya sehingga ia mendapat dukungan dari masyarakat. Pembangunan

ekonomi yang dijalankannya dapat mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Ia juga dikenal di level internasional karena kemampuannya dalam kerjasama dengan negara-negara lain. Kerja sama ini membuat perekonomian di Jepang semakin baik.

Salah satu kebijakannya dalam tujuan untuk membangun perekonomian Jepang ditandai dengan rencana pembentukan kebijakan *China-Japan-Republic of Korea Free Trade Agreement* (CJK FTA) pada tahun 1999 – 2003. Kebijakan ini dibentuk mengingat bahwa ketiga negara tersebut yakni China, Jepang, dan Korea Selatan memiliki blok perdagangan yang besar di dunia internasional. Dengan pembentukan FTA diharapkan bahwa tidak hanya akan membawa keuntungan bagi negara-negara yang terlibat tetapi bahkan dapat menguntungkan perekonomian dunia. Ketiga negara ini pertama kali bertemu atas inisiasi Keizo Obuchi dalam pertemuan ASEAN Plus Three di Manila untuk membahas terkait rencana kerja sama ekonomi trilateral yang kemudian sepakat untuk melakukan *joint research* (Yeo, 2017: 70-71).

Selain berfokus untuk memajukan perekonomian Jepang, Obuchi juga berfokus untuk membangun sektor pendidikan dan penelitian dengan mempercepat transfer teknologi dari universitas. Proyek Perdana Menteri Keizo Obuchi ini bertujuan untuk mendorong industri baru di berbagai bidang seperti bioteknologi, teknologi informasi dan teknik lingkungan. Obuchi mengharapkan bahwa melalui proyek ini akan tercipta industri kompetitif dengan meningkatkan kolaborasi dengan lembaga penelitian yang dikelola pemerintah (Saegusa, 1999).

Namun sangat disayangkan, di umurnya yang ke-62 tahun tepatnya pada tanggal 14 Mei tahun 2000, ia menghembuskan nafas terakhir dan dibebaskan dari tugasnya sebagai perdana menteri. Dokter yang menanganinya mengatakan bahwa ia menderita stroke pada awal April dan meninggal karena komplikasi *stroke* (Sims, 2000). Tugasnya

sebagai perdana menteri kemudian digantikan oleh Yoshiro Mori yang merupakan sekretaris jenderal Partai Demokrat Liberal (*Liberal Democratic Party*).

Sengketa Teritorial atas Kepulauan Kuril

Keizo Obuchi memulai kariernya sebagai politisi pada usia muda yakni 26 tahun, ketika ia terpilih menjadi anggota DPR pada November 1963. Posisi tersebut merupakan batu loncatannya untuk mencapai posisi tingkat kabinet pada tahun 1970 dengan penunjukannya sebagai wakil menteri parlemen dan telekomunikasi. Sejak saat itulah ia tetap terlibat dalam urusan atau pekerjaan yang berkaitan dengan sektor politik. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Keizo Obuchi telah menjabat sebagai anggota parlemen Jepang selama lebih dari 30 tahun, menjadi Menteri Luar Negeri Jepang pada tahun 1997 serta terpilih sebagai Perdana Menteri pada tahun 1998. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa pekerjaan yang ia lakukan tidak terlepas dari hal-hal yang berbau politik. Selain itu, Keizo Obuchi merupakan anak dari seorang politikus sehingga tidak aneh jika ia berkecimpung di dunia politik.

Berbicara tentang kebijakannya selama menjabat sebagai prime minister, Obuchi berfokus pada dua masalah utama, yakni menandatangani *peace treaty* dengan Rusia dan menghidupkan kembali perekonomian Jepang. Terkait kebijakan pertama yakni penandatanganan perjanjian damai dengan Rusia, Obuchi bermaksud untuk memperbaiki hubungan bilateral antara kedua negara. Hal itu dikarenakan ketegangan dalam hubungan antara Jepang-Uni Soviet (saat ini Rusia) memiliki akar sejarah yang dalam, salah satunya pada masa persaingan kekaisaran Jepang dan Soviet untuk menguasai Laut Asia Timur. Pemerintah Soviet menolak untuk menandatangani perjanjian damai tahun 1951 sehingga situasi perang antara Uni Soviet dan Jepang seca-

ra teknis berlangsung hingga tahun 1956 yang diakhiri dengan Deklarasi Bersama Soviet-Jepang tahun 1956, namun perjanjian perdamaian formal antara Uni Soviet dan Jepang masih belum ditandatangani (Chang, 1998: 172). Selain itu hambatan utama dalam hubungan baik antara kedua negara tersebut ialah sengketa teritorial atas kepulauan Kuril.

Beberapa masalah yang disebutkan di atas kemudian dianggap sebagai sumber ketegangan antar kedua negara karena menciptakan konflik atau ketegangan lainnya yang berlarut-larut. Maka dari itu perlu adanya pihak penengah atau setidaknya keinginan untuk berdamai. Oleh karena itu, sejak pertengahan 1990-an, Rusia dan Tokyo mulai melakukan berbagai upaya bersama untuk mencapai kesepakatan guna meningkatkan hubungan bilateral. Pada tahun 1997, Ryutaro Hashimoto (PM sebelum Obuchi) mengusulkan kepada mitranya dari Rusia yakni Boris Yeltsin, agar keduanya (Rusia-Jepang) memulai proses penguatan hubungan kerja sama meskipun sengketa teritorial atas Kuril Selatan atau Teritorial Utara belum mencapai kesepakatan. Satu tahun berikutnya pada 1998, Presiden Yeltsin dan Perdana Menteri Keizo Obuchi setuju untuk meluncurkan proyek pembangunan bersama atas sengketa tersebut dalam waktu dekat. Selain itu, mengingat bahwa perselisihan tentang masalah teritorial mengakibatkan hubungan diplomatik yang dingin antara kedua negara selama hampir setengah abad, pendekatan baru-baru ini tidak hanya berarti perubahan substansial dalam hubungan antara kedua negara, tetapi juga bermanfaat untuk merangsang situasi kerja sama di antara negara-negara lain di Laut Asia Timur (Chang, 1998: 189).

Perbaiki Siklus Resesi

Adapun terkait pemulihan perekonomian Jepang, Obuchi mengatakan bahwa saat itu situasi ekonomi Jepang sedang terjerat dalam

“siklus resesi”, menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan lembaga keuangan, ketidakamanan pekerjaan, dan faktor negatif lainnya yang menurunkan konsumsi, investasi pabrik serta peralatan dan investasi perumahan. Hal ini dikombinasikan dengan penurunan harga tanah dan saham yang pada gilirannya menyebabkan kontraksi kredit dan penarikan modal. Agar Jepang dapat keluar dari siklus ini dan mengembalikan ekonomi ke jalur pemulihan dalam satu atau dua tahun, sistem keuangan perlu segera direvitalisasi dan langkah-langkah pemulihan ekonomi tersebut termasuk perluasan investasi publik dan pengurangan pajak permanen. Dalam pidatonya di *144th session of the diet*, ia mengatakan bahwa pemerintahannya telah membuat keputusan yang berani dengan mengambil langkah besar dan memulai proses penerapan langkah-langkah ini (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1998).

Selain itu, PM Obuchi mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan paket ekonomi darurat dengan total skala proyek melebihi 17 triliun yen, yang berarti lebih dari 20 triliun Yen jika termasuk pengurangan pajak permanen dengan tujuan menciptakan satu juta pekerjaan baru dan mencapai prospek pekerjaan yang lebih baik melalui komitmen kuat untuk menciptakan permintaan dan meyakini bahwa ekonomi mencapai pertumbuhan positif pada tahun fiskal 1999, menciptakan lapangan kerja dan bisnis tanpa meningkatkan pengangguran serta meningkatkan kerja sama internasional. Ia mengatakan akan berusaha sebaik mungkin untuk mempromosikan rencana ekonomi ini dan berbagai tindakan lainnya agar selanjutnya dapat memperbaiki siklus resesi, mengembalikan ekonomi Jepang ke pertumbuhan positif pada tahun fiskal 1999 dan mencapai kebangkitan ekonomi sejati pada tahun 2000 (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1998).

BAB 35

JUNICHIRO KOIZUMI

2001-2006

Perjalanan Karier Politik

Junichiro Koizumi adalah perdana menteri Jepang yang berasal dari partai paling terkemuka dan berkuasa di Jepang yaitu *Liberal Democratic Party* (LDP) dan merupakan perdana menteri Jepang yang ke-85. Junichiro Koizumi adalah perdana menteri Jepang yang terpilih melalui Pemilihan Umum Ketua LDP pada tanggal 24 april 2001 dengan mengalahkan tiga pesaingnya yaitu, Shizuka Kamei, Ryutaro Hashimoto dan Taro Aso. Koizumi memenangkan pemilihan ketua umum LDP dengan perolehan suara sebesar 74% dari total suara di parlemen sebesar 484 suara atau sebesar 298 sua-



Gambar 35.1. Junichiro Koizumi
Sumber: Encyclopedia Britannica, 2020p

ra. Sebelum menjabat sebagai perdana menteri Jepang, Junichiro Koizumi juga pernah menjadi menteri kesehatan didalam kabinet yang dibentuk oleh Ryutaro Hashimoto (Triananda, 2018: 62-64).

Junichiro Koizumi berhasil menjadi perdana menteri dengan mendapatkan dukungan yang luas dari berbagai wakil-wakil LDP di berbagai provinsi di Jepang dan berhasil menarik perhatian publik melalui kampanyenya untuk menyelamatkan ekonomi Jepang yang tidak stabil pada masa itu dengan menjadi satu-satunya kandidat yang memaparkan visinya secara jelas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan penghematan pasar bebas yang drastis untuk mengatasi stagnasi ekonomi Jepang selama satu dekade dan berjanji untuk mereformasi LDP yang mana perdana menteri sebelumnya tidak ada yang berani mengambil langkah ini karena berisiko pada ketidakstabilan politik di Jepang. Oleh sebab itu, Junichiro Koizumi dikenal sebagai sang revolusioner yang mencoba melakukan reformasi ekonomi sekaligus reformasi politik di Jepang pada saat itu (Conachy, 2001; Eiji & Fabio, 2014:5; Triananda, 2018:65).

Reformasi Struktural

Jepang sebelumnya pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada tahun 1960-1989 yang dikenal dengan istilah bubble economy. Dua dekade setelah itu, Jepang mengalami resesi ekonomi atau bisa dikatakan Jepang mengalami stagnasi ekonomi pasca peristiwa *bubble economy* tersebut, sehingga harus segera dilaksanakan reformasi ekonomi agar mampu bersaing dalam dunia global. Junichiro

Koizumi yang terpilih sebagai perdana menteri hadir dengan membawa konsep yang disebut “Reformasi struktural” untuk mengubah ekonomi Jepang agar lebih baik. Reformasi struktural memiliki dua poin paling penting yakni deregulasi peraturan undang-undang dan menswastakan/privatisasi beberapa BUMN yang dinilai kurang efisien demi perbaikan ekonomi. Reformasi struktural Koizumi juga dilakukan dengan cara memperkuat mekanisme pasar dengan menghasilkan pasar yang lebih bebas dan transparan, serta melakukan reformasi menetap di bidang privatisasi, fiskal, reformasi pajak untuk mencapai produktivitas dan peningkatan keuntungan bagi negara (Triandana, 2018).

Junichiro Koizumi mengalami tantangan dalam mewujudkan reformasi struktural yang ia cita-citakan disebabkan oleh permasalahan-permasalahan internal yang berasal dari dalam partainya sendiri karena seringnya terjadi persaingan antara faksi-faksi besar maupun faksi kecil di dalam LDP dan maraknya praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) didalam sistem pemerintahannya. Setelah lima tahun menjabat sebagai perdana menteri, upaya reformasi struktural Koizumi masih belum tercapai. Namun, pada pemilihan umum berikutnya yaitu pada tanggal 11 September 2005, Koizumi kembali mencalonkan diri sebagai perdana menteri dengan memasukkan tokoh wanita sebagai pesaingnya sekaligus sebagai calon muda yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam sistem politik di Jepang. Pemilu 11 September 2005 ini akan menentukan bagaimana nasib reformasi struktural Koizumi dibidang ekonomi, serta menjadi pertempuran bagi Koizumi dengan para penentang reformasinya. Namun, Koizumi berhasil menjadi perdana menteri Jepang yang terpilih kembali pada tahun 2005 dengan memanfaatkan peran media untuk meningkatkan popularitasnya ke publik melalui kampanyenya yang menarik perhatian publik (Eiji & Fabio, 2014: 5-6; Triandana, 2018: 70).

Setelah kembali menjabat sebagai perdana menteri di periode ke dua, tujuan reformasi struktural Junichiro Koizumi masih belum mendapatkan titik terang, bahkan tujuan awal reformasi struktural tersebut menjadi berubah. Perubahan itu berkaitan dengan kakunya birokrasi dan perselisihannya dengan sesama faksi LDP. Kemudian ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri Jepang pada tanggal 26 September 2006 dan digantikan oleh Shinzo Abe (Tri-ananda, 2018: 73).

Peningkatan Kerja Sama Keamanan Jepang-AS

Junichiro Koizumi merupakan perdana menteri Jepang yang menjabat dari tahun 2001-2006. Koizumi mengikuti jejak ayah dan kakaknya terjun ke dunia politik. Sebelum menjadi perdana menteri, Junichiro Koizumi pernah menjadi menteri kesehatan dan kesejahteraan pada tahun 1988, menteri pos dan telekomunikasi pada tahun 1992 dan kembali menjadi menteri kesehatan dan kesejahteraan lagi pada tahun 1996. Junichiro Koizumi dikenal sebagai pemimpin politik yang memiliki keberanian, karismatik, dan salah satu pemimpin yang paling populer pada masanya. Koizumi terkenal karena individualisme politik dan dikenal sebagai pemimpin yang merakyat dan tidak malu-malu untuk menampakkan diri di depan kerumunan. Gaya kepemimpinan Koizumi bersifat transformasional, dan dikenal dengan berbagai agenda reformasi yang ia ajukan seperti yang paling fenomenal yakni reformasi struktural dengan membuat kebijakan privatisasi layanan pos dan berbagai perusahaan badan usaha milik negara yang ada di Jepang demi perbaikan ekonomi (Envall, 2008).

Di dalam masa pemerintahannya selama lima tahun, Junichiro Koizumi memberikan dukungan terhadap tenaga nuklir. Koizumi menekankan bahwa ekonomi Jepang tidak akan bertahan tanpa energi

nuklir. Maka dari itu Koizumi mencoba untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta untuk memanfaatkan energi nuklir sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi berdasarkan energi terbarukan (G. Nishiyama, 2013).

Peran Jepang dalam mendukung kebijakan AS dalam War on Terror mendatangkan reaksi dari dalam negeri. Hal ini dikarenakan, setelah perang dingin, Jepang telah mengeluarkan statement untuk menolak perang dan larangan penyebaran kekuatan militer ke luar negeri. Namun, Junichiro Koizumi yang dikenal sebagai pemimpin yang berani dan karismatik menyatakan keinginannya untuk memperluas operasi Pasukan Bela Diri Jepang ke daerah-daerah yang berkonflik. Kondisi ini tentu mendatangkan pro dan kontra dari dalam negeri. Meskipun demikian, kondisi ini tidak memengaruhi Koizumi untuk terus menjalin hubungan dengan AS.

Hubungan kerjasama antara Jepang dan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Junichiro Koizumi terus meningkat terutama dalam sektor penanganan terorisme pasca penyerangan 9/11. Salah satu bentuk dukungan dalam War on Terrorism adalah ketika Junichiro Koizumi mengirim pasukan militer Jepang untuk mendukung segala aktivitas Amerika Serikat dalam membasmi pasukan terorisme di Afghanistan. Bentuk dukungan lain yang dilakukan Koizumi, ia mengirim pasukan bela diri Jepang menggunakan kapal penjelajah Aegis berteknologi tinggi ke Samudera Hindia. Kebijakan Koizumi dengan mengirim pasukan bela diri Jepang merupakan langkah berani dibandingkan dengan era perdana menteri sebelumnya. Kebijakan ini tentu sudah dipikirkan dengan matang oleh perdana menteri Koizumi dengan mempertimbangkan dukungan yang diberikan tersebut akan dapat memberikan nilai positif untuk sektor-sektor yang lain seperti sektor ekonomi, politik dan sosial budaya.

BAB 36

YASUO FUKUDA

2007-2008

Perjalanan Karir Politik

Yasuo Fukuda merupakan anak tertua dari perdana menteri ke-67 Takao Fukuda. Saat ayahnya menjadi perdana menteri 1976-1978 Yasuo Fukuda menjadi sekretaris politiknya. Yasuo Fukuda kemudian dipercaya untuk menjadi direktur Institut Kinzai bidang keuangan pada tahun 1978-1989. Sebelum pemilu September 2007 dan menjadi perdana menteri, Yosua Fukuda menduduki kursi ketua Federasi Cande Jepang. Yosua Fukuda mulai serius menapaki dunia politik tahun 1990 dan memenangkan kursi DPR. Pada tahun 1997 Yasuo Fukuda terpilih sebagai wakil direktur Partai De-



Gambar 36.1. Yasuo Fukuda
Sumber: Setiawan, 2019

mokrat Liberal dan pada bulan Oktober tahun 2000 dipercaya untuk menjabat Kepala Sekretaris Kabinet untuk Yoshiro Mori. Setelah menjabat empat tahun, Yasuo Fukuda mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet tanggal 7 Mei 2004 (Setiawan, 2019).

Pada pemilihan perdana menteri 23 September 2007, Yasuo Fukuda memperoleh 330 suara mengalahkan pesaingnya Taro Aso yang memperoleh suara 197 suara dan Yasuo Fukuda pun terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang ke-91. Di tingkat DPR, Yasuo Fukuda juga menang dengan memperoleh 338 suara pada 25 September 2007. Meskipun di majelis tinggi House of Councillors, Yasuo Fukuda kalah suara dibanding Ichiro Ozawa dengan perolehan 133 dan 106 tahun tetapi sesuai pasal 67 Konstitusi maka hasil akhirnya ditentukan oleh pilihan majelis rendah. Pada tanggal 26 September 2007 Kaisar Akihito melantik Yasuo Fukuda dan kabinetnya. Yasuo Fukuda menggantikan perdana menteri Shinzo Abe yang mengundurkan diri pada September 2007 dengan alasan sakit. Masa jabatan Shinzo Abe sebenarnya baru berakhir pada September 2009. Pada saat dilantik menjadi Perdana Menteri Yasuo Fukuda berumur 71 tahun dan dianggap merupakan Perdana Menteri Jepang yang tertua dalam kurun waktu 20 tahun belakangan ini (Setiawan, 2019).

Perdana menteri Yasuo Fukuda mewarisi sejumlah tantangan kebijakan luar negeri yang bisa dikatakan sangat serius yang menuntut perhatian langsung dari pemerintah, mulai dari masalah Korea Utara hingga pada masalah perpanjangan undang-undang tindakan khusus Anti Terorisme. Undang-undang tindakan khusus Anti Terorisme

ditetapkan otomatis berakhir pada 1 November 2007, dan pemimpin oposisi dari Partai Demokrat Jepang (LDJ) Presiden Ichiro Ozawa telah berjanji untuk menggagalkan apapun upaya LDP untuk mendukung sebuah *extension*. Untuk Perdana Menteri Yasuo Fukuda hal ini dianggap penting dalam pelaksanaan debat perpanjangan hukum Undang-undang tindakan khusus Anti Terorisme (Tanaka, 2007: 2).

Perdana Menteri Yasuo Fukuda dikenal sebagai perdana menteri dengan kebijakannya yang tidak populer. Salah satunya yaitu mengusulkan skema jaminan kesehatan yang bakal menaikkan biaya bagi banyak orang tua. Setelah melakukan *reshuffle* kabinet tanggal 1 Agustus 2008, pada tanggal 1 September 2008 Yasuo Fukuda mengumumkan pengunduran dirinya untuk menghilangkan hambatan terhadap proses legislatif dan politik akibat deadlock tak terpecahkan antara partai Yasuo Fukuda dan partai oposisi. Tanggal 24 September 2008 Yasuo Fukuda dan kabinetnya mengundurkan diri secara massal kemudian Taro Aso terpilih untuk menggantikan posisi Yasuo Fukuda. Kontroversi rencana kesehatan untuk orang tua membuat popularitas Yasuo Fukuda turun di bawah 30% pada satu tahap (Tempo, 2008).



Gambar 36.2. Yasuo Fukuda
Sumber: Widarahesty, Ayu, & Sisingamangaraja, 2013

Undang-Undang Tindakan Khusus Anti-Terrorisme

Pada awal masa jabatan Perdana Menteri Yasuo Fukuda, telah dihadapkan oleh sejumlah tantangan kebijakan luar negeri yang cukup serius dan menuntut perhatian langsung dari pemerintah, salah satunya yaitu masalah mengenai perpanjangan undang-undang tin-

dakan khusus Anti-Terrorisme (H. Tanaka, 2007: 2). Sebenarnya isu ini sudah ada sejak masa kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe (2006-2007). Pada masa kepemimpinan PM Shinzo Abe sudah diwarnai dengan dukungan terhadap undang-undang anti-terorisme yang didasarkan pada aliansi keamanan Amerika Serikat dan Jepang. Kemudian, seiring berjalannya waktu sampai pada masa Yasuo Fukuda isu amandemen pasal 9 menjadi isu yang cukup *urgent* bagi Jepang yang sangat ingin untuk menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan kondisi damai dan aman tidak hanya bagi Jepang sendiri tetapi juga bagi keamanan internasional.

Berhubungan dengan misi pasukan Jepang di Afghanistan untuk mendukung operasi Amerika Serikat, masih menjadi prioritas bagi Yasuo Fukuda. Untuk itu, perpanjangan undang-undang anti-terorisme menjadi penting bagi Yasuo Fukuda dalam membangun kapasitas militer Jepang secara tidak langsung melalui keterlibatannya dalam operasi-operasi perdamaian (H. Tanaka, 2007: 2). Dengan begitu, maka secara tidak langsung amandemen pasal 9 akan bergulir dengan sendirinya. Keinginan Yasuo Fukuda untuk membentuk militer Jepang tidak hanya sebatas sebagai pasukan bela diri, tetapi juga adanya kemungkinan membentuk pertahanan kolektif (*collective defense*). Hal ini merupakan perwujudan dari semakin besarnya keinginan Jepang, terutama dari kelompok kanan dalam hal ini kaum konservatif (LDP) untuk membangun kembali militernya sebagai basis pertahanan dan keamanan Jepang.

Potensi ancaman merupakan satu hal yang juga mendasari keinginan Jepang untuk mereinterpretasi pasal 9 konstitusi 1947 ini. Berkembangnya Tiongkok dalam segi militer dan juga ekonomi menjadi ancaman tersendiri bagi Jepang untuk menjadikan reinterpretasi ini menjadi suatu hal yang *urgent* (Jimbo, 2008). Selain itu berbagai uji coba rudal balistik nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara juga men-

jadi perhatian bagi Jepang yang berusaha untuk mencegahnya jika sewaktu-waktu memasuki wilayah teritorial Jepang.

Kebijakan Fukuda yang cenderung mendukung AS karena harapannya yang besar pada AS dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Jepang dan AS dapat menjamin keamanan di kawasan Asia Timur. Ia juga lebih mengintensifkan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara baik secara bilateral maupun secara multilateral. Ia juga bertekad untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok sehingga kerjasama bilateral dapat terjalin dengan baik. Oleh karena itu, pada masa pemerintahannya ia memiliki komitmen untuk tidak akan mengunjungi Kuil Yasukuni. Kebijakannya ini telah membuat hubungan Jepang-Tiongkok mencapai beberapa kerja sama seperti *energy security* dan *environment*. Jepang juga meminta Tiongkok untuk dapat menekan Korea Utara bukan hanya dalam masalah proliferasi nuklir tetapi juga karena keberadaan warga Jepang yang diculik oleh agen Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an (H. Tanaka, 2007). Kebijakan Yasuo Fukuda ini dipengaruhi oleh kebijakan ayahnya yang juga selalu mengutamakan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara di Asia Timur.

Hal yang utama pada usaha reinterpretasi pasal 9 konstitusi 1947 adalah pada komitmen Jepang untuk memberantas terorisme dan pada perubahan orientasi terorisme di era modern. Reinterpretasi pasal 9 ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari komitmen Jepang untuk mendukung propaganda *war on terror* yang dilakukan Amerika Serikat sejak era Presiden George W. Bush untuk mengatasi berbagai rangkaian teror yang dilakukan oleh Al-Qaeda terutama setelah peristiwa 9/11 yang benar-benar membuat Amerika Serikat terpukul dan membuat orientasi dunia pada terorisme berubah. Selain itu, reinterpretasi pasal 9 pada konstitusi 1947 ini juga merupakan bentuk keseriusan Jepang dalam upaya penanggulangan terorisme di kawasan Asia Timur dan juga Asia Tenggara.

BAB 37

TARO ASO

2008-2009

Perjalanan Karier Politik

Taro Aso merupakan salah satu perdana menteri Jepang yang menjabat pada September 2008 hingga September 2009. Ia lahir di Fukuoka, Jepang pada 20 September 1940. Ia merupakan salah satu perdana menteri Jepang yang masa menjabatnya singkat yaitu hanya satu tahun saja. Taro Aso berasal dari partai *Liberal Democratic Party* (LDP) dan sempat menjadi presiden partai tersebut pada tahun 2008. Taro Aso merupakan sosok aktivis di bidang politik. Ia sempat menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam organisasi politik Jepang. Pada tahun 2005, perdana menteri Jepang yang



Gambar 37.1. Taro Aso
Sumber: Shepherd, 2020

menjabat saat itu yaitu Koizumi Jun'ichiro menunjuk Taro Aso sebagai menteri luar negeri Jepang. Pada jabatan tersebut, Taro Aso mulai memberikan gambaran gaya kepemimpinannya yaitu menawarkan gagasan kepemimpinan dengan format yang lebih bersahabat dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan pemimpin era perang dunia. Setelah itu pada tahun 2008 perdana menteri Jepang yaitu Fukuda, Taro Aso kemudian mencalonkan diri untuk menjadi presiden dari partai LDP dan dia berhasil memenangkan pemilihan dengan memperoleh suara mayoritas dari rekan-rekan partai LDP-nya. Dua hari kemudian Taro Aso

pun diangkat dan berhasil menjadi perdana menteri Jepang menggantikan posisi perdana menteri Jepang sebelumnya yaitu Fukuda (Shepherd, 2020).

Setelah menjadi perdana menteri, Taro Aso sangat terkenal di kalangan anak muda, karena ia membangun citra kepemimpinannya dengan suasana dan jiwa anak muda yaitu pernah menjadi perwakilan Jepang dalam *Skeet Shooting* Olimpiade di Montreal pada tahun 1976. Selain itu, Taro Aso tidak segan menunjukkan kecintaannya pada bangsa Jepang yaitu sebuah karya grafis yang sangat populer hingga saat ini di Jepang yang tentunya juga digandrungi oleh banyak remaja di sana (Shepherd, 2020). Selain itu Aso juga melanjutkan kerjasama dengan China. Walaupun potensi dampak kerjasama dari pemerintahan Aso sulit di prediksi, karena pada pemerintahan singkatnya dia banyak melakukan kesalahan namun tidak berdampak buruk pada Jepang (Hagström, 2008: 227).

Runtuhnya Dominasi Partai LDP

Selain itu, beberapa negara di Asia termasuk Jepang dibawah pemerintahan Aso dan beberapa negara di Eropa sepakat memperkuat pilar utama pada isu demokrasi dan HAM, sebagai bentuk bangunan kerjasama antar Asia-Eropa (Rahman, 2015). Namun dalam pemerintahannya masih terdapat masalah-masalah yang melanda pemerintahan Taro Aso, antara lain pada awal pemerintahan Taro Aso tahun 2008, dunia mengalami krisis keuangan dan Jepang menjadi salah satu negara yang ikut merasakan dampaknya, sehingga ekonomi Jepang sampai mengalami resesi, maka dari itu fokus utama pada awal pemerintahannya yaitu pada sektor ekonomi. Kemudian, di tahun sebelumnya, yaitu ditahun 2009 Taro Aso kehilangan menteri keuangannya dengan alasan mengundurkan diri dari jabatannya setelah dirinya menghadiri acara televisi dengan keadaan yang dicurigai mabuk. Kemudian, partai LDP mengalami kekalahan telak dalam pemilihan lokal dan hal tersebut menjadi puncak dari kegagalan Taro Aso yang pada saat itu pula masih menjabat sebagai presiden di partai LDP. Sebagai tanggapan atas kekalahan partainya, Taro Aso akhirnya menyerukan untuk melakukan pemilihan umum yang akan dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2009 (Shepherd, 2020).

Pemilihan umum pun dilakukan dengan hasil Partai Demokrat Jepang (PDJ) yang menang telak mengalahkan partai LDP yang di pimpin oleh Taro Aso. Hal itu membuat runtuhnya dominasi partai LDP yang tidak pernah terputus yang mulai dibangun dan bertahan hingga lebih dari setengah abad. Berdasarkan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi dalam pemerintahannya sebagai perdana menteri Jepang termasuk kekalahannya dalam pemilihan umum, Taro Aso pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri Jepang. Kemudian karena kesalahan dalam pemerintahannya meng-

olah partai, ia pun turut mengundurkan diri dari posisi presiden dari partai LDP. Hingga pada pemilihan umum tahun 2012, partai LDP memenangkan kembali pemilihan tersebut dengan mendapat suara mayoritas. Akhirnya Shinzou Abe diangkat menjadi perdana menteri Jepang, dan Taro Aso diangkat sebagai wakil perdana menteri Jepang mendampingi Shinzou Abe dalam melaksanakan tata pemerintahan Jepang (Shepherd, 2020).

Kebijakan Diplomatik Jepang

Berbicara mengenai perdana menteri maka kita juga akan berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat selama masa jabatannya, begitu pula dengan Taro Aso. Walaupun masa jabatannya pada saat menjabat sebagai perdana menteri Jepang bisa dibilang sangat singkat, tetap saja ia pernah membuat kebijakan yang bertujuan membuat Jepang lebih baik. Sebelumnya, Taro Aso menjadi perdana menteri Jepang karena memenangkan pemilihan umum dengan memperoleh suara sebanyak 351 suara dari 527 total suara (Lib Dems, 2019c). Taro Aso menjadi perdana menteri Jepang mengikuti pengunduran diri Yasuo Fukuda di tahun 2008 (Hosoya, 2011: 20).

Menjadi perdana menteri selanjutnya di Jepang, Taro Aso tentunya juga telah merancang dan membuat beberapa kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan luar negeri untuk Jepang ke depannya. Dalam pidato pertamanya sebagai perdana menteri, Taro Aso menyampaikan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankannya selama menjabat. Pilar utama dari kebijakan Taro Aso adalah vitalitas, ketenangan pikiran, dan kontribusi bagi dunia. Taro Aso juga menekankan bahwa Jepang juga harus berkontribusi dalam penciptaan tatanan baru dalam perubahan zaman ini. Jepang juga harus mampu mengendalikan perubahan zaman (Japanese, 2009). Sebagai perdana menteri yang baru, dalam kebijakannya Taro Aso menempatkan ni-

lai-nilai universal dalam kebijakan diplomatik Jepang secara keseluruhan (Yoshimatsu, 2012: 363).

Selain hal tersebut, Taro Aso juga menyebutkan akan menciptakan masyarakat yang dinamis, dengan beberapa cara seperti memperkuat kegiatan usaha, penanggulangan pengangguran, pengelolaan terhadap keuangan publik, serta segala kegiatan yang menyangkut ekonomi (Japanese, 2009). Terlebih lagi pada masa jabatan Taro Aso sebagai perdana menteri Jepang, Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi. Hal tersebut ditakutkan akan berdampak juga pada perekonomian Jepang. Meskipun begitu, Jepang juga terkena dampak resesi ekonomi dari Amerika Serikat. Salah satu dampak besarnya yaitu melonjaknya angka pengangguran di Jepang. Namun demikian, untuk memulihkan keadaan ekonomi Jepang, Taro Aso meluncurkan rencana stimulus sebesar 150 miliar dolar sebagai kebijakan untuk menanggulangi dampak dari resesi ekonomi yang meresahkan Jepang (CNN, 2009).

Dalam kebijakan luar negerinya sendiri, Taro Aso juga tidak lupa untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi Asia dalam kebijakannya. Kerja sama regional pun dilakukan untuk memperkuat potensi pertumbuhan ekonomi dan memperluas permintaan domestik. Salah satu kebijakan yang telah dilakukan yaitu Jepang secara aktif turut berpartisipasi dalam pembangunan sub-wilayah, antara lain pembangunan koridor industri di wilayah Mekong antara Delhi-Mumbai dan juga termasuk pembangunan rel kereta api di India (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2019b).

Selain di Asia, Taro Aso juga dalam kebijakannya akan memimpin Jepang untuk berpartisipasi dalam memakmurkan wilayah Timur Tengah dengan mengirimkan beberapa bantuan. Bantuan yang diberikan yaitu dalam bidang keamanan dan rekonstruksi. Jepang akan mengirimkan pasukan *Self-Defense* di laut lepas Somalia sebagai tin-

dakan pembalasan atas pembajakan di wilayah tersebut. Jepang juga akan memberikan bantuan seperti membangun 50 klinik kesehatan, merenovasi kurang lebih 500 sekolah, melatih lebih dari 10 ribu guru dalam pendidikan dan memberikan bantuan berupa pendidikan literasi kepada sekitar 300 ribu orang. Dalam pidato Taro Aso tersebut, Jepang akan terus memberikan bantuan-bantuan seperti ini dengan menggunakan atribut khusus milik Jepang. Selain bantuan-bantuan, salah satu kebijakan dari Taro Aso yaitu untuk meningkatkan angka *Official Development Assistance* (ODA). Hal itu dikarenakan sebelum Taro Aso terpilih menjadi perdana menteri Jepang, volume ODA Jepang turun hingga beberapa tahun terakhir. Taro Aso mempertegas di tahun 2009 ia akan meningkatkan volume ODA Jepang 20% angka bersih (CNN, 2009).

BAB 38

YUKIO HATOYAMA

2009-2010

Perjalanan Karier Politik

Hatoyama Yukio dididik sebagai seorang insinyur, mendapatkan gelar sarjana di Universitas Tokyo (1969) dan gelar doktor di Universitas Stanford (1976). Dia mengajar di Universitas Senshū di Tokyo mulai tahun 1981, kemudian menjadi sekretaris pribadi ayahnya, Hatoyama Iichirō, anggota *the House of Councillors*, majelis tinggi Diet. Ia memulai karier politiknya sendiri sebagai anggota LDP, memenangkan pemilihan pada tahun 1986 menjadi anggota DPR sebagai anggota dari Hokkaido. Dia memegang kursi itu hingga 2012 (Encyclopedia Britannica, 2020h).



Gambar 38.1. Yukio Hatoyama
Sumber: Encyclopedia Britannica,
2020h

Pada tahun 1993, Hatoyama memutuskan hubungan dengan tradisi keluarga dan keluar dari LDP. Ia mengambil posisi dalam pemerintahan koalisi Hosokawa Morihiro (pendiri reformasi Partai Baru Jepang) yang berlangsung hingga tahun 1994. Selama beberapa tahun berikutnya ia bergabung dengan DPJ yang baru dibentuk dan naik pangkat. DPJ dengan cepat menjadi partai oposisi utama LPD. Sejak September 1999 hingga Desember 2002 Hatoyama menjabat sebagai presiden partai. Ia terpilih kembali ke posisi itu pada Mei 2009, setelah pengunduran diri Ozawa Ichirō (Encyclopedia Britannica, 2020h).

Yukio hatoyama lahir dan tumbuh dalam keluarga politisi paling terkemuka di Jepang dan Hatoyama termasuk generasi keempat. Kakek buyutnya yaitu Kazuo Hatoyama merupakan ketua Imperial Diet pada tahun 1890-an. Kakeknya Ichirō Htoyama pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada 1954-1956 dan Perdana Menteri pertama dari Partai Demokrat Liberal. Ayahnya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Selain itu, kakek dari pihak ibu Hatoyama, Ishibasahi Shōjirō, adalah pendiri produsen ban *Bridgestone Corporation*. Terlepas dari tradisi keluarga yang terlibat dalam politik, Yukio Hatoyama tidak terobsesi dengan politik sejak tahun-tahun awalnya. Kemudian dia aktif ke dunia politik dan menghabiskan beberapa waktu di Partai Demokratik Liberal, meskipun kemudian dia meninggalkannya dan bergabung dengan Partai Demokratik Jepang (Kulcsár, 2009:5).

Pada bulan Juli 2009, Perdana Menteri Tarō Asō dari LDP mengadakan pemilihan umum. Pada tanggal 30 Agustus 2009, Hatoyama sebagai kandidat utama DPJ, berjanji untuk mengakhiri penge-

luaran yang boros dan bergerak menuju desentralisasi pemerintahan. Meskipun LDP telah mendominasi kehidupan politik di Jepang sejak pertengahan 1950-an untuk semua kecuali periode singkat di tahun 1990-an, kedudukan publiknya telah goyah sejak Koizumi Junichiro yang populer mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada tahun 2006. Prediksi kemenangan telak DPJ menjadi kenyataan karena puluhan calon LDP disingkirkan dari jabatannya. Pada 16 September 2009, Hatoyama menggantikan Asō sebagai perdana menteri (Encyclopedia Britannica, 2020h).

Kebijakan Luar Negeri

Yukio Hatoyama ingin mengubah prioritas dari kebijakan luar negeri Jepang. Ia ingin agar kebijakan luar negeri Jepang kurang bergantung pada Amerika Serikat dengan menciptakan jarak yang sama antar negara Asia dan AS. Selain itu Hatoyama juga menyampaikan keinginannya untuk menciptakan bentuk kerjasama antara negara-negara Asia, dengan mengusulkan pembentukan blok mata uang Asia Timur. Namun rencana ini menyuarakan keprihatinan di Washington D.C. disebabkan kekhawatiran akan perubahan drastis yang dapat terjadi pada Aliansi AS dan Jepang yang telah menjalin hubungan selama beberapa dekade. Kemudian, Hatoyama dan menteri luar negerinya mengeluarkan kebijakan untuk merevisi status pangkalan Amerika di Okinawa, dan penilaian ulang atas kontribusi Jepang dalam upaya perang di Afghanistan dan di Samudera Hindia tempat Jepang menawarkan dukungan logistik untuk pasukan AS. Hal tersebut untuk di masa depan agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintahan baru ini dapat memenuhi aspirasi keduanya baik politik dalam negeri maupun luar negeri (Kulcsár, 2009:4).

Yukio Hatoyama dalam pidatonya di PBB sebagai Perdana Menteri Jepang, dia berpendapat bahwa terdapat tantangan men-

desak yang harus dihadapi dunia dan tantangan yang tidak dapat dihindari Jepang, di mana Jepang akan berusaha menjadi jembatan antara Timur dan Barat, antara negara maju dan berkembang dan peradaban yang beragam. Selain idenya tentang *fraternity* (persaudaraan), Coudenhove-Kalergi juga membuat kesan hebat pada Yukio sebagai pendiri Pan-Europa Movement. Coudenhove-Kalergi menciptakan gerakan tersebut pada tahun 1923, dan kemudian mengorganisirnya bersama dengan Otto von Habsburg. Gerakan ini diakui oleh banyak orang sebagai cikal bakal Uni Eropa. Yukio percaya bahwa Pan-Europeanism dan integrasi Uni Eropa harus diambil sebagai model untuk negara-negara Asia dan Jepang harus bertujuan untuk menciptakan semacam Asian Union. Ketika dia diperingatkan bahwa idenya terdengar utopis pada saat ini, dia berpendapat bahwa pada saat itu Coudenhove-Kalergi gagasan gerakan Pan-Eropa juga ilusi, namun itu hanya membutuhkan waktu setengah abad, dan visi Coudenhove-Kalergi berubah menjadi kenyataan (Kulcsár, 2009:9).

Yukio Hatoyama menemukan dilema yang menarik dalam kebijakan luar negeri Jepang di mana Jepang terletak antara dua kekuatan terbesar. Seperti halnya yang telah dia katakan antara lain: bagaimana seharusnya Jepang mempertahankan kemerdekaan politik dan ekonominya dan melindungi kepentingan nasionalnya ketika terjebak di antara Amerika Serikat, yang berjuang untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan dominan dunia dan China yang mencari cara untuk menjadi salah satunya? Dilema ini menempatkan Jepang berada diantara Asia dan Barat. Namun hal tersebut bukanlah hal baru dan telah menjadi pertanyaan abadi kebijakan luar negeri Jepang sejak kapal Hitam Commodore Perry tiba di Jepang dan memaksa Jepang untuk mengakhiri kebijakan pengasingannya (*sakoku*) dan membukan diri ke Arah Barat (Kulcsár, 2009).

Pada bulan-bulan berikutnya, dia menepati janjinya untuk mengurangi pengeluaran, memerintahkan penangguhan pekerjaan pada sejumlah proyek infrastruktur besar. Namun, pemerintahannya dipandang semakin tidak efektif, dan itu juga dirundung oleh skandal penggalangan dana yang berkelanjutan yang dikaitkan dengan Ozawa yang tetap menjadi tokoh sentral dalam hierarki DPJ. Selain itu, Hatoyama mendapat kecaman tajam mengenai pangkalan militer AS di Okinawa, yang selama kampanye 2009 dia bersumpah untuk dihapus dari pulau itu. Pada akhir Mei 2010, ia mencapai kesepakatan dengan pejabat AS untuk memindahkan lokasi pangkalan tetapi tetap di Okinawa, memicu protes dari Okinawa dan lainnya dan pembelotan dari koalisinya yang berkuasa. Dihadapkan dengan penurunan peringkat persetujuan dan kekhawatiran tentang pemilihan majelis tinggi yang dijadwalkan pada bulan Juli, Hatoyama mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan presiden partai pada tanggal 4 Juni 2010. Ia digantikan oleh Kan Naoto, anggota berpangkat tinggi DPJ lainnya (Encyclopedia Britannica, 2020h).

BAB 39

NAOTO KAN

2010-2011

Perjalanan Karier Politik

Naoto Kan merupakan Perdana Menteri Jepang yang ke-61. Ia menjabat dari tanggal 8 Juni 2010 hingga 2 September 2011 menggantikan pendahulunya yang tiba-tiba mengundurkan diri. Berbeda dengan para Perdana Menteri Jepang kebanyakan yang dilahirkan dari keluarga politisi, Naoto Kan atau yang biasa dipanggil Kan dilahirkan di keluarga pengusaha. Ia lahir di Ube, Jepang pada 10 Oktober 1946 dan merupakan seorang lulusan sarjana fisika dari *Tokyo Institute of Technology*. Ia memiliki julukan “Kan si pemarah” dikarenakan dengan sifat temperamennya (BBCNews, 2010).



Gambar 39.1. Naoto Kan
Sumber: BBCNews, 2010

Karier politik Kan diawali dengan terpilihnya sebagai anggota majelis rendah Jepang pada tahun 1980 sebagai anggota federasi sosial demokrat. Kemudian pada tahun 1996 di bawah pemerintahan PM Hashimoto Ryutari dari LDP (Partai Liberal Demokrat), ia diangkat sebagai menteri kesehatan dan atas jabatan itu popularitasnya langsung meningkat apalagi pada saat

itu ia berhasil menangani kasus infeksi HIV dari produk darah yang terkontaminasi (BBCNews, 2010).

Kemudian, ia mendirikan partai sendiri yaitu Partai Demokrat Jepang atau *Democratic Party of Japan* (DPJ) dan dua tahun setelahnya yaitu pada tahun 1998 ia menjadi ketua umum di DPJ. Beberapa tahun berikutnya yaitu pada tahun 2003 ia memimpin DPJ untuk bergabung dengan partai liberal yang dipimpin oleh Ozaha Ichiro. Lalu pada tahun 2009, Partai Kan yaitu DPJ berhasil mengambil alih kekuasaan dan Kan menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri strategis nasional, kemudian merangkap lagi sebagai menteri keuangan pada Kabinet Hatoyama, hingga pada akhirnya dia menjadi perdana menteri Jepang ke-61 secara resmi pada tanggal 8 Juni 2010 (Santoso & Perwita, 2017). Penjelasan ini memberi gambaran bahwa kepribadian Naoto Kan sangat mumpuni dalam bidang politik, terbukti dengan kariernya yang semakin gemilang walaupun dia merupakan seorang sarjana fisika dan dibesarkan pada keluarga non-politisi.

Krisis Nuklir

Setelah sukses meniti puncak karier politiknya sebagai Perdana Menteri Jepang, Kan harus menghadapi persoalan-persoalan Jepang waktu itu salah satunya adalah Krisis Nuklir. Pada saat itu di Jepang mengalami gempa bumi yang menyebabkan gelombang Tsunami dan

menghantam Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Akibat dari insiden tersebut terjadi kebocoran pada reaktor nuklir Fukushima (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1998). Kejadian tersebut menewaskan setidaknya 15.000 orang dan secara tidak langsung menyebabkan efek negatif pada sektor kesehatan seperti peningkatan kanker dikarenakan dampak radiasi atom (Biello, 2013). Walaupun Kan telah berupaya mengatasi insiden tersebut tetapi dampak dari kejadian tersebut telah menyebabkan popularitasnya menurun, terbukti pada bulan Juni 2011 mosi tidak percaya digaungkan di parlemen Jepang dan akhirnya Kan berjanji untuk mengundurkan diri, namun sebelum itu ia harus meloloskan beberapa rancangan undang-undang dulu.

Selain itu langkah efektif yang diambil Naoto Kan dalam menghadapi krisis ekonomi yang menyebabkan negara di bebani hutang sebesar 200 persen dari jumlah Produk Domestik Bruto Jepang (Kings-ton, 2010). Kebijakan Naoto Kan mengusulkan untuk menaikkan pajak konsumsi dan hal tersebut sebagai langkah yang cukup cerdas, terbukti dari jejak pendapat yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Jepang setuju dan siap untuk kenaikan pajak tersebut. Nantinya hasil dari kenaikan pajak akan dialihkan dalam bentuk program sosial yang secara tidak langsung akan menunjang kembali perekonomian Jepang yang kian memburuk.

Pada bulan Agustus 2011, akhirnya disahkannya tiga RUU oleh parlemen Jepang yang salah satunya tentang energi terbarukan (Kujath & Purwaningsih, 2011). Meskipun sejauh ini Jepang sudah menggunakan energi terbarukan dan dengan adanya undang-undang baru ini, PM Jepang Naoto Kan berharap posisi energi terbarukan akan semakin kuat dengan adanya UU baru ini. Setelah pengesahan undang-undang tersebut dan ditambah dengan kekacauan politik dan utang Jepang yang cukup besar hingga mencapai dua kali PDB Jepang, belum lagi Kan harus menghadapi oposisi di dalam tubuh partainya sendiri.

Akhirnya tepat pada tanggal 2 September 2011, Naoto Kan mengundurkan diri secara resmi.

Pedoman Program Pertahanan Nasional

Dalam hal politik luar negeri, kepemimpinan Naoto Kan membawa dampak signifikan dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri Jepang, terutama tentang hubungan antara Jepang-AS dan kaitannya tentang penggunaan pangkalan militer AS di Jepang sebagai upaya keamanan di Timur Jauh. Pasca PD II hingga pada kekuasaan partai liberal Jepang, Amerika Serikat merupakan sekutu utama Jepang. Namun setelah partai liberal tumbang ditandai dengan kemenangan partai demokratik pimpinan Naoto Kan, Jepang mulai sedikit menyingkirkan pengaruh AS dalam perpolitikan Jepang. Apalagi pada saat menjadi oposisi, Naoto Kan seringkali mengkritik pemerintah yang dianggap terlalu condong ke Barat. Menurut Kan, keamanan di timur tetap dapat dijaga dan dipertahankan tanpa campur tangan Amerika Serikat dalam hal ini terkait dengan pangkalan AS di Okinawa, Jepang (Meleghior, 2010).

Atas dasar itu, dalam kepemimpinan Naoto Kan dan pemerintahannya juga merilis pedoman pertahanan baru yang disebut Pedoman Program Pertahanan Nasional atau kadang disingkat NDPG. Pada dasarnya NDPG berfokus pada peningkatan kemampuan pertahanan Jepang untuk bereaksi pada situasi apapun menyusul ancaman ekspansi maritime Tiongkok dan ancaman Nuklir dari Korea Utara (Santoso & Perwita, 2017).

Salah satu kebijakan luar negeri yang pernah dilakukan oleh Naoto Kan adalah tetap bertahan dalam melawan Tiongkok dalam persengketaan kepulauan Diaoyu dan Senkaku yang berada di sekitar Laut Tiongkok Timur. Sengketa ini disebabkan ada perbedaan penafsiran



Gambar 39.2. Letak Wilayah Sengketa Pulau Senkaku-Diaoyu
 Sumber: Puspa, 2017

dalam klaim masing-masing negara. Namun keadaan ini lebih sulit lagi setelah ditemukannya cadangan gas dan minyak yang menyebabkan kedua negara semakin antusias untuk menguasai daerah tersebut. Salah satu insiden yang terjadi pada saat itu adalah ketegangan antara kapal pukat dari Tiongkok dan Penjaga pantai Jepang (Japan Coast Guard) yang menyebabkan ditangkapnya Kapten kapal pukat Tiongkok dan diberlakukan hukum Domestik Jepang padanya. Kejadian tersebut menyebabkan Tiongkok geram dan menolak mempertimbangkan pertemuan antara Perdana Menteri Wen dan Perdana Menteri Naoto Kan di Majelis Umum PBB di New York (Christianty et al., 2019).

Pulau-pulau tersebut adalah pulau yang tidak berpenghuni. Sekalipun tidak berpenghuni, Jepang dan China tidak akan mundur dari

wilayah tersebut. Sengketa atas pulau tersebut dapat memicu konfrontasi militer antara AS dan Tiongkok. Jepang memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan AS yang menyatakan bahwa jika wilayah Jepang diserang oleh kekuatan asing, AS wajib mempertahankannya. Konfrontasi Jepang-Tiongkok terus meningkat karena pada pertengahan April penjaga pantai Jepang mengumumkan kapal pemerintah China telah terlihat di perairan dekat Kepulauan Senkaku/Diaoyu setiap hari. Yoshihida Suga yang menjabat sebagai Kepala Sekretaris Kabinet Jepang pada April 2020 menegaskan bahwa Kepulauan Senkaku berada di bawah kendali Jepang secara historis dan hukum internasional. Sementara, pihak Tiongkok juga menegaskan mengenai kepemilikan Pulau Diaoyu dan pulau-pulau afiliasinya sebagai milik Tiongkok dan Tiongkok merasa memiliki hak untuk melakukan patroli dan kegiatan penegakan hukum di perairan tersebut.

BAB 40

SHINZO ABE

2006-2007, 2012-2020

Perjalanan Karier Politik

Shinzo Abe merupakan seorang politisi Jepang yang lahir pada 21 September 1954 di Tokyo, Jepang. Namanya tidak lagi asing dalam dunia perpolitikan Jepang. Dia merupakan cucu dari Kishi Nobusuke yang merupakan Perdana Menteri Jepang pada tahun 1957-1960. Dia juga merupakan politisi yang mulai aktif dalam Partai Liberal Demokratik Jepang pada tahun 1980an dan kemudian bekerja sebagai seorang sekretaris Abe Shintaro, yang merupakan menteri luar negeri Jepang sekaligus ayah dari Shinzo Abe. Pada tahun 1993, Shinzo Abe kemudian berhasil meraih kursi di parlemen Jepang



Gambar 40.1. Shinzo Abe
Sumber: BBCNews, 2020

dan memenangkan serangkaian jabatan dalam pemerintahan (Pletcher, 2020). Selama berada dalam pemerintahan, Shinzo Abe mendapat banyak dukungan karena sikap kerasnya terhadap Korea Utara pada saat itu.

Shinzo Abe merupakan Perdana Menteri ke-90 Jepang yang telah dua kali menjabat dan berasal dari Partai Liberal Demokratik Jepang.

Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada tanggal 26 September 2006. Shinzo Abe merupakan Perdana Menteri Jepang pertama yang terlahir pasca Perang Dunia II serta menjadi yang termuda pasca perang. Selama masa pemerintahannya, Shinzo Abe dikenal sebagai seorang pemimpin yang konservatif. Dia cenderung mengeluarkan kebijakan luar negeri yang terbilang tegas, misalnya saja adalah dukungan yang dia berikan kepada PBB terkait sanksi untuk Korea Utara yang melakukan uji coba nuklir. Shinzo Abe juga mengenakan sanksi terhadap Korea Utara secara sepihak yang meliputi larangan kunjungan ke berbagai pelabuhan Jepang secara keseluruhan oleh semua kapal yang berasal dari Korea Utara (Pletcher, 2020).

Kerja Sama Keamanan Jepang-Amerika Serikat

Selama periode pertama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe juga berusaha untuk memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat. Hal tersebut dilandasi dengan keinginan Shinzo Abe untuk membuat hubungan dengan Amerika Serikat lebih menguntungkan, terutama terkait dengan keamanan (Tamamoto, 2018). Shinzo Abe mempertimbangkan bahwa peran Amerika akan sangat membantu untuk kembali memperkuat stabilitas Jepang dan juga untuk memperkuat kedaulatan Jepang di kancah Internasional.

Sayangnya, Shinzo Abe menuai banyak kritikan selama masa pemerintahannya terutama yang berkaitan dengan kebijakan dalam negerinya. Shinzo Abe dianggap kurang responsif terhadap masalah dalam negeri Jepang sehingga selama pemerintahannya tidak dirasakan kemajuan yang signifikan terutama terkait dengan penanganan pensiun. Selain itu, skandal perekonomian Jepang juga semakin terdengar selama masa pemerintahan Shinzo Abe yang membuat kepemimpinannya semakin diragukan pada saat itu. Kemudian, pada September 2007 Shinzo Abe akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Jepang yang kemudian digantikan oleh Fukuda Yasou (Pletcher, 2020).

Abenomics Program

Shinzo Abe kemudian berhasil terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Jepang pada 26 Desember 2012. Dia kemudian dengan cepat segera meluncurkan program ekonomi yang sangat ambisius untuk merangsang kembali perekonomian Jepang yang telah lama dianggap lesuh. Shinzo Abe juga membantu mempercepat pemulihan wilayah timur laut Honshu yang hancur akibat tsunami pada tahun 2011. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Jepang, Shinzo Abe kemudian meluncurkan sebuah program yang disebut sebagai Abenomics. Program ini ditujukan oleh Shinzo Abe untuk kembali memperbesar pertumbuhan ekonomi Jepang melalui pengendalian laju inflasi, pengendalian nilai mata uang, serta pengendalian anggaran negara yang difokuskan untuk pembangunan proyek berskala besar dan penting. Program ini, berhasil membuat pertumbuhan ekonomi Jepang kemudian dapat meningkat kembali. Meskipun demikian, proyek ini tidaklah sepenuhnya berhasil karena pada paruh pertama tahun 2014, program ini tidak mampu membuat kenaikan yang lebih signifikan lagi dalam pertumbuhan ekonomi Jepang (LAM, 2015).

Selain dalam bidang ekonomi, Shinzo Abe juga aktif mengupayakan revisi konstitusi Jepang selama masa pemerintahannya. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2015, kabinet telah beberapa kali menyetujui penafsiran ulang terkait konstitusi perdamaian Jepang. Hal tersebut kemudian membuka jalan untuk mendukung RUU yang memudahkan Jepang untuk menggunakan kekuatan militer dalam keadaan terancam (Tamamoto, 2018). Shinzo Abe menjadi Perdana Menteri Jepang dengan masa jabatan paling lama. Namun sayangnya, pada 28 Agustus 2020 Shinzo Abe mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Jepang karena alasan kesehatan. Meskipun demikian, ia tetap menjabat sebagai juru kunci sembari menunggu pemilihan penggantinya (Pletcher, 2020).

Shinzo Abe merupakan Perdana Menteri Jepang dengan masa Jabatan paling lama. Selama masa pemerintahannya, Shinzo Abe banyak mengeluarkan kebijakan yang diformulasikan sebagai stimulus untuk kembali memperkuat posisi Jepang di kancah internasional. Salah satu kebijakan Shinzo Abe yang paling terkenal adalah *Abenomics* yang merupakan program peningkatan pertumbuhan ekonomi Jepang yang sebelumnya stagnan. Selain dalam bidang ekonomi, Shinzo Abe juga identik dengan permainan diplomatik yang menarik serta konservatif.

Abenomics yang merupakan kebijakan unggulan Shinzo Abe pada dasarnya merupakan sebuah upaya perbaikan tiga pilar perekonomian, yaitu stimulus fiskal, persoalan moneter, dan strategi pertumbuhan ekonomi. *Abenomics* dianggap penting dalam proses pemulihan ekonomi Jepang yang stagnan ditengah kebangkitan perekonomian China di dunia internasional. *Abenomics* diharapkan mampu untuk mendongkrak kembali perekonomian Jepang sebagai negara dengan perekonomian yang mapan. *Abenomics* semakin tersohor setelah salah satu pilar utamanya terbilang sukses. Shinzo Abe berhasil membuat

kesepakatan terkait penerapan kebijakan pelonggaran moneter dengan Bank sentral Jepang. Tujuan utamanya tentu saja untuk meningkatkan aktivitas perekonomian Jepang terutama bisnis, biaya pinjaman dan juga konsumsi. Selain itu, Shinzo Abe juga mendorong peningkatan aktivitas investasi dan korporasi modern yang mengutamakan inovasi. Selama dua tahun pertama penerapan *Abenomics*, situasi perekonomian Jepang meningkat sebesar 10% dan tingkat inflasi dibawah 2%. Meskipun angka tersebut belum cukup besar terutama terkait dengan inflasi yang diharapkan berada pada tingkat 2%, 52% publik tetap menaruh harapan yang besar terhadap *Abenomics* (Tamamoto, 2018).

Selanjutnya, *abenomics* terus dikembangkan sebagai sebuah upaya masif bagi Jepang untuk perekonomian negaranya. Tingkat GDP, tenaga kerja, profit dan berbagai indikator perekonomian lain terus mengalami perbaikan. Hal tersebut tentu saja merupakan sebuah peningkatan yang cukup berdampak besar bagi Jepang yang telah lama mengalami stagnasi perekonomian. Bagi perekonomian regional, *abenomics* menjadi roda penggerak berbagai kegiatan perekonomian seperti industri jasa yang produktivitasnya meningkat sampai 2% dan juga pariwisata. Di ranah global, *abenomics* mampu mendukung keberhasilan perdagangan bebas serta ekspor dan investasi infrastruktur yang dilakukan oleh Jepang. Bahkan, *Abenomics* juga memiliki peranan penting dalam kegiatan robotik dan teknologi Jepang dengan banyaknya inisiasi serta regulasi pemerintah yang mendukung perkembangan sektor ini.

Lebih jauh lagi, *Abenomics* juga memberikan kontribusi yang besar terhadap keragaman tenaga kerja di Jepang dimana baik pria maupun wanita, berpengalaman, ahli maupun baru memiliki perannya masing-masing dalam berbagai sektor. *Abenomics* juga berhasil memperbesar pasar Jepang yang berkaitan dengan industri kesehatan dan juga pertanian. Itu merupakan sebuah hal yang sangat penting

demi perwujudan perekonomian Jepang yang semakin berkembang pesat.

Menariknya, abenomics juga membawa Jepang dalam hubungan diplomatik yang semakin pesat. Selama masa pemerintahannya, Shinzo Abe banyak melakukan diplomasi ke berbagai negara di dunia untuk mencapai tujuan politiknya yaitu kemajuan Jepang yang semakin pesat. Shinzo Abe melihat bahwa abenomics harus didukung dengan hubungan diplomatik yang kuat untuk membuatnya semakin berkembang pesat dan mudah untuk mencapai tujuan utamanya dalam kancah internasional. Shinzo Abe terus menjalin hubungan diplomatik yang sangat erat dengan negara-negara yang memiliki faktor pendukung penting yang bisa digunakan untuk mendukung perekonomian Jepang. Dalam hal ini, Abe terus meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat, India, Australia, China, dan negara-negara asia pasifik. Tujuan utamanya adalah untuk merangkul berbagai kekuatan dan mampu untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari hubungan yang harmonis antar negara tersebut (LAM, 2015).

Menariknya lagi, Shinzo Abe menjadi Perdana Menteri Jepang pertama yang mengunjungi Iran sejak revolusi Islam. Kunjungan Abe dimaksudkan untuk meredakan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan oleh Shinzo Abe sebagai bentuk kepeduliannya terhadap perdamaian internasional serta juga untuk tetap menjalin hubungan diplomatik yang baik antar kedua negara dimana Amerika Serikat merupakan sekutu utama Jepang dan Iran merupakan pemasok minyak bagi Jepang sebelum embargo Amerika Serikat (Doodley, 2019). Ini menunjukkan bagaimana Shinzo Abe benar-benar memanfaatkan peluang diplomatik untuk dapat tetap memiliki peranan penting dalam kancah internasional sehingga banyak negara yang menjadikan Jepang sebagai partner yang sempurna untuk bekerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsalam, H. (2018). *Malari 1974: Protes Mahasiswa yang Ditunggangi Para Jenderal*. Retrieved 1 March 2020, from <https://tirtoid.com/malari-1974-protes-mahasiswa-yang-ditunggangi-para-jenderal-cDe9>
- Akita, G. (2020a). *Itō Hirobumi: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Ito-Hirobumi>
- Akita, G. (2020b). *Itō Hirobumi: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 June 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Ito-Hirobumi>

- Ando, Y. U., Sahashi, R., Hosoya, Y., Gannon, J., Mori, S., Ochi, T., & Takenaka, H. (2015). *Looking for Leadership The Dilemma of Political Leadership in Japan (First)*. Tokyo, Japan: Japan Center for International Exchange.
- Asia for Educators. (2020a). *Japan's Modern History: An Outline of the Period*. Retrieved 1 March 2020, from http://afe.easia.columbia.edu/timelines/japan_modern_timeline.htm
- Asia for Educators. (2020b). *The Meiji Restoration and Modernization*. Retrieved 1 March 2020, from http://afe.easia.columbia.edu/special/japan_1750_meiji.htm
- Barnhart, M. A. (2007). Making Waves: Politics, Propaganda, and the Emergence of the Imperial Japanese Navy, 1868-1922 (review). *Journal of Japanese Studies*, 33(1), 199–201. <https://doi.org/10.1353/jjs.2007.0002>
- BBC News. (2010). *Profil Naoto Kan*. Retrieved 1 March 2020, from https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/06/100604_naotoprofil
- BBC News. (2020). *Shinzo Abe: Japan's PM Resigns for Health Reasons*. Retrieved 1 November 2020, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-53943758>
- Beckley, M., Horiuchi, Y., & Miller, J. M. (2018). America's Role in the Making of Japan's Economic Miracle. *Journal of East Asian Studies*, 18(1), 1–21. <https://doi.org/10.1017/jea.2017.24>
- Biello, D. (2013). *The Nuclear Odyssey of Naoto Kan, Japan's Prime Minister during Fukushima*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.scientificamerican.com/article/nuclear-power-odyssey-of-naoto-kan-former-japan-prime-minister-during-fukushima/>

- Britannica. (2018). *List of Prime Ministers of Japan*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.britannica.com/topic/list-of-prime-ministers-of-japan-1812632>
- Chang, D. (1998). Breaking Through A Stalemate?: A Study Focusing on the Kuril Islands Issue in Russo-Japanese Relations. *JSTOR*, 22(3), 169–206. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/42704185?seq=21#metadata_info_tab_contents
- Chen, C. P. (2009). *Koki Hirota*. Retrieved 1 March 2020, from https://ww2db.com/person_bio.php?person_id=494
- Christianty, D., Jonathan, G., Simamora, L., Helena, R., Rebecca, R. D., & Wacanno, S. R. (2019). Geopolitik Cina Dan Jepang Di Asia Timur: Sengketa Kepulauan Diaoyu/Senkaku. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 3(1), 98–108. <https://doi.org/doi.org/10.33541/japs.v3i1.1072>
- CNN. (2009). *Japan Unveils \$150 billion Stimulus Plan*. Retrieved 1 March 2020, from https://money.cnn.com/2009/04/10/news/international/japan_stimulus/
- Cobbold, R. (1996). *Selected Statements by Prime Minister Tomiichi Murayama of Japan Concerning the Fiftieth Anniversary of the End of The War*. London, UK: Royal United Service Institute for Defense Studies.
- Conachy, J. (2001). *Koizumi's Election: a Turning Point in Japanese Politics*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.wsws.org/en/articles/2001/04/jap-a28.html>
- Dadabaev, T. (2019). *Central Asia: Japan's New 'Old' Frontier*. *Asia Pacific Issues*, February(136), 1–12.
- Dickinson, F. (2016). *Civilian and Military Power (Japan)*. International Encyclopedia.

- Dikarna, K., & Aini, N. (2019). *Klaim Pulau Kuril, Rusia Kirim Nota Protes kepada Jepang*. Retrieved 1 March 2020, from <https://internasional.republika.co.id/berita/pu5wfn382/klaim-pulau-kuril-rusia-kirim-nota-protes-kepada-jepang>
- Doodley, B. (2019). *Permainan Diplomati Baru Shinzo Abe yang Sulit: Perdamaian di Iran*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.matamatapolitik.com/analisis-permainan-diplomatik-jangka-panjang-baru-shinzo-abe-perdamaian-di-iran/>
- Edstrom, B. (1999). *Japan's Evolving Foreign Policy Doctrine: from Yoshida to Miyazawa*. Palgrave. Stockholm, Sweden: Palgrave New York. <https://doi.org/10.5860/choice.37-3021>
- Edwards, J. A. (2005). Community-Focused Apologia in International Affairs: Japanese Prime Minister Tomiichi Murayama's Apology. *Howard Journal of Communications*, 16(4), 317–336. <https://doi.org/10.1080/10646170500326590>
- Eiji, Y., & Fabio, S. (2014). *Superstars in Politics: The Role of the Media in The Rise and Success of Junichiro Koizumi*. Econstor. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10419/98661>
- Eldridge, R. (2020). *The Assassination Attempt of Nobusuke Kishi*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/07/13/commentary/japan-commentary/assassination-attempt-nobusuke-kishi/>
- Encyclopedia.com. (2020). *Koki Hirota*. Retrieved 1 June 2020, from <https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/hirota-koki>
- Encyclopedia Britannica. (2018). *Murayama Tomiichi; Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.britannica.com/topic/Social-Democratic-Party-of-Japan>

- Encyclopedia Britannica. (2020a). ***Count Kuroda Kiyotaka: Prime Minister of Japan***. Retrieved 1 September 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Count-Kuroda-Kiyotaka>
- Encyclopedia Britannica. (2020b). ***Count Yamamoto Gonnohyōe: Prime Minister of Japan***. Retrieved 1 September 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Count-Yamamoto-Gonnohyoe>
- Encyclopedia Britannica. (2020c). ***Diet: Japanese Government***. Retrieved 1 September 2020, from <https://www.britannica.com/topic/Diet-Japanese-government#ref217975>
- Encyclopedia Britannica. (2020d). ***Fukuda Takeo: Prime Minister of Japan***. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Fukuda-Takeo>
- Encyclopedia Britannica. (2020e). ***Hara Takashi: Prime Minister of Japan***. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Hara-Takashi>
- Encyclopedia Britannica. (2020f). ***Hashimoto Ryūtarō: Prime Minister of Japan***. Retrieved 1 September 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Hashimoto-Ryutarō>
- Encyclopedia Britannica. (2020g). ***Hatoyama Ichirō: Prime Minister of Japan***. <https://doi.org/10.4324/9781003046998-10>
- Encyclopedia Britannica. (2020h). ***Hatoyama Yukio: Prime Minister of Japan***. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Hatoyama-Yukio>
- Encyclopedia Britannica. (2020i). ***Hosokawa Morihiro: Prime Minister of Japan***. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Hosokawa-Morihiro>

- Encyclopedia Britannica. (2020j). *Ikeda Hayato: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Ikeda-Hayato>
- Encyclopedia Britannica. (2020k). *Ishibashi Tanzan: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Ishibashi-Tanzan>
- Encyclopedia Britannica. (2020l). *Japanese Communist Party: Political Party, Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/topic/Japanese-Communist-Party>
- Encyclopedia Britannica. (2020m). *Kaifu Toshiki: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Kaifu-Toshiki>
- Encyclopedia Britannica. (2020n). *Kishi Nobusuke: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Kishi-Nobusuke>
- Encyclopedia Britannica. (2020o). *Koiso Kuniaki: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 September 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Koiso-Kuniaki>
- Encyclopedia Britannica. (2020p). *Koizumi Junichiro: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Koizumi-Junichiro>
- Encyclopedia Britannica. (2020q). *Kōshaku Katsura Tarō: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Koshaku-Katsura-Taro>
- Encyclopedia Britannica. (2020r). *Matsukata Masayoshi: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Matsukata-Masayoshi>

- Encyclopedia Britannica. (2020s). *Meiji Restoration: Japanese history*.
<https://doi.org/10.1557/opl.2012>.
- Encyclopedia Britannica. (2020t). *Miyazawa Kiichi prime minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Miyazawa-Kiichi>
- Encyclopedia Britannica. (2020u). *Ōhira Masayoshi: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Ohira-Masayoshi>
- Encyclopedia Britannica. (2020v). *Ōkuma Shigenobu: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 June 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Okuma-Shigenobu>
- Encyclopedia Britannica. (2020w). *Saionji Kimmochi: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Saionji-Kimmochi>
- Encyclopedia Britannica. (2020x). *Satō Eisaku: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Sato-Eisaku>
- Encyclopedia Britannica. (2020y). *Shidehara Kijūrō: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Shidehara-Kijuro>
- Encyclopedia Britannica. (2020z). *Shishaku Saitō Makoto: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Shishaku-Saito-Makoto>
- Encyclopedia Britannica. (2020aa). *Suzuki Zenkō: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Suzuki-Zenko>
- Encyclopedia Britannica. (2020ab). *Tanaka Kakuei: Prime Minister of*

- Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Tanaka-Kakuei>
- Encyclopedia Britannica. (2020ac). *Tōjō Hideki: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Tojo-Hideki>
- Encyclopedia Britannica. (2020ad). *Wakatsuki Reijirō: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Wakatsuki-Reijiro>
- Encyclopedia Britannica. (2020ae). *Yamagata Aritomo: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Yamagata-Aritomo>
- Encyclopedia Britannica. (2020af). *Yoshida Shigeru: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Yoshida-Shigeru>
- Ensiklopedia. (2019a). *Kepulauan Ryukyu*. Retrieved 1 August 2020, from https://ms.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Ryukyu
- Ensiklopedia. (2019b). *Ogasawara Islands*. Retrieved 1 March 2020, from https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Ogasawara_islands.png
- Ensiklopedia. (2019c). *Takeo Fukuda*. Retrieved 1 March 2020, from https://id.wikipedia.org/wiki/Takeo_Fukuda
- Envall, H. D. P. (2008). Exceptions that make the rule? Koizumi Jun'ichirō and political leadership in Japan. *Japanese Studies*, 28(2), 227–242. <https://doi.org/10.1080/10371390802249198>
- Envall, H. D. P. (2015). *Japanese Diplomacy: The Role of Leadership*. (D. C. Earnest, Ed.), State University of New York Press (First). New York, USA: State University of New York.

- Fandom. (2019). *Toshiki Kaifu*. Retrieved 1 March 2020, from https://historica.fandom.com/wiki/Toshiki_Kaifu
- Fandom. (2020a). *Ichiro Hatoyama*. Retrieved 1 March 2020, from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ichiro_hatoyama.jpg
- Fandom. (2020b). *Ichirō Hatoyama*. Retrieved 1 March 2020, from https://media.fandom.com/wiki/Ichirō_Hatoyama
- Fauzia, R. (2017). Diplomasi Korea Selatan Mendesak Jepang Menandatangani Agreement on Comfort Women Tahun 2011-2015. *JOM Fisip*, 4(1), 1–15.
- Hackett, R. F. (1971). *Yamagata Aritomo in The Rise of Modern Japan, 1838-1922*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Hagström, L. (2008). Sino-Japanese Relations. *International Journal*, (Winter), 223–240.
- Hilldrup, V. (2006). The Reasons for Japanese Imperialism (1895-1910). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2352281>
- History. (2019a). *Japanese Prime Minister Hideki Tojo Makes Himself “Military Czar”*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.history.com/this-day-in-history/tojo-makes-himself-military-czar>
- History. (2019b). *The order is Given: Bomb Pearl Harbor*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.history.com/this-day-in-history/the-order-is-given-bomb-pearl-harbor>
- History, J. P. (2019c). *Japanese Political History No.2 Ashida administration*. Japanese Political History. Japan. <https://doi.org/>

org/10.4324/9781003046998-10

- Hosoya, Y. (2011). The Rise And Fall Of Japan's Grand Strategy: The 'Arc Of Freedom And Prosperity' And The Future Asian Order. *Asia-Pacific Review*, 18(1), 13–24. <https://doi.org/10.1080/13439006.2011.582677>
- Idhie. (2019). *Skandal Lockheed: Gurita Suap Perusahaan Amerika dan Jatuhnya Rezim Politik*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.indhie.com/latar/skandal-lockheed-gurita-suap-perusahaan-amerika-dan-jatuhnya-rezim-politik/3/>
- Indozone. (2019). *Hideki Tojo, Alasan Atas 8 Juta Jiwa Di Dunia Melayang Sia-sia*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.indozone.id/fakta-dan-mitos/0ys3Zv/hideki-tojo-alasan-atas-8-juta-jiwa-di-dunia-melayang-sia-sia>
- Japan Center for Asian Historical Records. (2019). *The Kuniaki Koiso Cabinet is Established*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.jacar.go.jp/english/shuhou-english/timeline/nenpyo19440722.html>
- Japanese. (2009). *Policy Speech by Prime Minister Taro Aso to the Hundred and Seventy-first Session of the Diet*. Retrieved 1 March 2020, from https://japan.kantei.go.jp/asophoto/2009/01/28shisei_e.html
- Japan Times. (2019a). *Imperial Rescript on Education*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/04/08/editorials/imperial-rescript-education>
- Japan Times. (2019b). *Nakasone's Great Achievements as A Pragmatist*. Retrieved 1 July 2020, from <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/12/02/editorials/nakasones-great-achievements-pragmatist/>

- Jimbo, K. (2008). Japanese Foreign Policy : 2006-2013, Responding to the Rise of China. *CIDOB International Yearbook 2013*, (July), 1–6. Retrieved from <https://www.refworld.org/docid/487ca2188c.html>
- Kazuhiko, T. (2014). *Eurasian Diplomacy in Japan, 1997–2001*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.nippon.com/en/features/c00205/>
- Kazuhiro, T. (2014). *Ito Hirobumi – Japan ’s First Prime Minister and Father*. (P. Murray, Ed.) (First). London, UK: Routledge.
- Kimuri, H. (1981). *Japan-Soviet Relations: From Afghanistan to Suzuki*. Hokkaido University. Sapporo, Japan. Retrieved from <http://hdl.handle.net/2115/5112>
- Kingston, J. (2010). *Can Anyone Govern Japan?* Retrieved 1 March 2020, from <https://foreignpolicy.com/2010/07/09/can-anyone-govern-japan/>
- Kujath, P., & Purwaningsih, A. (2011). *Jepang Beralih ke Energi Terbarukan*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.dw.com/id/jepang-beralih-ke-energi-terbarukan/a-15359806>
- Kulcsár, A. T. (2009). *Yukio Hatoyama and the Politics of Fraternity: Déja Vu in Japanese Politics?* Budapest, Hungaria. <https://doi.org/2060-5013>
- LAM, P. E. (2015). *Japan at a Crossroads: Abe Shinzo’s Politics and Abenomics*. East Asian Policy, 07(01), 121–129. <https://doi.org/10.1142/s1793930515000100>
- LDP. (2019). *A History of the Liberal Democratic Party*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.jimin.jp/english/about-ldp/history/104298.html>

- Lee, H. Y., Sorensen, C. W., & Ha, Y. C. (2014). Colonial rule and social change in Korea, 1910-1945. *Journal of East Asian Studies*, (April), 147–151. <https://doi.org/10.21866/esjeas.2014.14.1.009>
- Lib City. (2019). *Takashi Hara*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.lib.city.minato.tokyo.jp/yukari/e/man-detail.cgi?id=129>
- Lib Dems. (2019a). *A History of the Liberal Democratic Party: Chapter Eleven Period of President Nakasone's Leadership*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.jimin.jp/english/about-ldp/history/104291.html>
- Lib Dems. (2019b). *A History of the Liberal Democratic Party: Chapter Four Period of President Ikeda's Leadership*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.jimin.jp/english/about-ldp/history/104278.html>
- Lib Dems. (2019c). *Taro Aso wins Party Presidential Election*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.jimin.jp/english/news/104064.html>
- Llewelyn, J. (2010). Balancing Okinawa's Return with American Expectations: Japan and the Vietnam War 1965–75. *JSTOR*, 10(2), 305–342.
- Lone, S. (1989). *General Katsura Tarō and the Japanese Empire in East Asia, 1874-1913*. Australian National University.
- Lu, S. X. (2019). *The Making of Japanese Settler Colonialism: Malthusianism and Trans-Pacific Migration, 1868-1961*. Cambridge University Press (First). Cambridge, UK: Cambridge University Press. Retrieved from https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/644DFDA740495E1C2D49B20CCF914418/9781108482424AR.pdf/The_Making_of_Japanese_Settler_

Colonialism.pdf?event-type=FTLA

- MacArthur, D. (1994). *Japanese Operations in The Southwest Pacific Area*. Retrieved from [https://history.army.mil/books/wwii/MacArthur Reports/MacArthur V2 P2/ch20.htm](https://history.army.mil/books/wwii/MacArthur%20Reports/MacArthur%20V2%20P2/ch20.htm)
- MacBride, S. (2019). *Seán Macbride, Eisaku Sato*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.nobelpeaceprize.org/Prize-winners/Prizewinner-documentation/Sean-MacBride-Eisaku-Sato>
- MacDougall, T. E. (1988). Yoshida Shigeru and the Japanese Transition to Liberal Democracy. *International Political Science Review*, 9(1), 55–69. <https://doi.org/010055-1503>
- Mainichi. (2019). *Late Former PM Nakasone Set Japan's Postwar Politics on New Curse*. Retrieved 1 March 2020, from <https://mainichi.jp/english/articles/20191130/p2a/00m/0na/018000c>
- Man, T. S. (2007). *Japan's Grand Strategic Shift from Yoshida to Koizumi: Reflections on Japan's Strategic Focus in the 21st Century*. *Akademika*, 70(1), 117–136.
- Martin, D. (2007). *Kiichi Miyazawa, Japan Premier in the '90s, Dies at 87*. <https://doi.org/10.4324/9781003046998-10>
- McNeill, D. (2005). *Family Ties: The Tojo Legacy*. Retrieved 1 March 2020, from <https://apjpf.org/-David-McNeill/2151/article.html>
- McNeill, D. (2006). *Ryutaro Hashimoto: Old-school Japanese prime minister*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.independent.co.uk/news/obituaries/ryutaro-hashimoto-6096241.html>
- Melehior, J. K. (2010). *Naoto Kan's Foreign Policy*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.commentarymagazine.com/jillian-melchior/naoto-kans-foreign-policy/>

- Mimir. (2019). ***Hitoshi Ashida***. Retrieved 1 March 2020, from <https://mimirbook.com/id/9f657a63f87>
- Ministry of Foreign Affairs. (1977). ***Diplomatic Bluebook for 1977***. Ministry of Foreign Affairs of Japan. Tokyo, Japan. Retrieved from <https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1977/1977-contents.htm>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (1992). ***Diplomatic BlueBook***. Ministry of Foreign Affairs of Japan. Japan. Retrieved from <https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1992/1992-contents.htm>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (1995). ***Profile of Prime Minister Tomiichi Murayama***. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.mofa.go.jp/policy/economy/apec/1995/tomiichi.html>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (1998). ***Policy Speech by Prime Minister Keizo Obuchi to the 144th Session of the Diet***. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.mofa.go.jp/announce/announce/1998/11/1127-2.html>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2019a). ***Profile of Prime Minister Ryutaro Hashimoto***. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/pmv9701/hasi.html>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2019b). ***Special Address by H.E. Mr. Taro Aso, Prime Minister of Japan On the Occasion of the Annual Meeting of the World Economic Forum 'My Prescriptions for Reviving the World Economy'***. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.mofa.go.jp/policy/economy/wef/2009/address.html>
- Mishima, K. (1998). ***Relationship the Changing Between Japan 'S Ldp and the Bureaucracy***. California, US: University of California.

- Modern Japan. (2010). *Koiso Cabinet (Restoration of the Parliamentary Ministers System)*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.ndl.go.jp/modern/e/cha4/description16.html>
- Modern Japanese Historical Figures. (2013a). *Koiso, Kuniaki (1880-1950)*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/74.html>
- Modern Japanese Historical Figures. (2013b). *Tojo Hideki (1884-1948)*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/142.html?cat=9#birthNavi>
- Modern Japanese Historical Figures. (2019a). *Ishibashi, Tanzan: (1884-1973)*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/383.html>
- Modern Japanese Historical Figures. (2019b). *Kuroda, Kiyotaka: (1840-1900)*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/71.html>
- Modern Japanese Historical Figures. (2019c). *Wakatsuki, Reijiro (1866-1949)*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/219.html>
- Nailufar, N. N. (2020). *Gerakan Tiga A dan Propaganda Jepang*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/12/130000169/gerakan-tiga-a-dan-propaganda-jepang?page=all>
- Nakajima, S. (2006). *Formation of Japan-U.S. Security Arrangements*. In International Forum on War History (pp. 103–112).
- National Diet Library. (2013). *Kuroda, Kiyotaka*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/71.html>
- New World Encyclopedia. (2019). *Okuma Shigenobu*. Retrieved 1

- March 2020, from https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Okuma_Shigenobu
- New York Times. (1973). *Tanzan Ishibashi Dies at 88; Was Former Premier of Japan*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.nytimes.com/1973/04/25/archives/tanzan-ishibashi-dies-at-88-was-former-premier-of-japan-philosopher.html>
- Nishiyama, G. (2013). *Fukushima Watch: Popular Ex-PM Koizumi Comes Out Against Nukes*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.wsj.com/articles/BL-JRTB-15121>
- Nishiyama, T. (2008). J. Charles Schencking, Making Waves: Politics, Propaganda, and the Emergence of the Imperial Japanese Navy, 1868–1922. *East Asian Science, Technology and Society: An International Journal*, 2(1), 147–150. <https://doi.org/10.1007/s12280-008-9032-y>
- Nobelpeacesummit. (2019). *Eisako Sato*. Retrieved 1 March 2020, from <http://www.nobelpeacesummit.com/project/eisaku-sato/>
- Office of Strategic Services. (1945). Crisis in Japan. Retrieved 1 March 2020, from https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0000709439.pdf
- Onishi, N. (2019). *Yasuhiro Nakasone, Assertive Prime Minister of Japan, Dies at 101*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.nytimes.com/2019/11/28/obituaries/yasuhiro-nakasone-dies-japan.html>
- Ovsyannikov, N. (2007). Prince Saionji Kinmochi and His Autobiography. *In International Symposium. Moscow, Ryssia: Institute of Asian and African Studies*. <https://doi.org/doi.org/10.15055/00001358>
- Paramonov, O., & Puzanova, O. (2018). Tokyo's Diplomacy in Eurasia:

- Successes and Failures (1997–2017). *Journal of Eurasian Studies*, 9(2), 134–142. <https://doi.org/10.1016/j.euras.2018.06.003>
- Pearl Harbor. (2019). *The Man Who Ordered Pearl Harbor: Hideki Tojo*. Retrieved 1 March 2020, from <https://visitpearlharbor.org/the-man-who-ordered-pearl-harbor-hideki-tojo/>
- Peoplepill. (2019). *Ryutaro Hashimoto*. Retrieved 1 March 2020, from <https://peoplepill.com/people/ryutaro-hashimoto/>
- Perez, L. G. (2013). *Japan at War: an Encyclopedia. (L. G. Perez, Ed.) (First)*. Santa Barbara, California: ABC-CLIO.LLC.
- Pletcher, K. (2020). *Abe Shinzo: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 September 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Abe-Shinzo>
- Purbantina, A. (2013). Dari Yoshida Doctrine ke Fukuda Doctrine : Politik Luar Negeri Jepang di Asia Tenggara. *Global & Policy*, 1(1), 39–46. Retrieved from http://eprints.upnjatim.ac.id/4445/1/9._Halaman_39-46%2C_Adiasri_Putri_P..pdf
- Puspa, A. W. (2017). *China Tentang Klaim Jepang-AS atas Pulau Diaoyu*. Retrieved 1 March 2020, from <https://kabar24.bisnis.com/read/20170214/19/628537/china-tentang-klaim-jepang-as-atas-pulau-diaoyu>
- Rahman, I. (2015). Bantuan Demokrasi dalam Perspektif “Jepang Baru”: Suatu Analisis terhadap Diplomasi Demokrasi Jepang. *Jurnal Wanua*, 1(1), 17–36. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Reid, T. R. (1992). *Japan’s Anger Speaks Louder Than Money*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1992/10/08/japans-anger-speaks-louder-than-money/ef2c0776-5461-47b3-8b24-a1151b979a17/>

- Reuters. (1991). *Japan-China Business Rising*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.nytimes.com/1991/06/25/business/japan-china-busines-rising.html>
- Ryouta, M. (2020). *Who Should Govern: The Political Reformation after The First World War in Japan*. Kobe, Japan: Kobe University.
- Saegusa, A. (1999). *Japan Acts to Speed Technology*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.nature.com/articles/43240>
- Samuels, R. J. (2001). *Kishi and Corruption: An Anatomy of the 1955 System (December No. 83)*. Japan Policy Research Institute. Japan. Retrieved from <http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp83.html>
- Santoso, R. P., & Perwita, A. A. B. (2017). The Shift and Continuity of Japanese Defense Policy: Revolutionary Enough? *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 4(2), 156. <https://doi.org/10.21512/jas.v4i2.1906>
- Sayle, M. (1995). *Obituary: Takeo Fukuda*. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.independent.co.uk/news/people/obituary-takeo-fukuda-1590409.html>
- Schlichtmann, K. (1995). A Statesman for The Twenty-First Century? The Life and Diplomacy of Shidehara Kijuro (1872-1951). *In The Transactions of The Asiatic Society of Japan* (Vol. 10, pp. 33-67). The Japan Times.
- SearchinginHistory. (2019). *Matsukata Masayoshi: A Reformer in a Transformation*. Retrieved 1 March 2020, from <https://searchinginhistory.blogspot.com/2015/05/matsukata-masayoshi-reformer-in.html>
- Setiawan, E. (2019). *Yasuo Fukuda*. Retrieved 1 March 2020, from <https://m.merdeka.com/yasuo-fukuda/profil/>

- Shepherd, M. C. (2020). *Asō Tarō: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Taro-Aso>
- Sims, C. (2000). *Keizo Obuchi, Former Japanese Prime Minister, Dies at 62*. Retrieved 1 March 2020, from <https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/world/asia/051500japan-obuchi-obit.html>
- Singh, B. (2017). Japan-ASEAN Relations: Challenges, Impact and Strategic Options. *Asian and European Affairs*, 1, 95–106. Retrieved from <https://www.rsis.edu.sg/staff-publication/japan-asean-relations-challenges-impact-and-strategic-options/>
- Sugita, Y. (2016). The Yoshida Doctrine as a Myth. *The Japanese Journal of American Studies*, 27(27), 123–143.
- Tamamoto, M. (2018). *Towards True Independence: Abe Shinzo's Nationalism*. (K. P. Clements, Ed.), Identity, Trust, and Reconciliation in East Asia. New York, USA: World Policy Institute. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54897-5_8
- Tanaka, H. (2007). *Japanese Foreign Policy under Prime Minister Yasuo Fukuda*. East Asia Insights, 2(October 2007). Retrieved from <http://www.jcie.or.jp/insights/2-5.pdf>
- Tanaka, T. (1993). The Soviet-Japanese Normalization in 1955-6 and US-Japanese Relations. *Hitotsubashi Journal of Law and Politics*, 21, 65–93.
- Tellis, A. J. (2017). *Power, Ideas and Military Strategy in the Asia-Pacific*. National Bureau of Asian Research.
- Tempo. (2008). *Yasuo Fukuda Perdana Menteri Tak Populer*. Retrieved 1 March 2020, from <https://dunia.tempco.co/read/133260/>

yasuo-fukuda-perdana-menteri-tak-populer

- Thayer, N. B. (1985). Japan in 1984: The Nakasone Era Continues. *Asian Survey*, 25(1), 51–64. <https://doi.org/10.2307/2644056>
- The Pacific War Online Encyclopedia. (2013). *Koiso Kuniaki (1880-1950)*. Retrieved 1 March 2020, from http://pwencycl.kgbudge.com/K/o/Koiso_Kuniaki.htm
- Tikkanen, A. (2020). *Nakasone Yasuhiro: Prime Minister of Japan*. Retrieved 1 August 2020, from <https://www.britannica.com/biography/Nakasone-Yasuhiro>
- Tkach, L. (2003). Party Competition on the Internet in Japan. *Party Politics*, 9(1), 105–123. <https://doi.org/10.1177/1354068803009001722>
- Tozawa, K. (2013). Yoshida Shigeru and Political Parties' Difficulties Over The Question of the San Francisco Peace treaty. In I. Nish (Ed.), *The British Commonwealth and The Allied Occupation of Japan, 1945-1952* (First, pp. 223–234). Boston, USA: Global Oriental. Retrieved from file:///Users/seniwati/Downloads/_book_edcoll_9789004242968_B9789004242968-s019-preview.pdf
- Triananda, D. (2018). *Koizumi Jun'ichiro: Sebuah Ambisi Revolusi*. *Lensa Budaya*, 13(1), 61–74.
- Tsuda, T. (2019). *Satō Eisaku and the Establishment of Single-Party Rule in Postwar Japan*. Harvard University. Retrieved from <https://dash.harvard.edu/handle/1/42013073>
- UNESCO. (2019). *Who was Keizo Obuchi?* Retrieved 1 March 2020, from <https://en.unesco.org/fellowships/keizo-obuchi/institutional-page/who-was-keizo-obuchi>

- US Embassy. (2019). *The U.S.-Japan Alliance – The Gold Standard in Win-Win Defense Treaties*. Retrieved 1 March 2020, from <https://jp.usembassy.gov/slide/the-u-s-japan-alliance-the-gold-standard-in-win-win-defense-treaties-2/>
- Wada, T. (2011). *Japanese Perspective of Total War. 2011 International Forum on War History: The Pacific War as Total War*. Japan. Retrieved from <http://www.nids.mod.go.jp/english/event/forum/pdf/2011/17.pdf>
- Watanabe, A. (2016). *The Prime Minister of Postwar Japan, 1945-1995*. (R. D. Eldridge, Ed.) (First). London, UK: Lexington Books.
- Watanabe, T. (1993). *ASIA: New Premier Leaves Elitism To Japan's Past : Morihiro Hosokawa Shuns Traditional Symbols Of Power*. One Radical Change: He Played Tennis On A Weekend. Retrieved 1 March 2020, from https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1993-08-21-mn-26023-story.html?_amp=true
- Weeks, D. (1991). Miyazawa Kiichi: A Prime Minister for the New Era in an Old-fashioned Way. *Japanese Studies*, 11(3), 4–20. <https://doi.org/10.1080/10371399108521970>
- Weinberg, G. L. (2005). *Visions of Victory: The Hopes of Eight World War II Leaders (First)*. New York, USA: Cambridge University Press.
- Widarahesty, Y., Ayu, R., & Sisingamangaraja, J. (2013). *Fenomena Pengunduran Diri Di Kalangan Pejabat Publik Jepang (Studi Tentang Budaya Politik Masyarakat Jepang Tahun 2007-2011)*, (1), 59–73.
- Yagami, K. (2006). *Konoe Fumimaro and the Failure of Peace in Japan, 1937-1941: A Critical Appraisal of the Three-Time Prime Minister*. Jefferson, North Carolina, USA: McFarland & Company, Inc.

- Yellin, R. (2005). *Hosokawa Morihiro: Politician-Turned-Potter*. <https://doi.org/10.1557/opl.2012>.
- Yeo, A. I. (2017). China-Japan-Korea Trilateral Cooperation: Is It for Real? *JSTOR*, 18(2), 69–76. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/26396021>
- Yoshimatsu, H. (2012). Identity, Policy Ideas, and Asian Diplomacy: Japan's Response to The Rise of China. *International Area Studies Review*, 15(4), 359–376. <https://doi.org/10.1177/2233865912467181>
- Yukio, I. (2010). Itō Hirobumi: The Man Who Created Modern Japan. In J. Foundation (Ed.), *A Dialogue with the Japanese People* (First, p. 7). Tokyo, *Japan: Japanese Book News* Vol. 65. Retrieved from <http://www.jpfb.go.jp/e/publish/jbn/%0Dindex.html>



Seniwati adalah dosen Departemen Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. Ia lahir pada 2 Februari 1976, di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah memperoleh gelar S1 dari Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin

pada tahun 1998, dan gelar Master dari Departemen Studi Amerika di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001, Seniwati bergabung dengan program doktoral di Departemen Studi Internasional di Universitas Utara Malaysia dan lulus pada 2014. Ia menjadi dosen pada tahun 2001 di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin. Bidang penelitiannya meliputi keamanan, konflik resolusi, pemberdayaan perempuan, dan penanggulangan terorisme. Buku yang telah diterbitkan, seperti:

1. Keunikan dan Permasalahan Perbatasan-Perbatasan di Dunia (2020)
2. Transnational Organized Crime: Tinjauan Berbasis Ilmu Hubungan Internasional (2020)
3. Sistem Politik dan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat (2020)
4. Model Penanganan Terorisme Berbasis Kearifan Lokal (2020)
5. How Do Women Entrepreneurs Arise Amid Covid-19 Crisis? (2020)
6. Studi Keamanan dan Kajian Strategis (2020)

Penerbit



Gedung UPT Unhas Press

Telp. 0411 – 8997706

HP/WA +62 8535 3555 569

Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10

Email: unhaspress@gmail.com

ISBN 978-979-530-279-7

